



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2025-2029 diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi diwujudkan dalam bentuk rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Padang Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk periode lima tahun sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam

penyusunan Renja dan pelaksanaan program pembangunan Daerah.

Pasal 3

- 1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- 2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. dinas kesehatan;
 - f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - h. dinas pemadam kebakaran;
 - i. dinas pertanahan;
 - j. satuan polisi pamong praja;
 - k. dinas sosial;
 - l. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - m. dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - n. dinas perikanan dan pangan;
 - o. dinas lingkungan hidup;
 - p. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - q. dinas perhubungan;
 - r. dinas komunikasi dan informatika;
 - s. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - t. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - u. dinas pemuda dan olahraga;
 - v. dinas pariwisata;
 - w. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - x. dinas pertanian;
 - y. dinas perdagangan;
 - z. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - aa. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - bb. badan pendapatan daerah;
 - cc. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - dd. badan kesatuan bangsa dan politik;
 - ee. badan penanggulangan bencana daerah;
 - ff. kecamatan padang timur;
 - gg. kecamatan padang barat;
 - hh. kecamatan padang utara;
 - ii. kecamatan padang selatan;
 - jj. kecamatan koto tengah;
 - kk. kecamatan lubuk kilangan;
 - ll. kecamatan lubuk begalung;
 - mm. kecamatan kuranji;
 - nn. kecamatan nanggalo;
 - oo. kecamatan pauh; dan
 - pp. kecamatan bungus teluk kabung.

- 3) Renstra sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 4) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 5) Renstra inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 6) Renstra dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 7) Renstra dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 8) Renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 9) Renstra dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 10) Renstra dinas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 11) Renstra dinas pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 12) Renstra satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 13) Renstra dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 14) Renstra dinas tenaga kerja dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 15) Renstra dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 16) Renstra dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 17) Renstra dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 18) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- 19) Renstra dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 20) Renstra dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 21) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 22) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 23) Renstra dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 24) Renstra dinas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 25) Renstra dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 26) Renstra dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 27) Renstra dinas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 28) Renstra badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 29) Renstra badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 30) Renstra badan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 31) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 32) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 33) Renstra badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- 34) Renstra kecamatan padang timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 35) Renstra kecamatan padang barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 36) Renstra kecamatan padang utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 37) Renstra kecamatan padang selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 38) Renstra kecamatan koto tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 39) Renstra kecamatan lubuk kilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 40) Renstra kecamatan lubuk begalung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 41) Renstra kecamatan kurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 42) Renstra kecamatan nanggalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 43) Renstra kecamatan pauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 44) Renstra kecamatan bungus teluk kabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan melalui kepala Bappeda.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2025



Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS KESEHATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBARvi

DAFTAR GRAFIK.....vii

DAFTAR BAGANviii

BAB I PENDAHULUANI-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG II-1

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan II-1

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan..... II-1

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan II-48

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kesehatan II-70

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... II-152

2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan II-154

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan II-155

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan..... II-154

2.2.2 Isu Strategis..... II-173

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
.....III-1

3.2 Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 III-6

3.3 Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 III-8

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

4.1. Uraian Program Dinas Kesehatan IV-24

4.2. Uraian Kegiatan Dinas Kesehatan IV-25

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu
Indikatif..... IV-55

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah IV-85

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan IV-88

4.6. Target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)IV-89

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin Kondisi Bulan Desember 2024	II-48
Tabel 2. 2 Jumlah ASN Dinas Kesehatan berdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi Bulan Desember 2024.....	II-49
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS RSUD dr Rasidin Padang Tahun 2024	II-50
Tabel 2.4 Klasifikasi Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin	II-53
Tabel 2. 5 Klasifikasi Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan	II-54
Tabel 2. 6 Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2024	II-54
Tabel 2. 7 Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan	II-65
Tabel 2. 8 Bangunan Gedung Kantor RSUD dr Rasidin Keadaan Tahun 2024 ..	II-68
Tabel 2. 9 Jumlah Tempat Tidur RSUD dr Rasidin	II-70
Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	II-70
Tabel 2. 11 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan dan Indikator Lainnya Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2019-2020	II-77
Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan RSUD dr Rasidin Kota Padang Tahun 2019-2020.....	II-91
Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2024.....	II-98
Tabel 2. 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr Rasidin Tahun 2021-2024.....	II-136
Tabel 2. 16 Jumlah Kunjungan Poliklinik Dari Tahun 2020 s/d 2024.....	II-150
Tabel 2. 17 Indikator Ruangan Instalasi Rawat Inap Tahun 2020- 2024	II-152
Tabel 2. 18 Jumlah Kunjungan OK Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2. 19 Mitra Dinas Kesehatan	II-154

Tabel 2. 20 Pemetaan Permasalahan Dinas KesehatanII-155

Tabel 2. 21 Penyebab kematian bayi pada tahun 2024II-161

Tabel 2. 22 Kasus TBC Kota Padang Tahun 2024.....II-163

Tabel 2. 23 Pemetaan Permasalahan RSUD dr. Rasidin Padang.....II-171

Tabel 2. 24 Teknik Merumuskan Isu Strategis Dinas Kesehatan dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan DinamisII-187

Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2025-2029..... III-5

Tabel 3. 2 Penentuan Strategi berdasarkan Sasaran Renstra..... III-7

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD III-9

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan III-9

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan IV-1

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030..... IV-24

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang IV-25

Tabel 4. 4 Uraian Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2026-2030 IV-56

Tabel 4. 5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah IV-85

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030IV-88

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030..... IV-89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sebaran Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Padang II-66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Klasifikasi Ketenagaan berdasarkan Jenis Kelamin II-53

Grafik 2. 2 Klasifikasi Ketenagaan berdasarkan Pendidikan II-53

Grafik 2. 3 Jumlah Kunjungan Poliklinik Tahun 2020-2024..... II-150

Grafik 2. 4 Jumlah Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020 s/d 2024 ..II-151

Grafik 2. 5Jumlah Pasien Kamar Operasi Tahun 2019-2022 II-153

Grafik 2. 6 Persentase Balita Stunting di Kota Padang Tahun 2024 II-158

Grafik 2. 7 Kasus Kematian Ibu di Kota Padang Tahun 2019-2024..... II-160

Grafik 2. 8 Penyebab kematian ibu pada tahun 2024 II-160

Grafik 2. 9 Angka Kematian Bayi di Kota Padang Tahun 2019-2024 II-161

Grafik 2. 10 Angka Kematian Balita Tahun 2020-2024..... II-162

Grafik 2. 11 Cakupan IDL di Kota Padang Tahun 2019-2024 II-164

Grafik 2. 12 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Kota Padang Tahun 2024 II-167

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Dinas KesehatanII-2

Bagan 2. 2 Struktur Organisasi RSUD dr. Rasidin Padang II-30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkannya, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan

Upaya kesehatan harus didasarkan pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang tertuang pada Permenkes No.4 Tahun 2019. Dalam Permenkes tersebut terdapat indikator yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota dengan target pencapaian seluruh indikator wajib 100%. Pencapaian target-target SPM tidak bisa terlepas dari *framework* perencanaan nasional sesuai Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti pencapaian target-target SPM harus terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan lima tahunan seperti RPJMN/RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan turunannya.

Pedoman dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan enam (6) tahapan : a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penutupan. Tahapan penyusunan Renstra berlaku mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 akan digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Padang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah tentang Kesehatan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039)
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

- Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 108);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 145);
 28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9).
 29. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 92);
 30. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan ini adalah menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan, sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra yaitu :

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- b. Merumuskan tolok ukur kinerja organisasi yang terukur, transparan dan akuntabel;
- c. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kesehatan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Dinas Kesehatan

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja Dinas Kesehatan :

- 4.1. Uraian Program Dinas Kesehatan
- 4.2. Uraian Kegiatan Dinas Kesehatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan

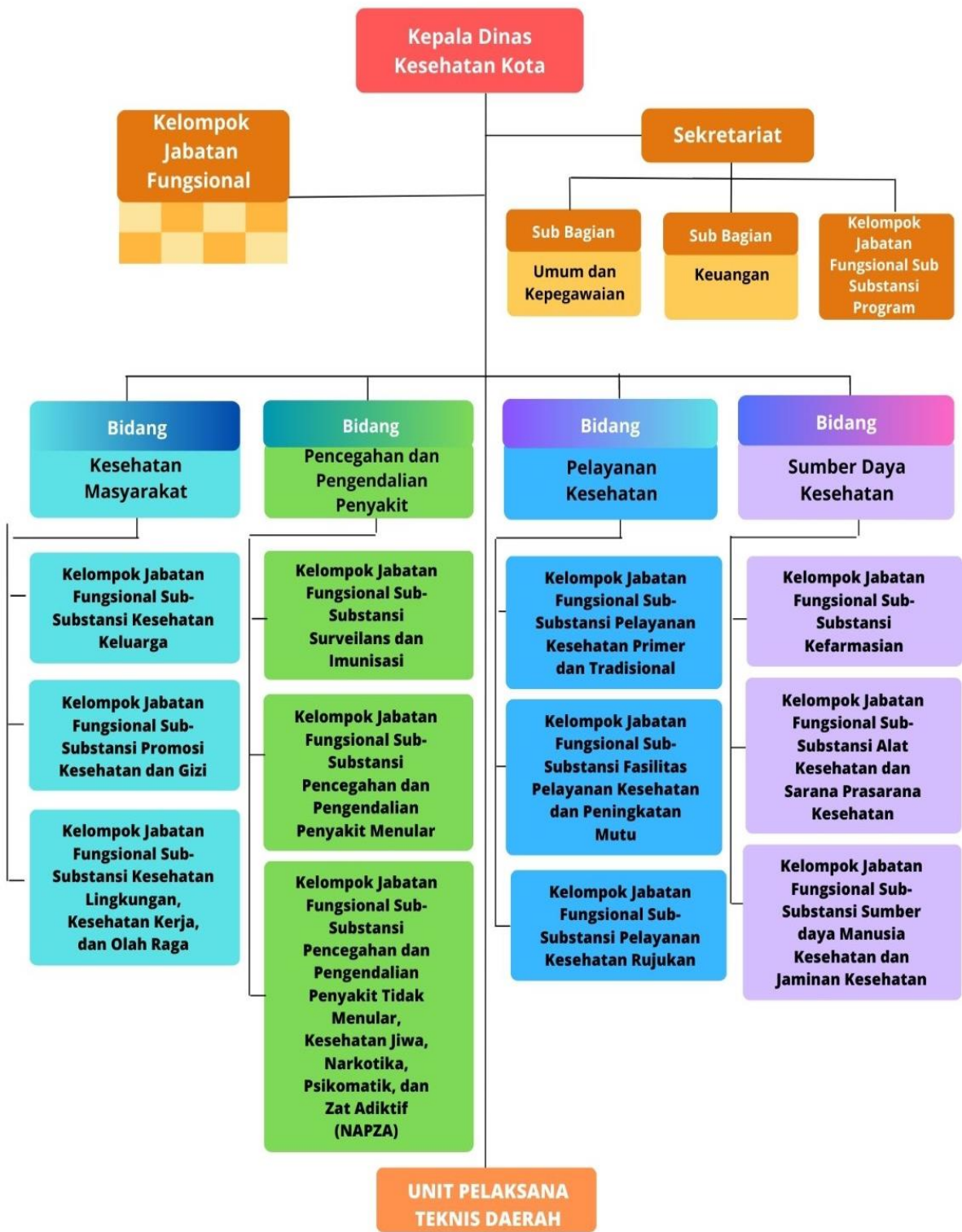
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2022, Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan fungsi dan tugasnya

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Padang adalah sebagai berikut :

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Sumber : Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan

- b. Menyelenggarakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- d. Menyelenggarakan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
- e. Pengguna anggaran dinas
- f. Pengguna barang dinas
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi perumusan kegiatan dinas
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana
- e. melaksanakan koordinasi dan perumusan penyusunan peraturan serta pelaksanaan advokasi
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara atau daerah
- g. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik
- h. mengelola layanan pengaduan masyarakat
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian
- c. melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan
- d. melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan
- e. melakukan pengadaan kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor
- f. melakukan pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian
- g. melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, sarana dan prasarana kantor dan barang habis pakai
- h. melakukan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahan tanggaan lainnya
- i. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut pegawai;

- k. melakukan koordinasi dan melaporkan kehadiran pegawai;
- l. menyusun penerbitan surat keputusan dalam jabatan fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;
- m. mengerjakan fasilitasi usulan pengangkatan, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan atau hukuman, dan pelatihan penjenjangan pegawai;
- n. memproses keperluan dan kebutuhan administrasi kepegawaian dalam hal penataan kinerja pegawai serta pengurusan administrasi angka kredit dan pelayanan lainnya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian umum pada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara dan daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. menyusun dan mengelola keuangan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan tentang keuangan dinas;
- c. menyusun rencana penclapatan dan belanja tidak langsung dinas;
- d. melakukan koordinasi pengadministrasian keuangan dinas terhadap belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, belanja aparatur dan publik;
- e. melakukan pertanggungjawaban pencairan dana;
- f. melakukan verifikasi anggaran pendapatan belanja dinas;

- g. mengerjakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;
- h. melakukan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas; melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset, dan perlengkapan dinas;
- i. melakukan koordinir dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan dan aset;
- j. melakukan pemantauan, pencatatan barang dan pelaksanaan administrasi aset, barang inventaris, kendaraan dinas, rumah dinas serta menyelenggarakan usulan penghapusan aset;
- k. menyusun laporan terkait urusan keuangan, penganggaran, dan aset dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kelompok jabatan fungsional Sub Substansi Program

Kelompok jabatan fungsional Sub Substansi Program dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional Sub Substansi Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub Substansi Program adalah :

- a. menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk program dan kegiatan dinas;
- b. melakukan penyusunan program dengan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melakukan penghimpunan dan fasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. melakukan penghimpunan, menganalisa, dan menyusun laporan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- e. melakukan pengelolaan sistim informasi kesehatan;

- f.melakukan pengelolaan informasi lintas program dan lintas sektor;
- g. menyusun kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data;
- h. melakukan pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta hubungan masyarakat;
- i.melakukan rekapitulasi laporan pencapaian program dan kegiatan dinas;
- j.melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- k. menyusun laporan sub bagian program dan informasi untuk disampaikan kepada atasan; dan
- l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan gizi,

- kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat kota, kelompok masyarakat organisasi, swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi kesehatan keluarga

Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi kesehatan keluarga dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi kesehatan keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan keluarga adalah :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi, lansia dan keluarga berencana;

- b. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi, lansia dan keluarga berencana;
- c. melakukan pembinaan tenaga kesehatan penolong persalinan;
- d. melakukan audit maternal dan perinatal;
- e. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga;
- g. melakukan upaya kesehatan sekolah di tingkat sekolah dasar dan sederajat, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat;
- h. melakukan bimbingan teknis ke puskesmas, klinik, bidan praktek mandiri (BPM) dan rumah sakit; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi Promosi Kesehatan dan Gizi

Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi Promosi Kesehatan dan Gizi dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi Promosi Kesehatan dan Gizi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan gizi.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan gizi masyarakat serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi,

dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;

- b. melakukan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- c. melakukan pengelolaan produksi komunikasi publik tentang program kesehatan melalui peliputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi program kesehatan;
- d. memantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan gizi masyarakat;
- e. membina dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Polindes, Pos Kesehatan Kelurahan, Pos Pembinaan Terpadu, Pos Lanjut Usia, Tanaman Obat Keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren, dan Saka Bhakti Husada;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi Kesehatan dan gizi masyarakat
- g. melakukan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaringannya, serta posyandu;
- h. melakukan pemantauan pendistribusian vitamin A kepada balita, ibu nifas dan masalah gizi lainnya;
- i. merancang perencanaan dan melaksanakan pemberian makanan tambahan pada kasus kekurangan energi protein dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil;
- j. melakukan pembinaan pemberian ASI eksklusif dan klinik laktasi; dan
- k. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah

C. Kelompok jabatan fungsional Subs-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Kelompok jabatan fungsional Subs-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Kelompok jabatan fungsional Subs-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksana kebijakan penyehatan lingkungan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Subs-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, hygiene, dan sanitasi pangan dan sanitasi tempat umum/tempat pengelolaan makanan;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan survailens, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olah raga;
- c. merancang rencana melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. melakukan penyiapan penyusunan bahan kegiatan dan bimbingan teknis serta supervisi kapasitas kerja pekerja dan institusi;
- e. melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan dan bimbingan teknis supervise kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, okupasi dan survailans kapasitas kerja, lingkungan kerja;
- f. melakukan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyehatan air dan sanitasi dasar penyehatan pangan, dan penyehatan udara dan kawasan, serta pengawasan limbah dan radiasi;

- g. melakukan pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
- h. melakukan kegiatan kesehatan keolahragaan masyarakat;
- i. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air, Perusahaan Daerah Air Minum, depot air minum isi ulang, dan sumber air lainnya serta air badan air, kolam renang, pemandian umum;
- j. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Kader Kesehatan Lingkungan;
- k. melakukan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan atau penyediaan makanan;
- l. melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi pada lingkungan pemukiman, pembinaan kota sehat dan pengawasan sampah medis;
- m. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program yang menyangkut analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- n. memproses penerbitan rekomendasi laik sehat bagi sarana tempat umum, tempat pengelolaan makanan, dan pestisida;
- o. melakukan pengelolaan laboratorium air pada dinas;
- p. menyusun laporan tahunan kesehatan lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi surveilen dan imunisasi, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan narkotika psikosomatik zat adiktif;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- c. melakukan penyiapan bahan Bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- d. melakukan pertemuan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- e. melakukan koordinasi dalam pengendalian wabah, bencana, imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Surveilans dan Imunisasi

Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh sub koordinator yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Surveilans Imunisasi, Bencana.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Surveilans dan Imunisasi adalah :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- b. melakukan penyiapan, pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, dan imunisasi;
- c. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, imunisasi;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
- f. merancang rencana kegiatan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana;
- g. melakukan penyelidikan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit yang berpotensi wabah serta keracunan;
- h. melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon jamaah haji;
- i. melakukan penghimpunan dan menganalisa data surveilans, kejadian luar biasa, wabah dan bencana dari rumah sakit dan puskesmas;

- j. melakukan koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian menular langsung, penyakit bersumber binatang dan vektor;
- c. merancang rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

- e. merancang rencana kebutuhan obat dan sarana program penyakit menular;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya;
- g. Melakukan monitoring dan bimbingan teknis program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- i. menyusun laporan program penyakit menular; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Narkotika, Psikosomatik, dan Zat Aditif

Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kesehatan Jiwa, Narkotika, Psikosomatik, dan Zat Adiktif dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Narkotika, Psikosomatik, dan Zat Adiktif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA, dan kesehatan lanjut usia.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Subs-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Narkotika, Psikosomatik, dan Zat Adiktif adalah :

- a. melakukan penyiapan bahan kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- c. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- e. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- f. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian masalah

kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisioanal, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- b. merumuskan pelaksanaan dan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- c. merumuskan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan perencanaan program dan kegiatan dinas.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional adalah :

- a. menyusun kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, perkesmas, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- b. merancang pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, perkesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- c. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya perawatan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, perkesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- d. memproses pemberian rekomendasi izin klinik, pengobatan tradisional, dan atau pelayanan kesehatan primer lainnya;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional

- meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, perkesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- f. mengerjakan laporan pelayanan kesehatan primer dan tradisional melalui sistim informasi kesehatan yang berlaku;
 - g. merancang pelaksanaan bahan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integritas;
 - h. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integritas;
 - i. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - j. melakukan pembinaan dalam perencanaan program pelayanan kesehatan primer dan tradisional melalui rencana strategis dan rencana kerja Puskesmas;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pelayanan primer dan tradisional tingkat pertama melalui lokakarya mini, laporan bulanan, dan laporan tahunan;
 - l. mengerjakan dan mengkoordinir kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, baik dalam kegiatan pemerintah maupun swasta;
 - m. melakukan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Terpadu di Rumah Sakit Rujukan.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah :

- a. menyusun bahan pelaksana kebijakan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- c. melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- d. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- e. memproses rekomendasi izin rumah sakit kelas C, D;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu adalah:

- a.melakukan penyiapan bahan pelaksana kebijakan dibidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- c. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- e. melakukan perencanaan kebutuhan sarana prasarana dan peralatan pada pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- f. merancang rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi sarana pelayanan kesehatan;
- g. melakukan pemantauan dan pembinaan mutu secara terpadu bersama tim terkait;
- h. melakukan pengumpulan data dan analisa data yang berhubungan dengan kegiatan seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan;
- j. melakukan kegiatan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan berprestasi;
- k. melakukan registrasi dan rekomendasi sarana kesehatan yang meliputi puskesmas, rumah sakit kelas C dan kelas D, praktek berkelompok, klinik umum dan spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga atau dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, optikal, tukang gigi, laboratorium kesehatan, pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Kefarmasian

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Kefarmasian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Kefarmasian adalah:

- a. melakukan perencanaan, pengadaan, pengawasan obat;
- b. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan obat di puskesmas dan puskesmas pembantu;
- c. melakukan perencanaan dan pendistribusian obat;

- d.melakukan pemeriksaan, monitoring obat pada puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos kesehatan keliling;
- e.melakukan pengelolaan kegiatan laik sehat pangan, Industri Pangan Rumah Tangga dan rekomendasi apotik, toko obat, dan perbekalan kesehatan;
- f. melakukan pengawasan dan registrasi obat, makanan dan minuman produksi rumah tangga, apotik, toko obat;
- g.melakukan pembinaan, menitoring, pengawasan, dan evaluasi, penanggung jawab peredaran obat atau sediaan farmasi, napza, kosmetik, obat tradisional di puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, toko obat, dan toko obat tradisional;
- h.melakukan pembinaan, menitoring, pengawasan, dan evaluasi, terhadap pengelola toko makanan, minuman, dan sarana produksi industri rumah tangga;
- i.melakukan pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi di lapangan;
- j.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian untuk disampaikan kepada atasan; dan
- k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan

teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan adalah:

- a. menyusun kebijakan teknis tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan;
- b. merancang rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pendayagunaan sumber daya tenaga kesehatan;
- c. menyusun kebijakan teknis dibidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan;
- d. merancang rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan registrasi tenaga kesehatan serta melakukan penerbitan registrasi dan praktek tenaga kesehatan;
- e. merancang rencana program jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pengelolaan jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan masyarakat;
- g. melakukan pengelolaan jaminan kesehatan daerah dan atau jaminan kesehatan lainnya;
- h. melakukan penghimpunan data kepersertaan dan pembiayaan jaminan kesehatan nasional;
- i. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- j. melakukan sosialisasi jaminan kesehatan;
- k. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada institusi penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber daya tenaga kesehatan;
- l. melakukan pengelolaan izin belajar dan tugas belajar tenaga kesehatan;
- m. melakukan koordinasi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya tenaga kesehatan;

- n.melakukan koordinasi pendayagunaan sumber daya tenaga kesehatan, pendidikan, dan pelatihan serta melakukan pencatatan dan pelaporan;
- o.menyusun laporan registrasi tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan;
- p.melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan; dan
- q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Sarana, Prasarana Kesehatan

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional, perencanaan dan pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana kesehatan dan bimbingan teknis untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Penjabaran tugas Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan adalah:

- a. melakukan perencanaan, pengadaan dan rehabilitasi alat kesehatan dan sarana prasarana kantor kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan keliling;
- b.melakukan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian alat kesehatan;
- c. melakukan pemeriksaan, monitoring dan pengawasan terhadap alat kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Keliling;

- d. Melakukan inventarisasi, monitoring dan pengawasan terhadap kerusakan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Keliling;
- e. melakukan perencanaan dan pengadaan alat transportasi roda dua dan roda empat berupa Ambulance atau Puskesmas Keliling sesuai dengan kebutuhan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi alat kesehatan dan sarana prasarana kesehatan untuk disampaikan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Dinas Kesehatan Kota Padang Mempunyai 25 UPTD yang terdiri dari 24 Puskesmas, dan 1 Instalasi Farmasi Kota (IFK). Selain UPTD juga terdapat Public Safety Center (PSC 119) yang merupakan suatu pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan korban atau pasien gawat darurat, pemandu pertolongan pertama, mengevakuasi korban atau pasien gawat darurat serta mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan yang dituju. Jadi PSC merupakan pertolongan pra rujukan, dimana ketenagaan di PSC terdiri dari koordinator, tenaga kesehatan, operator call center dan tenaga lain.

Dalam pelaksanaannya, operasional PSC 119 Kota Padang masih melibatkan tenaga Puskesmas yang ditugaskan untuk melaksanakan piket di PSC yaitu tenaga dokter dan paramedis. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan

kompetensi petugas. Dengan kejadian lakalantas maupun emergency sehari-hari dan demi kelancaran pelayanan diperlukan PSC 119 dalam bentuk Unit Pelaksanaan teknis maka dibentuk “Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 Kota Padang.

Sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelumnya Noor YR.03.01/III/2132/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center (PSC 119) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta Nomor YR.03.01/III/1624/2019 tanggal 11 April 2019 tentang monitoring dan Evaluasi Pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota, berfokus pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa PSC 119 sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kegawatdaruratan medik sehari-hari yang dilaksanakan selama 7 x seminggu dan 24 jam secara terus menerus dengan pembagian waktu kerja. Dalam hal memudahkan operasional PSC 119, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis di Daerah sesuai aturan yang berlaku.

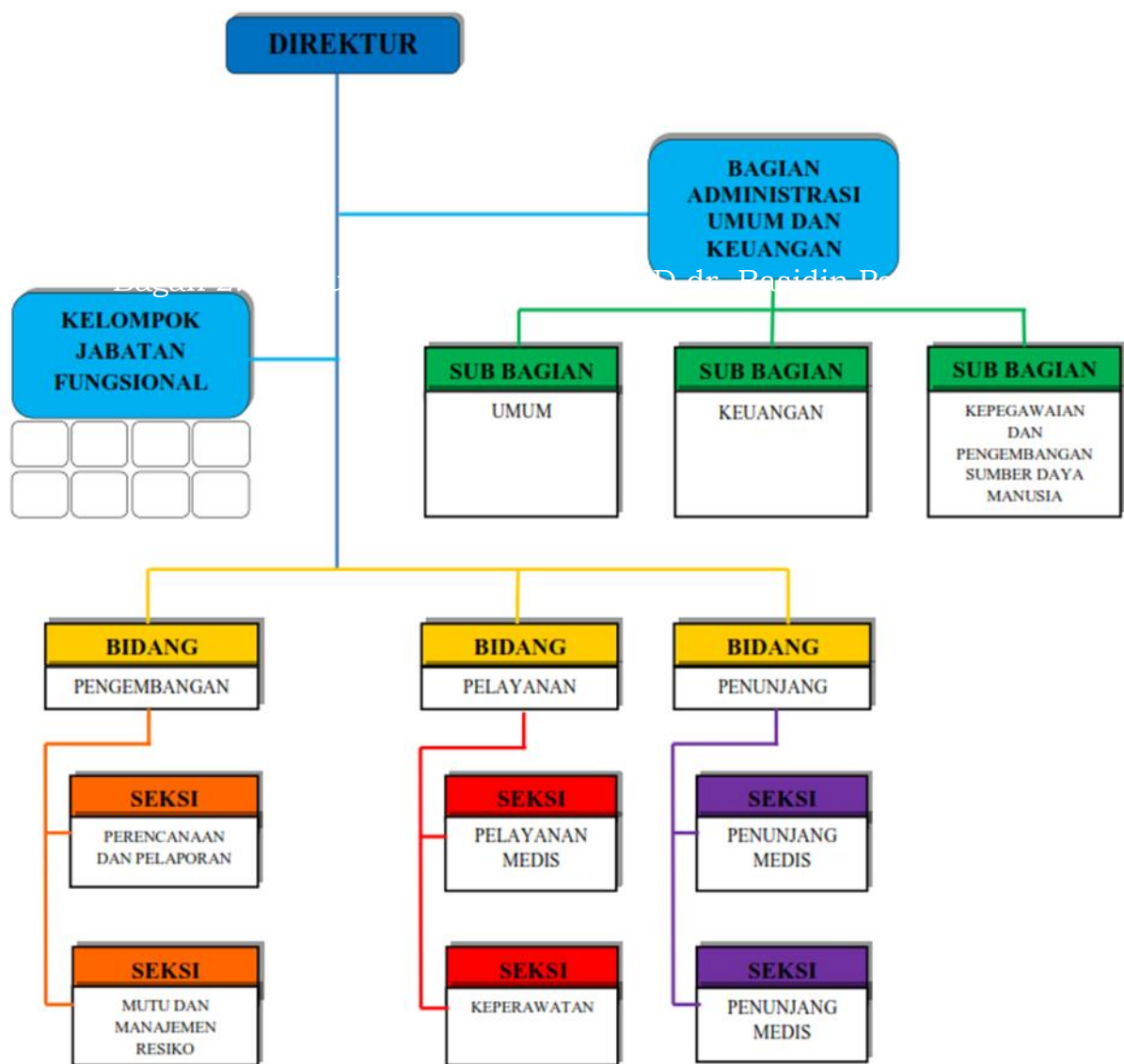
RSUD dr Rasidin Padang

Untuk melaksanakan tugas RSUD dr. Rasidin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis.
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pelatihan sumber daya aparatur RSUD dr. Rasidin
- f. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan RSUD dr. Rasidin
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya

Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin Padang adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2 Struktur Organisasi RSUD dr. Raidin Padang



Sumber : RSUD dr. Rasidin

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelayanan kesehatan/medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD dr.Rasidin sesuai dengan kewenangan ;
- b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr.Rasidin ;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi ;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi atau pihak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin;
- e. Pengendalian proses pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin sesuai dengan standar operasional prosedur untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- f. Pembinaan aparatur kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan aparatur kesehatan yang professional;
- g. Mengarahkan porose pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin;
- h. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. Pemimpin badan layanan umum daerah;
- k. Kuasa pengguna anggaran
- l. Kuasa pengguna barang
- m. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- n. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.

2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin Padang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, peralatan rumah tangga, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan humas, dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan asset;
- c. Mengkoordinasikan, pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga perlengkapan dan asset perundang-undangan dan ketertiban;
- d. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan asset, perundang-undangan dan ketertiban;
- e. Merumuskan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran badan layanan umum daerah
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait;
- g. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pendidikan klinik,
- h. pendidikan dan pelatihan profesi, serta pelatihan mandiri;
- i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bidang pendidikan dan penelitian;
- j. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan intitusi lain;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- l. Melaksanakan pengkajian kebutuhan pelatihan;
- m. Menyusun biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman teknis penelitian dan pengembangan;

- q. Melaksanakan perencanaan anggaran pada bidangnya;
- r. Melaksanakan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- s. Melaksanakan akuntansi keuangan dan asset;
- t. Melaksanakan informasi dan promosi RSUD dr. Rasidin; dan
- u. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin di Sub Bagian Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian umum mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventaris dan mengolah data asset dan informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan pada subag umum;
- d. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, kearsipan dan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun rencana kebutuhan perbekalan perkantoran, pengelolaan asset RSUD dr.Rasidin;
- f. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas, pertemuan, acara rutin, keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
- g. Melaksanakan inventarisasi seluruh asset, penghapusan, penyusutan, dan pemeliharaan bahan penyusunan kebijakan akuntansi asset rumah sakit;

- h. Menyusun dokumen rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. Membuat usulan asuransi barang milik daerah;
- j. Membuat laporan mutasi asset dan mengentri laporan asset denganaplikasi;
- k. Menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan peraturan administrasi;
- l. Menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan peraturan administrasi;
- m. Menyusun pedoman teknis pengamanan keselamatan kerja dan ketertiban lingkungan RSUD dr. Rasidin;
- n. Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengguna jasa RSUD dr. Rasidin;
- o. Melaksanakan informasi dan promosi RSUD dr. Rasidin;
- p. Mengolah, menghimpun dan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- q. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan membantu Kepala bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Sub Bagian Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
- b. Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan;
- c. Melaksanakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran;

- d. Melaksanakan penyetoran dan penerimaan pendapatan ke kas daerah
- e. Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan atau anggaran RSUD dr. Rasidin;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan penerimaan RSUD dr.Rasidin;
- g. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan RSUD dr. Rasidin;
- h. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
- j. Melakukan pengkajian terhadap pola tarif RSUD dr.Rasidin, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
- k. Meneliti, memverifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran; dan
- m. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membantu Kepala Bagian Administasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis perencanaan program kegiatan penyusunan formasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar kebutuhan pegawai per jenis kepegawaian, per unit kerja dan per bidang tugas (rasio kompetensi, kapasitas), menyiapkan bahan analisis kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan struktural, penyusunan uraian pekerjaan dan persyaratan pekerjaan di RSUD dr. Rasidin;
- d. Menyiapkan bahan rencana rekrutmen karyawan dan penempatan sesuai formasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar penggajian dan system remunerasi kepegawaian;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta kompetensi dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyusun sistem informasi kepegawaian RSUD dr. Rasidin;
- h. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan formasi kepegawaian;
- i. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi formasi kepegawaian;
- j. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan pembinaan kepegawaian;
- k. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, angka kredit jabatan profesi, kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja, cuti, pindah, mutasi dan disiplin kepegawaian;
- l. Menyusun daftar urutan kepangkatan dan daftar nama pegawai per jenis kepegawaian per unit kerja;
- m. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional

prosedur, dan standar pelayanan minimal, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

- n. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- o. Menghimpun, mengolah dan menyusun database dan sistem informasi kepegawaian;
- p. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan pengambilan administrasi perjalanan dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pengembangan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- b. Merumuskan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin;
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan;
- e. Menyusun program dan kegiatan perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin ;

- g. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
- h. Pengkoordinasian, pengembangan kegiatan perencanaan program anggaran dan evaluasi serta pelaporan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan program, anggaran;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu dan manajemen resiko;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. Merumuskan, mengolah dan membuat kerangka acuan kegiatan pengembangan RSUD dr. rasidin;
- m. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- n. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- o. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

A. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Seksi Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan, penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan RSUD dr. Rasidin;
- b. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan RSUD dr. Rasidin;
- c. Menghimpun dan mengkaji data untuk kunjungan di RSUD dr. Rasidin untuk menyusun program dan anggaran;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi rencana strategis RSUD dr. Rasidin;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- g. Menyiapkan bahan atau dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan RSUD dr. Rasidin;
- h. Menyusun database informasi rumah sakit dan sistim informasi RSUD dr. Rasidin;
- i. Menyiapkan kebutuhan database untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran;
- j. Menyiapkan bahan atau dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan RSUD dr. Rasidin;
- k. Menyusun dan merevisi dokumen rencana strategis RSUD dr. Rasidin;
- l. Menyusun dokumen rencana kerja tahunan dan perubahan;
- m. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan perubahan;
- n. Menyusun dokumen pra-rencana keuangan dan anggaran dan pra-rencana keuangan dan anggaran perubahan RSUD dr. Rasidin
- o. Menyusun data padang dalam angka dan data sistem informasi pembangunan daerah;
- p. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan RSUD dr. Rasidin;
- q. Menyiapkan dan menyusun pedoman teknis pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan profil dan pemetaan data RSUD dr. Rasidin, mengumpulkan dan mengolah data rencana umum pengadaan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan;
- s. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi hasil pengembangan RSUD dr. Rasidin; dan
- u. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Seksi Mutu dan Manajemen Rasiko

Seksi mutu dan manajemen resiko dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Mutu dan Manajemen Resiko membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Mutu dan Manajemen Resiko mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi mutu dan manajemen resiko;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin;
- c. Pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pengembangan mutu dan manajemen resiko;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengawasan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan pedoman petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan teknis, tata laksana mutu dan manajemen resiko;
- e. Menyiapkan penyelenggaraan dan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin; dan
- f. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin di Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan;

- c. Menyusun program dan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di pelayanan medis dan keperawatan;
- f. Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan pengembangan medis dan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD dr. Rasidin;
- g. Menyusun kebijakan pengembangan karir tenaga medis dan keperawatan;
- h. Merumuskan kebijakan etika profesi medis dan keperawatan;
- i. Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi tenaga medis dan keperawatan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan medis keperawatan;
- k. Melaksanakan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- n. Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan medis dan keperawatan;
- o. Merumuskan program kerja pelayanan dibidang kesehatan sesuai standar opsional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
- p. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

A. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pelayanan Medis

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pelayanan Medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pelayanan, kode etik medis dan sumber daya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur;
- d. Melaksanakan tindak lanjut hasil Supervise;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan mutu pelayanan;
- f. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia medis dalam memberikan pelayanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
- g. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan medis yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat;
- h. Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan medis;
- i. Melaksanakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan pelayanan medis berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD dr. Rasidin;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
- l. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- m. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- n. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Mengawasi pelaksanaan etika profesi medis; dan
- q. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Keperawatan membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keperawatan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang asuhan etika dan sumber daya manusia perawat dan bidan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur;
- d. Melaksanakan tindak lanjut supervise;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tindakan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan mutu pelayanan;
- f. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Perawat atau Bidan dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap;
- g. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kebidanan yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat;
- h. Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- i. Melaksnakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebidanan untuk kebutuhan RSUD dr. Rasidin;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- l. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- m. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan;
- n. Pemantauan dan evalusi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. BIDANG PENUNJANG

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Penunjang membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Penunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan penunjang medis dan non medis;
- b. Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- d. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- e. Pengelolaan yang terkait dengan instalasi atau unit penunjang medis dan non medis;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis;

- g. Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan standar penunjang medis dan non medis;
- i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di bidang penunjang medis dan non medis;
- j. Mengelola data dan bahan penyelenggaraan penunjang medis dan non medis;
- k. Pengkoordinasian pengembangan kejadian penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum;
- l. Menyusun rencana anggaran, program dan tujuan kerja bidang;
- m. Pengkoordinasian, perencanaan, pengembangan kebutuhan perbekalan dan peralatan;
- n. Merumuskan kebijakan etika profesi di bidang penunjang;
- o. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang medis dan non medis; dan
- p. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

A. Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala seksi penunjang medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di Bidang Penunjang Medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di Bidang Penunjang Medis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang medis;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang medis;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang medis;
- f. Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang medis;
- g. Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang medis;
- h. Mengidentifikasi permasalahan penunjang medis sesuai standar operasional prosedur;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang medis sesuai dengan standar operasional prosedur;
- j. Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang medis;
- k. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang medis;
- l. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang medis;
- m. Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang medis; dan
- n. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

B. Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Penunjang Non Medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebaian tugas Rumah Sakit di Bidang Penunjang Non Medis

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dikamsud, Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penunjang non medis sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang non medis;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang non medis;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang non medis;
- f. Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang non medis yang terkait dengan pelayanan pada pasien;
- g. Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang non medis;
- h. Mengidentifikasi permasalahan penunjang non medis sesuai standar operasional prosedur;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang non medis sesuai dengan standar operasional prosedur;
- j. Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang non medis;
- k. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang non medis;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang non medis;
- n. Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang non medis; dan
- o. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis RSUD dr. Rasidin sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Kesehatan

SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Dalam pelaksanaan upaya kesehatan, dibutuhkan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2023, tenaga kesehatan di kelompokkan ke dalam 12 kelompok, sebagian besar merupakan jabatan fungsional. Tahun 2024, Dinas Kesehatan memiliki 22 jenis jabatan fungsional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin Kondisi Bulan Desember 2024

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan			Kekurangan
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
A	Jabatan Sruktural					
1	JPT Pratama	1	0	1	1	0
2	Administrator	5	1	2	3	-2
3	Pengawas	28	2	25	27	-1
B	Jabatan Fungsional					
1	Administrator Kesehatan	96	4	42	46	-50
2	Apoteker	37	2	17	19	-18
3	Asisten Apoteker	70		41	41	-29
4	Bidan	543		414	414	-129
5	Dokter	153	4	93	97	-56
6	Dokter Gigi	63	3	51	54	-9
7	Entomolog Kesehatan	1		1	1	0
8	Epidemiolog Kesehatan	28		7	7	-21
9	Fisioterapis	1	0	0	0	-1

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan			Kekurangan
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
10	Nutrisionis	79	2	48	50	-29
11	Pembimbing Kesehatan Kerja	11		1	1	-10
12	Perawat	375	13	237	250	-125
13	Perekam Medis	80	5	54	59	-21
14	Pranata laboratorium kesehatan	64	2	42	44	-20
15	Refraksi Optisian	11		3	3	-8
16	Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	58	2	8	10	-48
17	Tenaga Danitasi Lingkungan	68	5	31	36	-32
18	Tenaga Gigi dan Mulut	43		24	24	-19
19	Teknisi Elektromedis	2		1	1	-1
20	Arsiparis	8	1	4	5	-3
21	Perencana	2	0	1	1	-1
22	Pranata komputer	6	2	0	2	-4
C	Jabatan Pelaksana	365	11	90	101	-264
Jumlah		2198	59	1238	1297	-901

Sumber : Dinas Kesehatan

Pada tabel 2.1 terlihat bahwa dari 22 jabatan fungsional, pada umumnya belum memenuhi kebutuhan hanya 1 jabatan fungsional yang sudah terpenuhi yaitu entomolog Kesehatan. Dari tabel terlihat kekurangan tenaga sebanyak 901 orang dan jabatan karir juga dihitung. Kekurangan jumlah tenaga yang harus diisi sebenarnya sebanyak 901 orang.

Tabel 2. 2 Jumlah ASN Dinas Kesehatan berdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi Bulan Desember 2024

Tingkat pangkat/ golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	0	12	12
Pembina Tk.I (IV/b)	1	38	39
Pembina (IV/a)	3	39	42
Penata Tk.I (III/d)	8	322	330
Penata (III/c)	5	153	158
Penata Muda Tk.I (III/b)	6	159	165
Penata Muda (III/a)	4	96	100
Pengatur Tk.I (II/d)	13	135	148
Pengatur (II/c)	1	59	60
PPPK (X)	1	28	29
PPPK (IX)	3	25	28
PPPK (VII)	14	172	186
Jumlah	59	1238	1297

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan berada pada pangkat Pengatur ke atas. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2023 pasal 210 yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum diploma tiga, kecuali tenaga medis. ASN PPPK pada tahun 2024 bertambah sebanyak 18 orang untuk mengisi jabatan fungsional yang masih dibutuhkan.

RSUD dr Rasidin

Berdasarkan data pegawai RSUD dr Rasidin tahun 2024 mempunyai jumlah tenaga PNS yang terdiri dari unsur struktural, tenaga administrasi, dan kelompok jabatan fungsional tertentu (dokter, perawat, bidan, penunjang klinik dan penunjang non klinik) serta tenaga Non PNS yang terdiri dari tenaga kontrak pemko, tenaga kontrak SKPD, tenaga vounteeter, tenaga sukarela dan kontrak BLUD dengan jumlah 569 orang. Jumlah tenaga di RSUD dr Rasidin pada tahun 2024 terdapat jenis ketenagaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebagian diangkat dari pegawai honorer di RSUD dan juga dari luar/umum. Adapun rincian ketenagaan di RSUD dr Rasidin tahun 2024 dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS RSUD dr Rasidin Padang Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	Kontrak Perwako	Kontrak SKPD	BLUD	Referal	PPPK	Total
1	Direktur	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
2	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang Pengembangan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
5	Kepala Bidang Penunjang	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
6	Kepala Subbagian Umum	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
7	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
8	Kepala Subbagian Keuangan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
9	Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1

No	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	Kontrak Perwako	Kontrak SKPD	BLUD	Referral	PPPK	Total
10	Kepala Seksi Mutu dan Manajemen Resiko	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
11	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
12	Kepala Seksi Keperawatan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
13	Kepala Seksi Penunjang Medis	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
14	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
15	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Nakes	4	0	0	0	0	0	4
16	Dokter Spesialis Saraf	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
17	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Nakes	5	0	0	0	0	0	5
18	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
19	Dokter Spesialis Mata	Nakes	3	0	0	0	0	0	3
20	Dokter Spesialis THT-KL	Nakes	3	0	0	0	0	0	3
21	Dokter Spesialis Paru	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
22	Dokter Spesialis Anak	Nakes	3	0	0	0	0	0	3
23	Dokter Spesialis Obgyn	Nakes	3	0	0	0	0	0	3
24	Dokter Spesialis Bedah	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
25	Dokter Spesialis Bedah Onkologi	Nakes	1	0	0	0	0	0	1
26	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
27	Dokter Spesialis Anestesi	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
28	Dokter Spesialis Orthopedi	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
29	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Nakes	1	0	0	0	0	0	1
30	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Nakes	1	0	0	0	1	0	2
31	Dokter Spesialis Bedah Anak	Nakes	1	0	0	0	0	0	1
32	Dokter Spesialis Radiologi	Nakes	1	0	0	0	1	0	2
33	Dokter Spesialis Rehab Medik	Nakes	0	0	0	0	1	0	1
34	Dokter Spesialis Jiwa	Nakes	0	0	0	0	1	0	1
35	Dokter Umum	Nakes	15	0	0	0	0	9	24
36	Dokter Gigi	Nakes	5	0	0	0	0	0	5
37	Perawat	Nakes	110	0	0	0	0	70	180
38	Bidan	Nakes	27	0	1	5	0	22	55
39	Perawat (Asisten Penata Anestesi)	Nakes	0	0	0	0	0	1	1
40	Perawat Gigi	Nakes	3	0	0	0	0	0	3
41	Refraksiptisi	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
42	Apoteker	Nakes	8	0	0	0	0	0	8
43	Asisten Apoteker	Nakes	17	0	0	0	0	6	23
44	Perekam Medik	Nakes	14	0	0	0	0	6	20
45	Sanitarian	Nakes	5	0	0	0	0	3	8
46	Nutrisionis	Nakes	8	0	0	0	0	2	10
47	Fisioterapis	Nakes	4	0	0	0	0	0	4

No	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	Kontrak Perwako	Kontrak SKPD	BLUD	Referral	PPPK	Total
48	Radiografer	Nakes	10	0	0	1	0	4	15
49	Terapi Wicara	Nakes	0	0	0	0	0	1	1
50	Teknisi Elektromedis	Nakes	6	0	0	0	0	0	6
51	Teknisi Transfusi Darah	Nakes	2	0	0	0	0	0	2
52	Pranata Labkes	Nakes	11	0	0	0	0	8	19
53	Administrator Kesehatan	Nakes	3	0	0	0	0	4	7
54	Epidemiolog Kesehatan	Nakes	1	0	0	0	0	0	1
55	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nakes	3	0	0	0	0	0	3
56	Pembimbing Kesehatan Kerja	Nakes	1	0	0	0	0	1	2
57	Fisikawan Medis	Nakes	0	0	0	0	1	0	1
58	Pranata Komputer	Non Nakes	1	0	1	0	0	1	3
59	Pranata Hubungan Masyarakat	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
60	Pranata Jamuan	Non Nakes	1	1	3	9	0	0	14
61	Arsiparis	Non Nakes	2	0	0	0	0	0	2
62	Teknisi Peralatan dan Mesin	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
63	Teknisi Litrik dan Jaringan	Non Nakes	1	0	0	2	0	0	3
64	Analisis Kepegawaian	Non Nakes	0	0	1	0	0	0	1
65	Penyusun Kebutuhan Inventaris	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
66	Bendahara Pengeluaran	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
67	Bendahara Penerimaan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
68	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Non Nakes	2	0	0	0	0	0	2
69	Pembantu Bendahara Penerimaan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
70	Bendahara BLUD	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
71	Pengelola Keuangan	Non Nakes	0	0	0	0	0	0	0
72	Pengolah Data Pelayanan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
73	Pengolah Data Penunjang	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
74	Pengolah Data Program	Non Nakes	0	0	1	0	0	0	1
75	Tenaga IT	Non Nakes	0	0	0	0	0	0	0
76	Pemulasaran Jenazah	Non Nakes	1	0	0	2	0	0	3
77	Pengolah Data	Non Nakes	2	0	0	0	0	0	2
78	Penyusun Kegiatan dan Anggaran	Non Nakes	2	0	0	0	0	0	2
79	Penyusun Laporan Keuangan	Non Nakes	1	0	0	0	0	0	1
80	Pengadministrasian Umum	Non Nakes	2	0	11	11	0	0	24
81	Pramu bakti	Non Nakes	0	0	2	18	0	0	20
82	Pengemudi ambulance	Non Nakes	0	1	1	2	0	0	4
83	Pengemudi Operasional	Non Nakes	0	0	0	3	0	0	3

No	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	Kontrak Perwako	Kontrak SKPD	BLUD	Referal	PPPK	Total
84	Pengolah Keuangan	Non Nakes	0	0	4	2	0	0	6
85	Binatu Rumah Sakit	Non Nakes	0	0	5	3	0	0	8
86	Tenaga Kerohanian Muslim	Non Nakes	0	0	0	1	0	0	1
87	Tenaga CSSD	Non Nakes	0	0	0	2	0	0	2
	TOTAL		333	2	30	61	5	138	569

Sumber : RSUD dr. Rasidin

Adapun Sumber Daya Manusia RSUD dr Rasidin Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akhir tahun 2024 jumlah tenaga sebanyak 569 Orang. Dengan jumlah dan jenis ketenagaan yang beragam terutama dokter spesialis yang berjumlah 44 orang RSUD dr Rasidin dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di kota Padang.

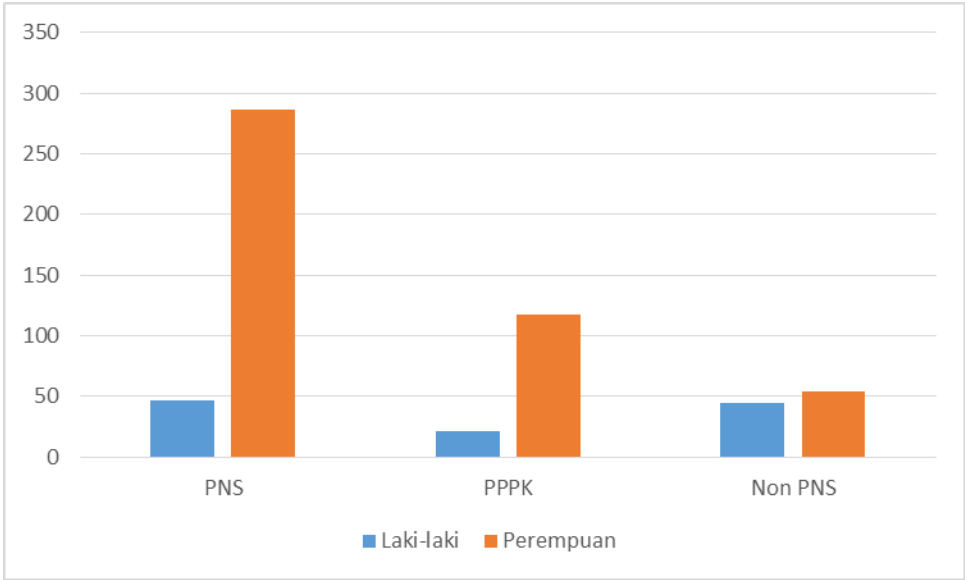
Ketenagaan RSUD dr Rasidin Padang dapat di kelompokkan berdasarkan Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Klasifikasi Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Ketenagaan	Laki-laki	Perempuan	Total
PNS	46	287	333
PPK	21	117	138
Non PNS	44	54	98
Jumlah	111	458	569

Sumber : RSUD dr. Rasidin

Grafik 2. 1 Klasifikasi Ketenagaan berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : RSUD dr. Rasidin

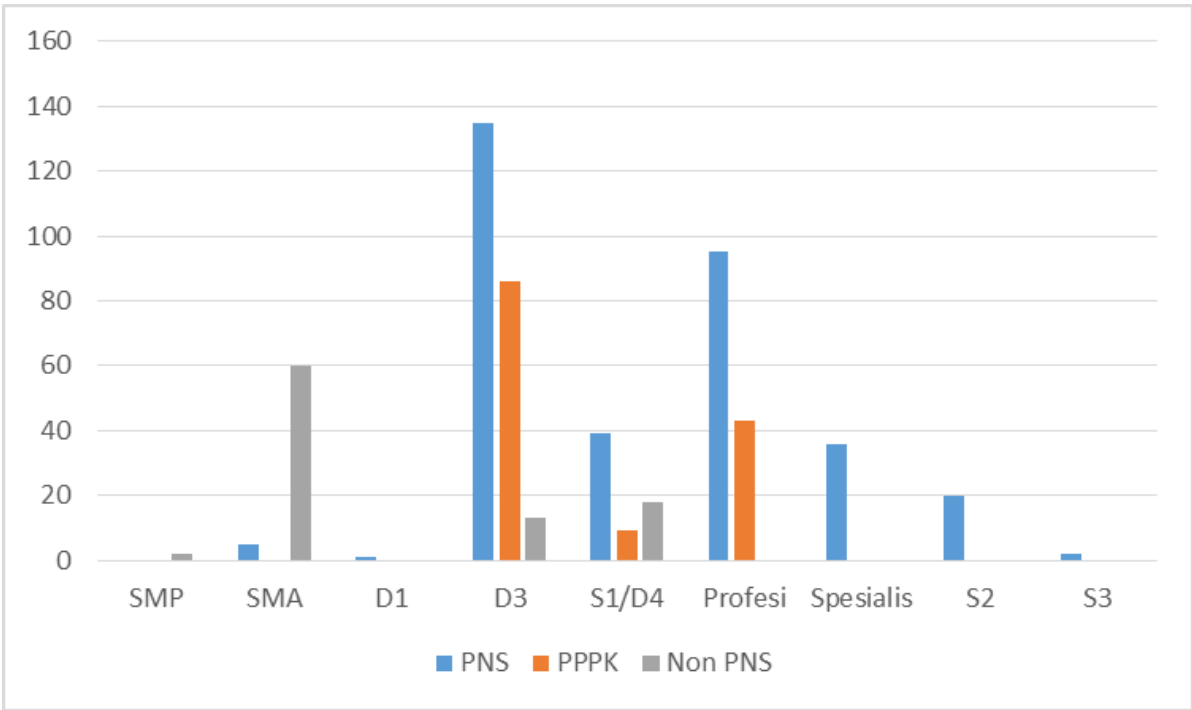
Ketenagaan RSUD dr Rasidin Padang dapat di kelompokkan berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Klasifikasi Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
SMP	0	0	2	2
SMA	5	0	60	65
D1	1	0	0	1
D3	135	86	13	234
S1/D4	39	9	18	66
Profesi	95	43	0	138
Spesialis	36	0	0	36
S2	20	0	0	20
S3	2	0	0	2
Total	333	138	93	564

Sumber : RSUD dr. Rasidin

Grafik 2. 2 Klasifikasi Ketenagaan berdasarkan Pendidikan



Sumber : RSUD dr. Rasidin

2) Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan

Sarana dan Prasarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan tertuang pada kartu inventaris barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; asset tetap lainnya dan ; konstruksi dalam pengerjaan. Berikut ini merupakan daftar peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Padang.

Tabel 2. 6 Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2024

NO	BARANG	JUMLAH
----	--------	--------

NO		BARANG	JUMLAH
1		ALAT PENGANGKAT	
	1	Forklift	1
	2	Alat pengangkat lainnya (dst)	1
2		FEEDER	
	1	Elevator /Lift	2
3		ELECTRIC GENERATING SET	
	1	Portable Generating Set	7
4		POMPA	
	1	Pompa Air	1
5		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	
	1	Mini Bus	11
6		KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	
	1	Pick Up	1
	2	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1
7		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	
	1	Sepeda Motor	77
8		KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	
	1	Mobil Ambulance	43
	2	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1
9		KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	
	1	Gerobak Dorong	12
	2	Baggage Trolly	2
10		KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	
	1	Tandu dorong	28
11		PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	
	1	Mesin Kompresor	4
12		PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	
	1	Transformator	1
	2	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1
13		PERKAKAS BENGKEL SERVICE	
	1	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	53
14		PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	
	1	Cermin Besar	2
15		PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	
	1	Mesin Pompa air PMK	57
16		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	
	1	Alat bengkel tak bermesin lainnya lainnya (dst)	1
17		ALAT UKUR UNIVERSAL	
	1	Multisester Digital	1
	2	PH Meter	6
	3	Digital Multimeter	5
	4	Thermohygrometer	10
	5	Orbital Shaker	4
18		UNIVERSAL TESTER	
	1	Scanner	4
19		ALAT UKUR/PEMBANDING	
	1	Termometer Standar	51
	2	Stopwatch	6
	3	Microscope Multiview	2
20		ALAT UKUR LAIN-LAIN	
	1	Ukuran Tinggi Orang	41
	2	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	10
21		ALAT TIMBANGAN/BIARA	
	1	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	7
	2	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	25
	3	Timbangan Gantung Capasitas 50 Gram	1
	4	Neraca Halus + Lemari	1

NO		BARANG	JUMLAH
22	5	Alat timbangan/biara lainnya (dst)	1
		ANAK TIMBANGAN/BIARA	
23	1	Anak timbangan/biara lainnya	1
		ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	
	1	Rak-Rak Penyimpan	43
	2	Lemari Penyimpan	80
	3	Alat Penyimpanan Hasil pertanian lainnya	34
24		ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	
	1	Alat Pengukur Intensitas Cahaya	1
	2	Alat Laboratorium lainnya	158
		ALAT-ALAT PETERNAKAN	
25	1	Termos A.J	1
		MESIN KETIK	
	1	Mesin Ketik Manual Standard	1
	2	Mesin ketik lainnya	2
27		MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	
	1	mesin hitung/mesin jumlah lainnya	1
28		ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	
	1	Mesin Fotocopy Lainnya	1
29		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	1	Lemari Besi/Metal	116
	2	Lemari Kayu	430
	3	Rak Besi	137
	4	Rak Kayu	216
	5	Filing Cabinet Besi	109
	6	Filing Cabinet Kayu	5
	7	Brandkas	7
	8	Locker	4
	9	Kontainer	4
	10	Lemari Display	4
	11	Lemari Kaca	68
30		ALAT KANTOR LAINNYA	
	1	CCTV	24
	2	Papan Visual/Papan Nama	192
	3	White Board	3
	4	Peta	2
	5	Alat Penghancur Kertas	7
	6	Mesin Absensi	34
	7	Laser Pointer	4
	8	LCD Projector/Infocus	16
	9	Panic Button System, Alarm Indicator	2
	10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	11
	11	Papan Gambar	1
	12	Electric Pressing Machine	1
	13	Kotak Surat	12
	14	Mesin Antrian	8
	15	Papan Nama Instansi	83
	16	Papan Pengumuman	94
	17	Papan Tulis	3
	18	Mesin Fogging	4
	19	Teralis	20
	20	Alat Kantor Lainnya	36
	21	CCTV	6
31		MEUBELAIR	
	1	Meja Kerja Besi/Metal	2
	2	Meja Kerja Kayu	143
	3	Kursi Besi/Metal	182
	4	Kursi Kayu	1
	5	Meja Rapat	256

NO		BARANG	JUMLAH
	6	Tempat Tidur Besi	25
	7	Tempat Tidur Kayu	3
	8	Meja Ketik	2
	9	Meja Resepsionis	63
	10	Meja Tambahan	34
	11	Meja Panjang	22
	12	Meja Periksa Pasien	16
	13	Meja Obat	18
	14	Meja Bayi	4
	15	Meja 1/2 Biro	966
	16	Kasur/Spring Bed	62
	17	Kursi Rapat	3877
	18	Kursi Tamu	56
	19	Kursi Putar	205
	20	Kursi Biasa	6
	21	Bangku Tunggu	637
	22	Kursi Lipat	13
	23	Meja Komputer	44
	24	Partisi	4
	25	Publik Astari	2
	26	Gantungan Jas	1
	27	Sofa	21
	28	Meubeleur lainnya	7
32		ALAT PEMBERSIH	
	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleane	3
	2	Mesin Cuc	13
	3	Alat Pembersih Lainnya	2
33		ALAT PENDINGIN	
	1	Lemari Es	116
	2	A.C. Window	367
	3	A.C. Split	142
	4	Kipas Angin	397
	5	Exhause Fan	10
	6	Cold Room Frezzer	1
34		ALAT DAPUR	
	1	Kompor Listrik	1
	2	Kompor Gas	14
	3	Teko Listrik	1
	4	Rice Cooker	3
	5	Kitchen Set	2
	6	Tabung Gas	11
	7	Treng Air/Tandon Air	5
	8	Rak Piring Alumunium	5
35		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	
	1	Televisi	68
	2	Amplifier	7
	3	Loudspeaker	34
	4	Sound System	52
	5	Wireless	12
	6	Megaphone	1
	7	Unit Power Supply	22
	8	Stabilisator	5
	9	Camera Video	8
	10	Timbangan Orang	10
	11	Timbangan Barang	67
	12	Lambang Garuda Pancasila	1
	13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1
	14	Tiang Bendera	6
	15	Seterika	6

NO		BARANG	JUMLAH
	16	Tangga Aluminium	21
	17	Kaca Hias	1
	18	Dispenser	65
	19	Mimbar/Podium	4
	20	Lambang Instansi	1
	21	Coffee Maker	2
	22	Handy Cam	4
	23	Karpet	7
	24	Alat Pemanas Ruangan	1
	25	DVD Player	2
	26	Tangga	105
	27	Jemuran	3
	28	Bracket Standing Peralatan	6
	29	Tangki Air	1
	30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	225
36		ALAT PEMADAM KEBAKARAN	
	1	Alat Pemadam/Portable	31
	2	Alat Pembantu Kebakaran	1
37		MEJA KERJA PEJABAT	
	1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
	3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15
	4	Meja Kerja Pejabat lain-lain	12
38		MEJA RAPAT PEJABAT	
	1	Meja Tamu Biasa	4
	2	Meja Operator	1
39		KURSI KERJA PEJABAT	
	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1
	2	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
40		KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	
	1	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	2
	2	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	4
41		LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	
	1	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1
	2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	160
42		PERALATAN STUDIO AUDIO	
	1	Audio Amplifier	7
	2	Microphone/Wireless MIC	21
	3	Professional Sound System	5
	4	AVR	10
	5	Digital LED Running Text	1
43		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	
	1	Camera Electronic	3
	2	Rak Peralatan	1
	3	Slide Projector	5
	4	Layar Film/Projector	35
	5	Head Set	2
44		ALAT STUDIO LAINNYA	
	1	Alat Studio Lainnya	1
45		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	
	1	Telephone (PABX)	1
	2	Pesawat Telephone	5
	3	Telephone Mobile	7
	4	Handy Talky (HT)	40
	5	Facsimile	1
	6	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1
46		ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	
	1	Alat komunikasi radio ssb lainnya	1
47		ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	

NO		BARANG	JUMLAH
48	1	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya	4
		ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	
49	1	alat komunikasi radio uhf lainnya	1
		ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	
	1	Wireless Amplifier	20
	2	Slide Projector	2
50		ALAT-ALAT SANDI	
	1	Handphone Encription	5
51		ALAT KOMUNIKASI SATELIT	
	1	Alat komunikasi satelit lainnya	49
52		SUMBER TENAGA	
	1	Genset	20
53		ALAT KEDOKTERAN UMUM	
	1	Sterilisator	112
	2	Minor Surgical Set	3
	3	Diagnostik Set	17
	4	Stetoscope	552
	5	Tensimeter	842
	6	Head Lamp	54
	7	Waskom	8
	8	Timbangan Badan	370
	9	Timbangan Bayi	421
	10	Kocher	27
	11	Metal Chatheeter	2
	12	Sluf Zone	2
	13	Anaromische Pinset	2
	14	Chirurgical Pinset	6
	15	Arteriklem	116
	16	Instrumen Cabinet	115
	17	Gunting Lurus	255
	18	Lemari Steriil	1
	19	Ambubag	5
	20	Tabung O2	19
	21	Bak Instrument	48
	22	Bed Skreen/Sherm	3
	23	Brancard	4
	24	Centrifuge	13
	25	Clinical Thermometer	55
	26	Electro Cardiography	28
	27	Examination Lamp	
	28	Examination Table	111
	29	Flow Meter O2	1
	30	Infusion Pump	3
	31	Korentang	92
	32	Lemari Obat	26
	33	Nebulizer Perimeter	27
	34	Pulse Oximeter	68
	35	Respirator	10
	36	Resusitasi Dewasa	39
	37	Resusitasi Anak	12
	38	Resusitasi Bayi	4
	39	Suction Pump	32
	40	Standar Infus	20
	41	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	5
	42	Tromol Has	3
	43	U S G	15
	44	Utility Trolly	117
	45	UV Sterilizer	1
	46	Vena Sectie Set	12

NO		BARANG	JUMLAH
	47	Senter	8
	48	Alat Kedokteran umum lainnya	1617
	49	Tempat Tidur Pasien	24
	50	Box Bayi	12
54		ALAT KEDOKTERAN GIGI	
	1	Dental Chair	2
	2	Dental Unit	39
	3	Dental X-Ray Unit	1
	4	Dental Hand Instruments Set	7
	5	Operating Chair	2
	6	Clinical Chair	2
	7	Minor Surgical Set	8
	8	Boor Gigi	3
	9	Cryer	42
	10	Exkavator	9
	11	Kaca Mulut/Spigel	38
	12	Knabel Tang	55
	13	Light Curing Unit	9
	14	Pinset Dental	3
	15	Tang Ektrasi	5
	16	Scaller	9
	17	Bein	43
	18	alat kedokteran gigi lainnya	237
55		ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	
	1	Genekologi Tabel	1
	2	Speculum Model Kit	21
	3	Speculum	17
	4	Instrumen Tray	37
	5	alat kedokteran keluarga berencana lainnya	31
56		ALAT KEDOKTERAN BEDAH	
	1	Minor Surgeri Set	66
	2	Mayor Surgeri Set	8
	3	Circumsision Set	2
	4	Cryo Surgery	3
	5	Emergency Trolley	3
	6	Examination Light	1
	7	Heacting Set	6
	8	Retractor	1
	9	Alat kedokteran bedah lainnya	1
57		ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
	1	Perinatologi Set	3
	2	Gynecological Examining Table	25
	3	Scale For New Born Baby	10
	4	Oxygen Regulator	46
	5	Cusco Vaginal Speculum	46
	6	Kresteler Vaginal Speculum	8
	7	Neonatal Resuscitation	1
	8	Baby Incubator	10
	9	Alat Partus Set	9
	10	Aligator	5
	11	Dopler	198
	12	Forceps Neagle/Kieland/Piper	1
	13	Gynecology Examination Set	7
	14	Instrument Trolley, Stainless Steel	7
	15	Lampu Gynaecologi	65
	16	Pengukur Panggul	6
	17	Resusitator Untuk Baby Ambu	7
	18	Nalfolder	2
	19	Ekg Manual	2

NO		BARANG	JUMLAH
	20	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya	211
58		ALAT KEDOKTERAN THT	
	1	Othoscope	6
	2	Laryngoscope	50
	3	Canule Hidung	1
	4	Kaca Larynx	1
	5	Nasal Speculum	1
	6	Otoscope Halogen Lamp	54
	7	Pinset Telinga	1
	8	alat kedokteran tht lainnya	50
59		ALAT KEDOKTERAN MATA	
	1	Ophthalmoscope	19
	2	Trial Lens & Frame Set	8
	3	Medication Trally	21
	4	Snellen Chard	3
	5	alat kedokteran mata lainnya	30
60		ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	
	1	Oxygen Therapy	54
	2	Spirometer	7
	3	Nebulizer	37
	4	Ultra Sono Graphy (USG)	20
	5	Bed Side Monitor Complete	1
	6	Defibrilator	7
	7	Glucometer Complete	12
	8	Pulse Oxymetry	2
	9	Walker Polding	1
61		ALAT KEDOKTERAN ANAK	
	1	Neirbekken Stainless Steel	2
	2	Insrumen Tray Stainless Steel	1
	3	Portable ECG AC/DC 1 Chanel	1
	4	HB Meter	32
	5	Alcohol Cotton Case	4
	6	Meja Periksa 200X90X100 cc	1
	7	Combination Weight And Height Scale	8
	8	Vacinating Instrumen Kit	22
	9	Baby Examination	1
	10	Baby Measuring Device	37
	11	Infant Incubator Mobile	5
	12	Alat kedokteran anak lainnya	1
62		ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	
	1	Bed Pan For Child	3
	2	Bed Pan For Adult 310 mm	1
	3	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	9
	4	Dressing Forceps	107
	5	Stirilizer For Syringe	4
	6	Mayo Hegar'S Holder	1
	7	Paratus (cc)	1
	8	Alat kedokteran poliklinik lainnya	3
63		ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	
	1	Wheel Chair	22
	2	Tiang Keseimbangan	1
64		ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	
	1	Electrocardiograph	1
	2	Oxygen Tank	3
	3	EKG Monitor	5
65		ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	
	1	Sahli Haemometer	6
	2	Blood Presure Meter/Tensimeter	2
	3	Haemachyto Meter	1

NO		BARANG	JUMLAH
	4	Haemotology Analyzer	18
	5	Stethoscope	28
	6	Ben Pan	1
	7	Geneocology Table	6
	8	Syringe	5
66		ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	
	1	Emergency Kit	16
	2	Meja Obat	4
	3	Wheel Chair	25
	4	alat kedokteran gawat darurat lainnya	6
67		ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	
	1	Alat Kedokteran lainnya	479
68		ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	
	1	Compressor	1
	2	Sound Level Meter	1
69		ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	
	1	Sepeda Statis	2
70		ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	
	1	Timbangan Badan	12
	2	Ukur Tinggi Badan	284
	3	Alat Kesehatan Umum lainnya	99
71		ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	
	1	Water Test	3
72		ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	
	1	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya	1
73		ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	
	1	Microskop Binocular	10
74		ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	
	1	Thermohygrometer	12
75		ALAT LABORATORIUM UMUM	
	1	Centrifuge	6
	2	Water Bath	1
	3	Incubator	8
	4	Mortar	1
	5	Oven	11
	6	Compressor Unit	1
	7	Penagas	108
	8	Autoclave	22
	9	Blender	7
	10	Lampu Spritus	1
	11	PH Meter	2
	12	Flour Photometer	2
	13	Refrigerator	32
	14	Tripod	1
	15	Ionisator	1
	16	alat laboratorium umum lainnya	40
76		ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	
	1	Autocleve	2
	2	Stabilizer	5
	3	Microscope Binocular	2
	4	Micro Pippettes	28
	5	Alat laboratorium microbiologi lainnya	17
77		ALAT LABORATORIUM KIMIA	
	1	Fotometer	20
	2	TV Monitor	8
	3	alat laboratorium kimia lainnya	1
78		ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	
	1	Glucosa Analyzer	9

NO		BARANG	JUMLAH
	2	Hematology Analyzer	9
	3	Rotator	11
	4	Automatic Pipet Set	3
	5	Alat laboratorium patologi lainnya	4
79		ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	
	1	Centrifuge Electric	2
	2	Centrifuge Carries	1
80		ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	
	1	Haemocytometer	5
	2	Sentrifus Elektrik	4
	3	Sentrifus Hematokrit	3
	4	Timer	6
	5	Westergren Apparatus	1
	6	Alat laboratorium hematologi lainnya	1
81		ALAT LABORATORIUM FILM	
	1	Video Printer	12
82		ALAT LABORATORIUM MAKANAN	
	1	Cooler	2
	2	alat laboratorium makanan lainnya	13
83		ALAT LABORATORIUM FARMASI	
	1	Medicine Cup	1
	2	Spatula	1
	3	Tablet Machine	2
	4	alat laboratorium farmasi lainnya	2
84		ALAT LABORATORIUM FISIKA	
	1	Garpu Tala	
85		ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	
	1	Exhaust Fan	1
86		ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	
	1	Alat Degreening Jeruk	69
	2	Cervix Dilatator	88
	3	Flamephotometer	
	4	Haemoglobin Meter	8
	5	Sound Level Meter	1
	6	Sprayer	10
	7	Stabilizer/UPS	1
	8	Thermometer Glass	4
	9	Unit Ekstraksi	3
87		ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	
	1	Alat Ukur	4
88		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	
	1	Lux Meter	3
89		ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	
	1	Digital Thermometer	196
90		LABORATORIUM KEARSIPAN	
	1	Klem	24
	2	Laboratorium kearsipan lainnya	2
91		LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	
	1	Haemocitometer	2
	2	Chemistry Analyzer	2
	3	Laboratory Refrigerator	1
	4	Hb. Meter	3
	5	Dry Sterilizer	20
	6	Laboratorium hematologi dan urinalisis lainnya	4
92		ALAT LABORATORIUM LAIN	
	1	Head Lamp	1
	2	Meja Kerja	14
	3	Screen Pembaras	47
	4	Thermometer Digital	1

NO		BARANG	JUMLAH
	5	Tempat Air Suling	1
	6	Alat Penyaring	1
	7	Alat laboratorium lain lainnya	16
93		ANALYTICAL INSTRUMENT	
	1	Potentiometer	1
94		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	
	1	Papan Panel	1
	2	Kotak Bahasa Untuk Kartu Kalimat Huruf Cetak dan Kartu Kalimat Huruf Tulis (nomor 66 dan nomor 6)	3
	3	Kotak Bahasa Untuk Kartu KataDan Kartu Suku Kata dan Kartu Huruf	1
95		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	
	1	Papan Panel	1
	2	alat peraga praktek sekolah bidang studi ; matematika lainnya (dst)	1
96		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	
	1	Gelas Ukur	1
	2	Thermometer Badan	2
	3	Layar	1
	4	Bel Listrik	1
97		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	
	1	Mikroskop	21
	2	Rak Tabung Reaksi	6
	3	alat peraga praktek sekolah bidang studi ; ipa menengah lainnya	24
98		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	
	1	Model Gigi	1
	2	Foto Meter	3
	3	Kotak Kaca Obyek	1
99		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	
	1	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi ; IPS	1
100		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	
	1	Orgen/Electrone	1
101		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	
	1	alat peraga praktek sekolah bidang studi ; olah raga lainnya	1
102		ALAT PERAGA KEJURUAN	
	1	alat peraga kejuruan lainnya	2
103		ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	
	1	Scanner	1
104		RECORDER DISPLAY	
	1	recorder display lainnya	22
105		SYSTEM/POWER SUPPLY	
	1	UPS	3
106		MEASURING/TESTING DEVICE	
	1	Infrared Thermometer	104
108		ALAT KESEHATAN KERJA	
	1	Countaiment Boxes (Single C)	13
	2	Alat kesehatan kerja lainnya	2
109		ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	
	1	Tape Recorder	2
110		ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	
	1	Gas Regulator	1

NO		BARANG	JUMLAH
	2	Refrigerator/Freezer	6
	3	alat laboratorium penunjang lainnya	1
111		PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	
	1	Molding Boxes (3 Sizes)	10
112		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	
	1	Digital Multimeter	8
113		ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	
	1	Layar Proyektor	1
114		INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	
	1	Chest Freezer	1
115		KOMPUTER JARINGAN	
	1	Mini Komputer	2
	2	Internet	7
116		PERSONAL KOMPUTER	
	1	P.C Unit	521
	2	Lap Top	494
	3	Note Book	9
117		PERALATAN MAINFRAME	
	1	Hard Disk	19
	2	peralatan mainframe lainnya	2
118		PERALATAN MINI KOMPUTER	
	1	Speaker Komputer	4
	2	Peralatan Minikomputer lainnya	2
119		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	
	1	Monitor	8
	2	Printer	564
	3	Scanner	3
	4	External/ Portable Hardisk	5
	5	Peralatan Personal Komputer lainnya	2
120		PERALATAN JARINGAN	
	1	Router	7
	2	Modem	2
	3	Wireless Access Point	4
	4	Acces Point	12
	5	Peralatan Jaringan lainnya	1
121		PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	
	1	Peralatan Komputer lainnya	2
122		ALAT PENDUKUNG Pencarian	
	1	Tenda	3
123		ALAT KERJA BAWAH AIR	
	1	Regulator	3
124		PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	
	1	Air Conditioning	16
125		PERALATAN SENAM	
	1	Matras	2

Sumber : Dinas Kesehatan

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7 Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan

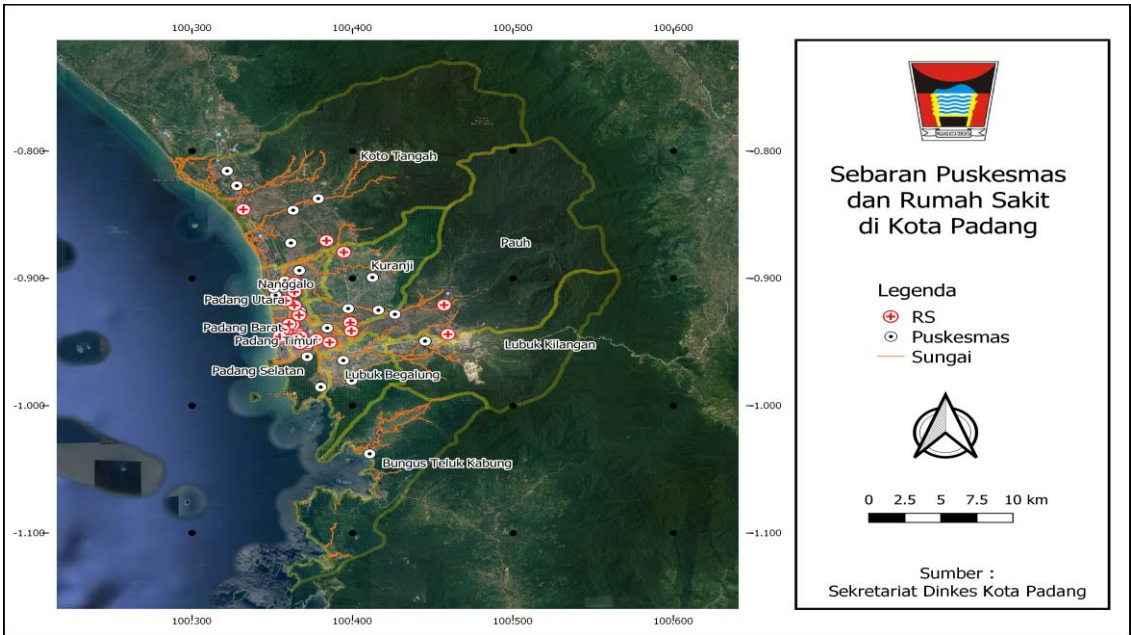
No	Sarana dan Prasarana	2023	2024
1	Puskesmas	23	24
2	Puskesmas Pembantu	57	58
3	Posyandu	919	924

5	Poskeskel (gedung sendiri)	61	54
6	Poskestren	9	9

Sumber : Dinas Kesehatan

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Puskesmas berjumlah 24 unit. Puskesmas tersebar di semua Kecamatan, jumlahnya bervariasi tiap kecamatan, ada yang jumlahnya 1, 2, 3 dan 5 Puskesmas tergantung jumlah penduduk yang akan dilayani. Puskesmas ini tersebar di semua kecamatan, namun sebarannya tertumpu pada pusat kota. Kota Padang juga memiliki fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan jumlah 27 unit Rumah Sakit. Sebaran Puskesmas dan Rumah Sakit dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3 Sebaran Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Padang



Sumber : Dinas Kesehatan

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Padang tahun 2024 (954.177 jiwa), jumlah Puskesmas yang ada (24 unit) belum mencukupi, karena perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 : 30.000, artinya harus ada ± 31 Puskesmas yang harus tersebar merata di Kota Padang berdasarkan proporsi penduduk.

Public Safety Center (PSC) 119 Kota Padang merupakan unit tugas operasional yang mendukung tugas pokok pelayanan Dinas Kesehatan hal ini secara nyata memberikan kontribusi manfaat yang besar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana operasional pada Dinas Kesehatan secara khusus melakukan pelayanan langsung pada masyarakat adalah PSC 119.

PSC 119 dalam proses menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kesehatan, sehingga diharapkan pelayanan PSC lebih

maksimal dan dapat mendukung program unggulan Wali Kota yaitu “Padang Melayani”. Harapannya nanti PSC 119 dapat melakukan layanan kegawatdaruratan kepada masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan tanggap.

Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan operasional PSC adalah sebagai berikut:

- a. Oksigen Set
- b. Emergency KIT lengkap
- c. Personal kit lengkap
- d. Bidai pneumatic dan collar neck
- e. Obat-obatan dan Alat Kesehatan
- f. Genset : 2 buah
- g. Ambulance 119 : 2 unit
- h. Media komunikasi statis dan mobile
- i. Peralatan Perkantoran:
 - Laptop/desktop/PC
 - Meja dan kursi
 - Jaringan internet
 - Infocus set
 - Televisi
- j. Gedung Perkantoran

Untuk melaksanakan kegiatan UPTD memakai gedung PSC 119.

Sarana dan Prasarana Lain :

1. Rumah Sakit Umum Kemenkes/Dikti	:	2 buah
2. Rumah Sakit Umum Kota	:	1 buah
3. Rumah Sakit Umum TNI/POLRI	:	2 buah
4. Rumah Sakit Umum BUMN	:	1 buah
5. Rumah Sakit Umum Swasta	:	8 buah
6. Rumah Sakit Jiwa Pemprov	:	1 buah
7. Rumah Sakit Jiwa Swasta	:	1 buah
8. Rumah Sakit Bersalin	:	5 buah
9. Rumah sakit Khusus Lainnya	:	5 buah
10. Klinik Pratama	:	84 buah
11. Klinik Utama	:	9 buah
12. Praktek Dokter Umum Perorangan	:	836 buah
13. Praktek Dokter Gigi Perorangan	:	130 buah
14. Praktek Pengobatan Tradisional	:	589 buah
15. Unit Transfusi Darah	:	1 buah

16. Usaha mikro obat tradisional	:	1 buah
17. Apotek	:	215 buah
18. Toko Obat	:	24 buah
19. IFK	:	1 buah

RSUD Rasidin

Sejak berdirinya RSUD Kota Padang sampai dengan Tahun 2024 berupaya meningkatkan Sarana dan Prasarana yang ada baik dalam peningkatan alat-alat kesehatan, peningkatan Fisik (bangunan) dan Peralatan Kesehatan.

1) Fisik

a. Lahan

Status Tanah dan bangunan rumah sakit merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kota Padang dengan luas lahan 4,9 Ha. Sejak berdirinya RSUD Kota Padang sampai dengan Tahun 2023, berupaya meningkatkan Sarana dan Prasarana yang ada baik dalam peningkatan alat-alat kesehatan dan peningkatan Fisik (bangunan).

b. Bangunan

Dari ± 4,9 Ha lahan yang ada baru sebagian kecil yang dimanfaatkan hal ini disebabkan keterbatasan APBD Kota Padang, bangunan yang telah ada dan digunakan antara lain:

Tabel 2. 8 Bangunan Gedung Kantor RSUD dr Rasidin Keadaan Tahun 2024

No	Uraian	Luas (M ²)
1.	Gedung Utama (Poliklinik, laboratorium, Farmasi, Radiologi Rawat Inap, IGD, Intensive)	2.902
2.	Gedung Instalasi Rawat Inap (IRI)	222
3.	Gedung Hibah Baiturrahmah	320
4.	Gedung Bangsal Anak (Lama)	666
5.	Gedung Kantor, Administrasi dan Aula	1.308
6.	Gedung Instalasi Gizi	400
7.	Gedung Bangsal Penyakit Dalam (Lama)	781
8..	Gedung Tempat Pembakaran Sampah	16

9.	Gedung Bangsal Kebidanan (Lama)/ Pinere	717
10.	Gedung Mushalla	150
11.	Gedung Penunjang (Pemulasaran Jenazah, IPSRS, CCSD)	772,6

Sumber : RSUD dr. Rasidin

Pada tahun 2024 ini gedung utama lantai 2 juga dilakukan renovasi untuk ruang khusus untuk diagnosis dan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (*cathlab*). Hal ini menindaklanjuti dari penunjukan RSUD dr Rasiidn Padang sebagai rumah sakit rujukan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak) oleh Kementerian Kesehatan RI. Untuk menunjang pelayanan KJSU ini Kemenkes RI juga memberikan alat kesehatan pada tahun 2025 sedangkan ketersediaan ruangan harus disesuaikan dengan standard dan itu menjadi tanggung jawab dari RSUD dr Rasidin.

Tahun 2024 RSUD dr Rasidin juga melakukan pengerjaan jalan lingkakr di halaman belakang gedung penunjang, Pengerjaan atap canopy kamar operasi dan Pengecatan gedung poliklinik.

Untuk menciptakan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang aman, nyaman, dan sehat tentunya pembangunan tersebut juga harus mengacu pada aturan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang mengatur tentang upaya-upaya standar-standar kontruksi bangunan, sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan lingkungan rumah sakit yang harus dipenuhi demi terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, aman, nyaman dan bebas dari kemungkinan resiko infeksi nosokomial.

Untuk memenuhi semua persyaratan tersebut dan agar mampu mencapai target sebagai Rumah Sakit tipe B tersebut, RSUD dr. Rasidin Kota Padang masih membutuhkan penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

2) Prasarana

a. Tempat tidur.

Jumlah tempat tidur awal tahun 2009 sebanyak 90 buah tempat tidur dengan penambahan Bangsal Anak dan Bangsal Bedah. Pada tahun 2024 RSUD sudah sepenuhnya membuka pelayanan seperti biasanya dengan jumlah tempat tidur 111 buah, rincian jumlah tempat tidur dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2. 9 Jumlah Tempat Tidur RSUD dr Rasidin

No	Ruangan	Jumlah Tempat Tidur
1	Kasturi	17
2	Delima	16
3	Zaitun	18
5	Kurma	26
6	Bidara	12
7	HCU	5
8	CVCU	4
9	ICU	3
10	NICU	5
11	Perinatologi	5
TOTAL		111

Sumber : RSUD. Dr. Rasidin

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah Dinas Kesehatan sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kota Padang untuk periode tahun 2025-2029. Target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan setiap tahun, sebagaimana tertuang pada table berikut :

Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan setingkat Impact								
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,06	99,00	99,10	99,20	99,30	100	100
2	Jumlah Kematian Ibu	12	12	12	11	11	10	10

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3	Jumlah Kematian Balita	135	133	131	129	127	125	123
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (SSGI) Mulai tahun 2025 survei SSGI tidak ada.	20,6	17,9	16,65	15,40	14,15	12,9	12,9
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (EPPGBM)	2,53	2,55	2,53	2,51	2,50	2,50	2,50
5	Success rate TB	90,0	93,0	93,2	93,5	94,0	94,5	94,5
6	Peningkatan INM Rumah Sakit	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00
7	Nilasi Sakip	84,34	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	84,9
Indikator Kinerja Program setingkat Outcome								
1	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-	36.00	46.00	55.00	61.00	70.00	70.00
4	Cakupan imunisasi bayi lengkap	88.70	80.00	85.00	90.00	93.00	95.00	95.00

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	63	64.30	66.10	67.90	69.70	72.00	72.00
7	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
8	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	-	0.96	1.92	2.88	3.84	4.80	4.80
9	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40
10	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	81	81.02	81.05	81.10	81.15	81.20	81.20
11	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	75	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00
12	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Persentase lanjut usia yang mandiri	94	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	83.00
14	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12.40	12.40	11.40	10.40	9.40	8.40	8.40
15	Cakupan penemuan kasus TB	89	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
16	Persentase puskesmas dan RSUD dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
17	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1.30	1.30	1.36	1.40	1.50	1.57	1.57
18	Persentase Puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar	40	80	80	80	80	80	80
20	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	78	80	80	80	80	80	80
21	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	40	80	80	80	80	80	80
22	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	70	80	80	80	80	80	80
23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase UKBM yang aktif	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
25	Persentase Kecamatan Yang Menetapkan Kebijakan Germas	85	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Kesehatan menjadi salah satu dari 6 urusan tersebut. Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan pelayanan SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan yang memuat 12 jenis layanan dan mutu SPM Kesehatan. Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan tertuang dalam table berikut :

Tabel 2. 11 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan dan Indikator Lainnya Tahun 2020-2024

No	Nama Indikator	Target Renstra pada tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	94,36	94,14	99,7	100	100	0,94	0,94	1,00	1,00	1,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	100	99,25	99,8	99,9	100	100	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	93,76	93,65	97,74	100	100	0,94	0,94	0,98	1,00	1,00
4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	81,27	89,99	100	100	100	0,81	0,90	1,00	1,00	1,00
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	82,65	46,50	100	100	100	0,83	0,47	1,00	1,00	1,00

No	Nama Indikator	Target Renstra pada tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Pelayanan kesehatan usia produktif	100	100	100	100	100	80,33	74,78	98,4	100	100	0,80	0,75	0,98	1,00	1,00
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	100	100	100	100	100	52,9	50,75	97,81	100	100	0,53	0,51	0,98	1,00	1,00
8	Pelayanan kesehatan hipertensi	100	100	100	100	100	60,71	31,51	86,93	100	100	0,61	0,32	0,87	1,00	1,00
9	Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (DM)	100	100	100	100	100	76,21	92,85	86,4	100	100	0,76	0,93	0,86	1,00	1,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100	100	100	100	100	100,00	93,13	99,5	100	100	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	100	100	100	100	100	100,00	92,59	97,24	100	100	1,00	0,93	0,97	1,00	1,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100,00	100,0	95,68	100	100	1,00	1,00	0,96	1,00	1,00

Sumber : Dinas Kesehatan

Masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan hipertensi dan pelayanan kesehatan diabetes melitus disebabkan karena :

- Belum optimalnya petugas dalam melakukan penjangkaran kasus hipertensi dan diabetes
- FKTP swasta belum memberikan laporan kunjungan pasien hipertensi dan diabetes secara rutin

Evaluasi capaian anggaran Dinas Kesehatan disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan,

evaluasi ini memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TAK LANGSUNG	104.805.296.164	96.033.926.422	95.090.725.160	91.348.939.360	0,91	0,95	0,37	0,32
Gaji dan Tunjangan	81.637.076.164	73.029.206.422	73.471.021.294	69.483.493.722	0,90	0,95	0,16	0,11
Tambahan Penghasilan PNS	23.168.220.000	23.004.720.000	21.619.703.866	21.865.445.638	0,93	0,95	2,34	2,20
BELANJA LANGSUNG	109.397.155.022	135.059.599.303	97.683.609.200	120.320.412.942	0,89	0,89	0,74	0,88
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.146.818.250	2.728.418.928	2.749.476.851	2.578.791.782	0,87	0,95	0,15	0,16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	920.000	925.000	920.000	925.000	1,00	1,00	0,01	0,01
Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	759.180.000	476.400.400	459.654.890	443.652.915	0,61	0,93	-0,31	-0,22
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	28.000.000	23.983.200	25.967.900	0,80	0,93	-0,17	-0,01
Penyediaan jasa kebersihan kantor	530.860.000	589.062.924	529.331.309	583.577.924	1,00	0,99	0,49	0,48
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	309.100.000	70.535.000	309.075.000	59.000.000	1,00	0,84	-0,54	-0,61
Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	154.235.000	147.496.100	154.235.000	0,98	1,00	0,62	0,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.208.250	107.165.000	108.699.500	106.216.250	0,98	0,99	0,07	0,07
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21.000.000	27.500.000	21.000.000	27.500.000	1,00	1,00	0,57	0,57
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	128.200.000	292.455.949	122.771.000	291.504.800	0,96	1,00	0,05	0,05

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60.000.000	22.032.600	16.740.000	17.280.000	0,28	0,78	-0,51	-0,62
Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	105.000.000	99.722.700	77.702.350	1,00	0,74	0,75	0,30
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	150.821.249	220.984.822	93.680.515	0,88	0,62	-0,24	-0,51
Penyediaan jasa pelayanan publik	31.850.000	17.500.000	30.600.000	17.500.000	0,96	1,00	-0,76	-0,74
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	384.700.000	360.400.000	379.074.000	356.750.000	0,99	0,99	0,20	0,19
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	279.800.000	326.385.806	279.424.330	323.299.127	1,00	0,99	0,63	0,62
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-	-	-0,73	-0,71
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.472.230.000	2.404.126.600	2.253.864.954	2.206.981.643	0,91	0,92	0,22	0,13
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300.000.000	356.000.000	295.071.800	355.512.033	0,98	1,00	0,42	0,42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.800.000.000	1.902.430.000	1.619.733.154	1.719.741.610	0,90	0,90	0,20	0,08
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	42.765.000	37.935.000	42.602.000	29.155.000	1,00	0,77	0,76	0,43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	120.385.000	106.508.600	112.664.000	101.320.000	0,94	0,95	-0,05	0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	1.253.000	0	1.253.000	-	1,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Perkantoran					-	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebeleur					-	-	0,00	0,00
DED Dinas Kesehatan Kota Padang	209.080.000		183.794.000		0,88	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional					-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	582.800.000	224.394.500	547.892.500	200.749.650	0,94	0,89	-0,30	-0,32
Pembinaan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas	120.000.000	58.219.500	119.508.500	57.912.500	1,00	0,99	-0,42	-0,42
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	262.800.000	32.855.000	254.465.000	29.964.700	0,97	0,91	-0,81	-0,80
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	200.000.000	133.320.000	173.919.000	112.872.450	0,87	0,85	1,61	1,58
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000	39.599.750	29.414.000	39.559.500	0,98	1,00	1,53	1,52
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	19.715.000	29.414.000	19.715.000	0,98	1,00	0,26	0,26
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	-	19.884.750		19.844.500	-	1,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	-	26.670.000	0	25.152.000	-	0,94	0,00	0,00
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		16.400.000		15.432.000	-	0,94	0,00	0,00
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		10.270.000		9.720.000	-	0,95	0,00	0,00
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.615.323.000	4.409.179.500	2.561.900.298	4.373.328.786	0,98	0,99	8,72	8,69
Pengadaaan Obat dan Perbekalan	348.388.000	699.700.000	348.227.297	698.489.975	1,00	1,00	0,90	0,90

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Kesehatan								
Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis)	40.000.000	49.910.000	39.168.329	49.791.969	0,98	1,00	-0,33	-0,26
Perencanaan serta Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan	77.712.000	35.764.500	77.117.845	35.596.258	0,99	1,00	-0,58	-0,57
Pengadaan Obat dan Vaksin (DAK Reguler)	1.989.610.000	3.478.107.000	1.946.837.210	3.462.540.384	0,98	1,00	-0,30	0,57
Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	59.613.000	45.698.000	150.549.617	126.910.200	0,94	0,87	-0,36	-0,34
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.115.035.000	28.786.179.977	11.758.188.703	22.303.710.016	0,78	0,77	59,88	48,59
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	197.700.000	245.565.000	183.065.250	225.405.000	0,93	0,92	1,89	2,13
BOK UKM (DAK Non Fisik)	689.000.000	1.013.228.000	647.595.050	311.915.500	0,94	0,31	0,57	-0,49
BOK Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik)	579.000.000	281.322.000	486.446.225	256.600.000	0,84	0,91	-0,98	-0,97
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gangguan Jiwa dan Narkoba	110.000.000	63.560.000	108.477.800	47.771.600	0,99	0,75	-0,29	-0,45
BOK Puskesmas Air Dingin (DAK Non Fisik)	497.200.565	589.353.114	428.532.500	238.326.800	0,86	0,40	0,19	-0,44
BOK Puskesmas KPIK (DAK Non Fisik)	491.721.374	491.721.374	375.146.600	314.023.900	0,76	0,64	0,00	-0,16
BOK Puskesmas Anak Air (DAK Non Fisik)	508.177.536	357.415.536	256.895.900	168.904.400	0,51	0,47	-0,30	-0,34
BOK Puskesmas Nanggalo (DAK Non Fisik)	467.741.200	301.979.200	359.093.647	160.279.500	0,77	0,53	-0,35	-0,55
BOK Puskesmas Ulak Karang (DAK Non Fisik)	560.780.558	575.780.558	500.523.558	404.093.400	0,89	0,70	0,03	-0,19

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BOK Puskesmas Seberang Padang (DAK Non Fisik)	496.652.181	360.890.181	342.807.700	192.788.200	0,69	0,53	-0,27	-0,44
BOK Puskesmas Rawang (DAK Non Fisik)	505.458.854	362.196.854	306.079.400	240.195.250	0,61	0,66	-0,28	-0,22
BOK Puskesmas Kuranji (DAK Non Fisik)	522.607.467	537.607.467	429.755.800	263.928.250	0,82	0,49	0,03	-0,39
BOK Puskesmas Belimbing (DAK Non Fisik)	500.012.193	558.499.844	398.723.000	249.175.950	0,80	0,45	0,12	-0,38
BOK Puskesmas Bungus (DAK Non Fisik)	466.221.526	488.721.526	436.377.500	428.256.400	0,94	0,88	0,05	-0,02
BOK Puskesmas Dadok Tunggul Hitam (DAK Non Fisik)	531.682.522	546.682.522	382.375.250	291.102.250	0,72	0,53	0,03	-0,24
BOK Puskesmas Air Tawar (DAK Non Fisik)	526.803.997	549.303.977	442.571.050	336.279.950	0,84	0,61	0,04	-0,24
BOK Puskesmas Pemancungan (DAK Non Fisik)	538.928.857	546.428.857	410.233.337	267.849.810	0,76	0,49	0,01	-0,35
BOK Puskesmas Lubuk Buaya (DAK Non Fisik)	591.294.865	557.894.885	515.304.200	357.982.000	0,87	0,64	-0,06	-0,31
BOK Puskesmas Lapai (DAK Non Fisik)	519.382.226	534.382.226	355.545.200	219.586.000	0,68	0,41	0,03	-0,38
BOK Puskesmas Alai (DAK Non Fisik)	496.652.181	511.652.181	336.472.600	252.569.800	0,68	0,49	0,03	-0,25
BOK Puskesmas Padang Pasir (DAK Non Fisik)	681.606.246	756.606.246	596.841.750	422.936.396	0,88	0,56	0,11	-0,29
BOK Puskesmas Andalas (DAK Non Fisik)	758.686.706	770.280.350	637.454.050	305.535.700	0,84	0,40	0,02	-0,52
BOK Puskesmas Lubuk Begalung (DAK Non Fisik)	595.305.503	662.805.503	412.267.300	329.598.190	0,69	0,50	0,11	-0,20
BOK Puskesmas Pagambiran (DAK Non Fisik)	486.181.768	292.919.769	243.431.800	201.680.200	0,50	0,69	-0,40	-0,17

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BOK Puskesmas Lubuk Kilangan (DAK Non Fisik)	585.476.420	615.476.420	432.437.600	394.361.200	0,74	0,64	0,05	-0,09
BOK Puskesmas Pauh (DAK Non Fisik)	638.088.736	472.325.891	403.534.450	254.943.950	0,63	0,54	-0,26	-0,37
BOK Puskesmas Ambacang (DAK Non Fisik)	517.336.519	547.336.519	427.738.600	284.548.150	0,83	0,52	0,06	-0,33
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan)		3.253.847.000		2.957.687.000	-	0,91	0,00	0,00
Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19		11.940.396.977		11.925.385.270	-	1,00	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan					-	-	0,32	0,21
Skrining Narkoba					-	-	0,41	0,35
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	101.200.000		99.884.400		0,99	-	-0,24	-0,19
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000		48.756.800		0,98	-	-0,25	-0,26
Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	60.000.000		53.301.100		0,89	-	0,74	0,59
Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi	76.910.000		76.694.600		1,00	-	0,53	0,55
Pelaksanaan Kegiatan/Pelayanan P3K	150.000.000		139.032.300		0,93	-	1,08	0,98
Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Bidang Kesehatan	80.000.000		77.780.000		0,97	-	0,34	0,31
Peningkatan Kesehatan Olahraga & Kesehatan Kerja	80.000.000		78.300.000		0,98	-	0,03	0,04

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan)	457.225.000		328.712.386		0,72	-	0,00	0,00
BOK PUSKESMAS (DAK NON FISIK)					-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	234.500.000	176.863.401	232.200.250	166.186.500	0,99	0,94	0,40	0,32
Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat serta Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	234.500.000	137.721.401	232.200.250	137.721.250	0,99	1,00	0,09	0,09
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan		39.142.000		28.465.250	-	0,73	0,00	0,00
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	527.197.500	85.257.500	498.848.550	85.257.500	0,95	1,00	-0,82	-0,81
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	200.000.000	61.266.500	193.799.500	61.266.500	0,97	1,00	-0,16	-0,13
Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu	70.000.000	22.331.000	57.369.500	22.331.000	0,82	1,00	-0,47	-0,39
Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan (Kelurahan Siaga)	58.987.500	1.660.000	51.778.750	1.660.000	0,88	1,00	-0,96	-0,96
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok					-	-	-1,00	-1,00
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	49.860.000	-	49.620.800	0	1,00	-	-1,00	-1,00
Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional	148.350.000	-	146.280.000	0	0,99	-	-1,00	-1,00
Pembinaan Pengobatan Tradisional					-	-	0,00	0,00
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1.547.601.000	1.250.125.000	1.517.444.930	155.000.650	0,98	0,12	-0,75	-0,97
Penanggulangan Kurang Energi Protein	175.000.000	64.064.000	172.745.000	55.989.000	0,99	0,87	-0,63	-0,67

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya								
Pendataan Balita Gizi Kurang		32.221.000		30.071.000	-	0,93	0,00	0,00
Pemberdayaan Untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi	60.000.000	7.225.000	47.900.000	0	0,80	-	-0,82	-1,00
Penyediaan PMT Bagi Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK	110.000.000	-	109.343.945	0	0,99	-	-1,00	-1,00
Penanggulangan Balita Gizi Buruk Rawat Inap	35.000.000	14.490.000	19.874.785	1.850.000	0,57	0,13	-0,03	-0,86
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)					-	-	-1,00	-1,00
Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	1.167.601.000	1.132.125.000	1.167.581.200	67.090.650	1,00	0,06	-0,03	-0,94
Pembentukan Klinik Laktasi					-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	250.180.000	66.095.000	237.658.100	59.854.800	0,95	0,91	-0,87	-0,87
Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan	62.000.000	7.895.000	58.575.000	7.840.000	0,94	0,99	-0,76	-0,76
Pengawasan Tempat-tempat Umum/ Tempat Pengolahan Makanan (TTU/ TPM)	55.000.000	6.140.000	52.840.000	6.140.000	0,96	1,00	-0,87	-0,87
Sosialisasi dan Pembinaan Penyehatan Lingkungan	63.320.000	5.300.000	59.597.250	5.266.000	0,94	0,99	-0,81	-0,82
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)					-	-	-1,00	-1,00
Healthy City Conference & Expo					-	-	-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	69.860.000	24.150.000	66.645.850	20.790.000	0,95	0,86	-0,65	-0,69
Peningkatan Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja		22.610.000		19.818.800	-	0,88	0,00	0,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	1.032.344.000	15.932.006.400	942.116.400	15.119.159.020	0,91	0,95	8,32	8,43
Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk	263.719.000	282.435.000	227.912.400	156.230.250	0,86	0,55	-0,02	-0,41
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging		104.300.000		104.297.000	-	1,00	-0,31	-0,27
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	112.300.000	99.065.000	102.000.350	82.246.750	0,91	0,83	-0,79	-0,81
Peningkatan Imunisasi	150.400.000	39.379.000	145.500.000	30.658.000	0,97	0,78	-0,92	-0,93
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	150.000.000	52.894.400	140.095.500	52.840.400	0,93	1,00	-0,66	-0,65
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	50.000.000	43.693.500	48.544.250	29.128.500	0,97	0,67	-0,43	-0,59
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					-	-	0,56	0,67
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (TB dan HIV/ AIDS)	305.925.000	67.445.000	278.063.900	56.863.750	0,91	0,84	-0,63	-0,68
Penanggulangan COVID 19 (DID)		10.154.291.000		9.864.586.350	-	0,97	0,00	0,00
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Bidang Kesehatan (DID T)		5.088.503.500		4.742.308.020	-	0,93	0,00	0,00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	2.319.258.000	205.858.500	2.222.535.624	144.805.500	0,96	0,70	-0,70	-0,77

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	191.900.000	54.046.500	191.870.000	45.396.500	1,00	0,84	-0,72	-0,76
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	187.600.000	-	187.583.450	0	1,00	-	-1,00	-1,00
Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Data Kepegawaian Dinas Kesehatan	66.000.000	-	60.768.000	0	0,92	-	0,65	0,91
Penyusunan Laporan dan Profil Kesehatan	70.000.000	144.262.000	69.531.000	99.409.000	0,99	0,69	2,01	1,09
Monitoring dan Evaluasi e-Puskesmas	94.300.000	7.550.000	90.669.924	0	0,96	-	-0,92	-1,00
Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.624.458.000		1.540.716.150		0,95	-	-1,00	-1,00
The International Organization of Standarization (ISO) Puskesmas					-	-	-1,00	-1,00
Penyusunan SOP Pemberian Rekomendasi Perizinan RS Kelas C dan D Berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014	60.000.000		56.797.100		0,95	-	0,79	0,80
Pembinaan Akreditasi Puskesmas	25.000.000		24.600.000		0,98	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	13.728.640.625	13.446.243.492	12.289.823.543	12.611.272.854	0,90	0,94	0,54	0,45
Pembangunan Puskesmas Pembantu		784.000		784.000	-	1,00	-1,00	-1,00
Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	845.000.000	1.274.500.000	809.338.100	1.270.973.800	0,96	1,00	2,19	2,20
Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas	600.000.000	441.822.075	597.891.000	439.047.050	1,00	0,99	-0,80	-0,79
Pengadaan Instalasi Pengolah Limbah (DAK Reguler)		3.020.210.000		2.994.265.399	-	0,99	-0,37	-0,35

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Alat Laboratorium		299.144.900		298.896.400	-	1,00	0,00	0,00
Rehabilitasi Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL)		450.000.000		448.128.100	-	1,00	-0,60	-0,60
Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK Reguler)		567.561.200		567.457.500	-	1,00	0,00	0,00
DED Puskesmas		500.000		500.000	-	1,00	-1,00	-1,00
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Prasarana Kesehatan	60.000.000	45.265.000	59.959.800	43.263.000	1,00	0,96	0,65	0,87
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Reguler)	1.325.994.986	3.354.578.310	1.325.950.036	3.179.693.310	1,00	0,95	1,53	1,40
Pembangunan Ruang Terapi Berhenti Merokok (DBHCHT)		20.294.800		13.474.920	-	0,66	-0,91	-0,94
Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (DAK Reguler)		609.739.500		609.706.100	-	1,00	0,00	0,00
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas (DAK Reguler)		3.279.052.340		2.662.346.550	-	0,81	0,00	0,00
Pengadaan Alat Penunjang Penanggulangan COVID 19 (DBHCHT)		82.791.367		82.736.725	-	1,00	0,00	0,00
Pembangunan Puskesmas	1.920.000.000		1.631.107.350		0,85	-	-0,29	-0,39
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	885.000.000		817.994.815		0,92	-	-1,00	-1,00
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK)	2.827.883.614		2.568.890.150		0,91	-	0,54	0,76
Pengadaan Alat-alat Kesehatan	3.575.000.000		2.829.935.822		0,79	-	-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Puskesmas keliling (DAK Reguler)	1.332.672.400		1.300.518.050		0,98	-	-0,37	-0,33
Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas	357.089.625		348.238.420		0,98	-	0,00	0,00
Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Alat Laboratorium (DAK)					-	-	-0,31	-0,53
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK)					-	-	0,00	0,00
Lanjutan Pembangunan Gudang Farmasi Kota (DAK)					-	-	0,00	0,00
Penyediaan Farmasi dan Perlengkapannya (DAK)					-	-	0,00	0,00
Pengadaan Sarana Gudang Farmasi dan Pelet Penyimpanan Obat (DAK Reguler)					-	-	-0,94	-0,93
Pembangunan Puskesmas (DAK)					-	-	-0,73	-0,74
Rehabilitas sedang/berat rumah dinas kesehatan					-	-	-0,85	-0,85
Pengadaan Kendaraan Ambulance/Kendaraan Jenazah					-	-	0,00	0,00
Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas					-	-	0,00	0,00
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	24.450.856.000	26.064.168.950	24.368.530.800	26.063.853.850	1,00	1,00	1,12	1,12
Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato	24.450.856.000	26.064.168.950	24.368.530.800	26.063.853.850	1,00	1,00	1,12	1,12

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	117.450.000	14.580.000	111.129.050	3.190.000	0,95	0,22	-0,90	-0,97
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	117.450.000	14.580.000	111.129.050	3.190.000	0,95	0,22	-0,90	-0,97
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	47.360.000	36.060.000	47.130.200	30.603.000	1,00	0,85	-0,29	-0,40
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	47.360.000	36.060.000	47.130.200	30.603.000	1,00	0,85	-0,29	-0,40
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	698.052.000	1.578.260.000	491.319.500	1.372.092.243	0,70	0,87	1,10	0,88
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP	698.052.000	710.710.000	491.319.500	642.480.000	0,70	0,90	-0,05	-0,12
Penurunan AKI, AKB, dan Penguatan Puskesmas PONED (DAK Penugasan)		867.550.000		729.612.243	-	0,84	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH	50.000.000	119.309.000	49.025.000	114.813.950	0,98	0,96	1,39	1,32
Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	50.000.000	119.309.000	49.025.000	114.813.950	0,98	0,96	1,39	1,32
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN	334.000.000	1.644.952.000	306.563.200	923.291.818	0,92	0,56	0,66	3,59
Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik)	334.000.000	1.644.952.000	306.563.200	923.291.818	0,92	0,56	0,66	3,59
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Begalung					-	-	0,00	0,00
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Kuranji					-	-	0,00	0,00
PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN					-	-	-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
UMUM DAERAH (BLUD)								
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD					-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	39.000.000.000	35.821.250.805	34.373.134.147	31.742.757.880	0,88	0,89	-0,22	0,03
Pelayanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	39.000.000.000	33.907.271.055	34.373.134.147	31.266.586.030	0,88	0,92	-0,26	0,01
Operasional Public Safety Center (PSC) 119		57.353.000		33.067.600	-	0,58	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Rekomendasi Perizinan RS Kelas C dan D		24.790.000		24.397.200	-	0,98	0,00	0,00
Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)		7.273.000		7.246.000	-	1,00	0,00	0,00
Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi		54.083.900		53.967.800	-	1,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Kegiatan/ Pelayanan P3K		9.069.000		5.244.000	-	0,58	0,00	0,00
Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Bidang Kesehatan		10.200.000		8.640.000	-	0,85	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer		23.263.850		21.430.850	-	0,92	0,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan		12.177.000		12.177.000	-	1,00	0,00	0,00
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional		22.935.000		22.849.000	-	1,00	0,00	0,00
Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)		1.682.975.000		281.552.400	-	0,17	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Akreditasi Puskesmas		9.860.000		5.600.000	-	0,57	0,00	0,00
PROGRAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.000.000.000	-	0	0	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas	1.000.000.000		0		-	-	0,00	0,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	-	23.264.000	0	0,93	-	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	25.000.000		23.264.000		0,93	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	72.509.647	-	72.148.600	0	1,00	-	0,24	0,23
Validasi Data Aset	72.509.647		72.148.600		1,00	-	0,24	0,23
Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang					-	-	0,00	0,00
Jumlah	214.202.451.186	231.093.525.725	192.774.334.360	211.669.352.302	0,90	0,92	0,57	0,59

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr Rasidin Kota Padang Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	31.828.90	33.084.39	26.298.16	26.769.18				

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	9.392	1.076	9.235	7.132	0,83	0,81	0,04	0,02
Gaji dan Tunjangan	23.029.22 9.392	24.450.51 1.076	18.881.68 3.670	18.893.16 9.194	0,82	0,77	0,06	0,00
Tambahan Penghasilan PNS	8.799.680. 000	8.633.880. 000	7.416.485. 565	7.876.017. 938	0,84	0,91	- 0,02	0,06
Belanja Langsung	78.160.17 7.204	53.905.39 4.586	72.562.79 7.635	50.456.65 3.722	0,93	0,94	- 0,31	- 0,30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.314.135 .381	8.436.548 .844	7.057.533 .304	8.173.414 .248	0,96	0,97	0,15	0,16
penyediaan jasa surat menyurat	4.855.400	5.000.000	4.749.500	4.614.500	0,98	0,92	0,03	- 0,03
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.763.556. 000	3.190.800. 000	1.628.163. 851	3.081.996. 048	0,92	0,97	0,81	0,89
Penyediaan jasa Pemeliharaan perizinan kendaraan dinas /operasional	12.571.25 0	13.000.00 0	10.905.85 0	2.664.150	0,87	0,20	0,03	- 0,76
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.825.062. 000	1.976.623. 078	1.823.740. 994	1.958.710. 163	1,00	0,99	0,08	0,07
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.00 0	33.228.00 0	20.490.00 0	32.650.00 0	0,93	0,98	0,51	0,59
Penyediaan Alat Tulis Kantor	380.000.0 00	311.999.7 00	363.844.0 00	285.103.0 00	0,96	0,91	- 0,18	- 0,22
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	400.000.0 00	343.340.0 00	399.860.2 35	335.437.8 52	1,00	0,98	- 0,14	- 0,16
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	150.000.0 00	160.000.0 00	149.973.2 55	152.291.1 50	1,00	0,95	0,07	0,02
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	456.245.0 00	245.646.0 00	411.569.0 00	241.641.0 00	0,90	0,98	- 0,46	- 0,41

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan bahan Bacaan dan Per-undangan-Undangan	20.000.00 0	14.540.60 0	12.411.50 0	11.299.22 5	0,62	0,78	- 0,27	- 0,09
Penyediaan Makan dan Minum	70.000.00 0	80.000.00 0	69.946.92 5	79.426.07 0	1,00	0,99	0,14	0,14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	396.653.7 00	156.200.0 00	389.274.7 64	121.729.0 30	0,98	0,78	- 0,61	- 0,69
Penyediaan alat kebersihan	233.521.2 50	277.267.0 00	197.269.7 50	269.759.6 00	0,84	0,97	0,19	0,37
Penyediaan jasa pelayanan publik	71.750.30 0	71.400.00 0	71.701.90 0	71.300.00 0	1,00	1,00	- 0,00	- 0,01
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	660.950.3 00	660.625.0 00	660.896.3 00	628.050.0 00	1,00	0,95	- 0,00	- 0,05
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.	797.688.9 81	896.879.4 66	796.043.4 80	896.742.4 60	1,00	1,00	0,12	0,13
Validasi Data Kepegawaian	49.281.20 0	0	46.692.00 0	0	0,95	-	- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.023.375 .000	808.451.1 05	709.142.4 57	567.908.8 04	0,69	0,70	- 0,21	- 0,20
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	600.000.0 00	437.326.1 05	351.870.3 67	265.230.3 09	0,59	0,61	- 0,27	- 0,25
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	162.975.0 00	162.975.0 00	162.889.3 50	158.961.2 50	1,00	0,98	-	- 0,02
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	35.000.00 0	28.150.00 0	20.805.52 0	17.316.04 5	0,59	0,62	- 0,20	- 0,17
Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon	200.000.0 00	180.000.0 00	150.687.3 00	126.401.2 00	0,75	0,70	- 0,10	- 0,16
Penyediaan Peralatan Perbengkelan		0		0			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	25.400.00 0		22.889.92 0		0,90	-	1,00	1,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.00 0	-	8.619.250	-	0,86	-	- 1,00	- 1,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan	10.000.00 0	0	8.619.250	0	0,86	-	- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	438.522.3 34	169.717.3 75	392.818.4 76	140.657.8 00	0,90	0,83	- 0,61	- 0,64
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan	308.121.3 68	134.300.0 00	268.554.5 76	107.100.0 00	0,87	0,80	- 0,56	- 0,60
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	39.353.00 0	35.417.37 5	38.106.95 0	33.557.80 0	0,97	0,95	- 0,10	- 0,12
Pelatihan Customer Service	91.047.96 6	0	86.156.95 0	0	0,95	-	- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.00 0	49.701.50 0	26.900.80 0	46.793.80 0	0,90	0,94	0,66	0,74
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.00 0	26.924.00 0	26.900.80 0	25.205.00 0	0,90	0,94	- 0,10	- 0,06
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	-	22.777.50 0	-	21.588.80 0	-	0,95	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	-	42.840.25 0	-	36.670.60 0	-	0,86	-	-
Penyusunan perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	22.311.75 0	-	18.371.60 0	-	0,82	-	-
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	20.528.50 0	-	18.299.00 0	-	0,89	-	-
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.202.137 .450	327.494.5 00	829.088.8 75	244.568.7 17	0,69	0,75	- 0,73	- 0,71
Pendukung Komite Medik	35.850.00	17.535.00 0	34.459.70	15.573.45 0	0,96	0,89	- 0,51	- 0,55

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	0		0					
Pendukung Komite Farmasi	25.000.00 0	15.648.75 0	23.809.75 0	15.586.41 2	0,95	1,00	- 0,37	- 0,35
Pendukung Komite keperawatan	63.394.25 0	26.901.50 0	43.558.90 0	26.514.65 5	0,69	0,99	- 0,58	- 0,39
Pelatihan BTCLS	117.495.6 00	84.944.00 0	117.382.0 00	84.944.00 0	1,00	1,00	- 0,28	- 0,28
Pendukung Komite Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP)	-	18.866.75 0		2.012.000	-	0,11	-	-
Pendukung Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	-	27.564.00 0		23.680.00 0	-	0,86	-	-
Pendukung Komite Nakes lainnya	-	20.436.50 0		20.061.00 0	-	0,98	-	-
Evaluasi dan Monitoring Program Nasional dan (TB, PONEK, Geriatri, PPRA, HIV.AIDS)	-	32.197.00 0		13.943.70 0	-	0,43	-	-
Pre Construction Risk Assesment (PCRA)	-	83.401.00 0		42.253.50 0	-	0,51	-	-
Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	362.100.0 00	0	110.761.0 00	2.012.000	0,31	-	- 1,00	- 0,98
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	97.467.60 0	0	91.519.00 0	23.680.00 0	0,94	-	- 1,00	- 0,74
Evaluasi Pemutahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan	47.875.00 0	0	36.691.50 0	20.061.00 0	0,77	-	- 1,00	- 0,45
Simulasi Hospital Disaster Plan	79.500.00 0	0	69.678.00 0	13.943.70 0	0,88	-	- 1,00	- 0,80
Pengadaan Peralatan Kebencanaan Rumah Sakit	185.555.0 00	0	183.193.5 00	42.253.50 0	0,99	-	- 1,00	- 0,77
Survey Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	187.900.0 00	0	118.035.5 25	2.012.000	0,63	-	- 1,00	- 0,98

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.130.205.350	1.228.219.415	1.129.598.743	1.222.237.016	1,00	1,00	0,09	0,08
Pengobatan untuk masyarakat miskin dan terlantar	1.130.205.350	1.228.219.415	1.129.598.743	1.222.237.016	1,00	1,00	0,09	0,08
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata	28.732.872.280	14.413.817.683	25.927.872.364	14.103.081.569	0,90	0,98	-0,50	-0,46
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	8.814.231.416	9.786.952.683	7.714.752.118	9.755.006.980	0,88	1,00	0,11	0,26
Pengadaan mebeleur rumah sakit	373.599.000	198.649.000	359.841.300	183.275.091	0,96	0,92	-0,47	-0,49
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dan lain-lain)	-	200.000.000	-	187.980.000	-	0,94	-	-
Penyediaan Media Informasi untuk Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	151.100.000	67.544.000	145.372.350	30.561.875	0,96	0,45	-0,55	-0,79
Penyediaan Gas Medis	-	513.128.000	-	420.846.150	-	0,82	-	-
Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Medis	-	200.000.000	-	196.431.373	-	0,98	-	-
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Reguler)	17.283.795.000	3.048.794.000	15.676.660.670	3.005.371.200	0,91	0,99	-0,82	-0,81
Penyediaan Linen Rumah Sakit	502.550.000	199.250.000	497.033.150	194.710.900	0,99	0,98	-0,60	-0,61
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Informasi Rumah Sakit (SIMRS)	-	199.500.000	-	128.898.000	-	0,65	-	-
Pengembangan Rumah Sakit	675.856.864	0	648.299.276	196.431.373	0,96	-	-1,00	-0,70
Penyediaan Gas Medis	402.490.0	0	387.294.5	3.005.371.200	0,96	-	-1,00	6,76

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	00		00					
Pembuatan Sumur Artesis dan Reservoir	220.700.000	0	215.889.000	194.710.900	0,98	-	-1,00	-0,10
Pengadaan peralatan penunjang untuk latihan/exercise	308.550.000	0	282.730.000	128.898.000	0,92	-	-1,00	-0,54
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru dan Mata	1.673.250.000	1.413.972.300	1.310.092.173	1.303.106.620	0,78	0,92	-0,15	-0,01
Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Sakit	513.075.000	197.286.800	324.183.650	162.938.950	0,63	0,83	-0,62	-0,50
Pemeliharaan rutin / berkala Alat-alat kesehatan rumah sakit	370.000.000	370.556.500	347.427.050	329.652.450	0,94	0,89	0,00	-0,05
Pengelolaan Sanitasi Rumah Sakit	500.000.000	826.129.000	411.369.600	795.545.870	0,82	0,96	0,65	0,93
Pemeliharaan Lahan Tanaman Rumah sakit	10.000.000	20.000.000	10.000.000	14.969.350	1,00	0,75	1,00	0,50
Peyediaan Peralatan Dapur	280.175.000	0	217.111.873	14.969.350	0,77	-	-1,00	-0,93
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	36.532.679.409	27.014.631.614	35.103.301.693	24.618.214.548	0,96	0,91	-0,26	-0,30
Pelayanan BLUD (Badan layanan Umum Daerah)	36.532.679.409	27.014.631.614	35.103.301.693	24.618.214.548	0,96	0,91	-0,26	-0,30
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	-	21.516.900	24.618.214.548	0,86	-	-1,00	1.143,13
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	25.000.000	0	21.516.900	24.618.214.548	0,86	-	-1,00	1.143,13

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rara-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan daerah	48.000.000	-	46.312.600	24.618.214.548	0,96	-	-1,00	530,57
Validasi Data Aset	48.000.000	0	46.312.600	24.618.214.548	0,96	-	-1,00	530,57
Jumlah	109.989.086.596	86.989.785.662	98.860.966.870	77.225.840.854	0,90	0,89	-0,21	-0,22

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaetn/ Kota	175.899.582.739	156.368.456.380	158.240.879.434	249.302.531.883	163.940.144.250	143.065.343.945	146.191.049.267	231.907.773.938	0,93	0,91	0,92	0,93	-0,11	-0,13	0,01	0,02	0,58	0,59
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	131.282.600	67.901.450	83.540.000	72.370.000	120.887.780	67.102.950	69.583.470	48.532.390	0,92	0,99	0,83	0,67	-0,48	-0,44	0,23	0,04	-0,13	-0,3

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	21.067.500	4.320.000	2.811.200	6.213.000	21.033.000	4.320.000	2.222.500	5.921.000	1	1	0,79	0,95	-0,79	-0,79	0,35	0,49	1,21	1,66
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.804.200	5.960.000	15.575.000	18.084.000	19.216.500	5.960.000	9.671.250	3.208.500	0,84	1	0,62	0,18	-0,74	-0,69	1,61	0,62	0,16	0,67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	23.535.700	8.150.000	17.200.000	13.518.000	21.657.500	8.121.750	11.725.000	7.650.000	0,92	1	0,68	0,57	-0,65	-0,62	1,11	0,44	-0,21	0,35
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	11.267.700	4.878.200	13.534.000	10.000.000	8.067.700	4.878.200	13.314.000	8.892.000	0,72	1	0,98	0,89	-0,57	-0,4	1,77	1,73	-0,26	0,33
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.655.700	6.993.250	14.491.800	10.000.000	22.410.000	6.943.250	14.375.000	9.868.000	0,95	0,99	0,99	0,99	-0,7	-0,69	1,07	1,07	-0,31	0,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.750.000	4.370.250	7.750.000	5.945.000	9.750.000	4.370.000	7.750.000	5.891.890	1	1	1	0,99	-0,55	-0,55	0,77	0,77	-0,23	0,24

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	19.201.800	33.229.750	12.178.000	8.610.000	18.753.080	32.509.750	10.525.720	7.101.000	0,98	0,98	0,86	0,82	0,73	0,73	0,63	0,68	-0,29	0,33
Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan	132.920.956.291	119.267.957.361	119.348.798.838	199.654.563.400	128.329.523.696	108.736.522.676	109.215.702.713	185.649.479.409	0,97	0,91	0,92	0,93	-0,1	-0,15	0	0	0,67	0,7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	131.378.076.291	118.068.007.361	118.130.318.838	197.848.323.400	126.786.643.696	107.539.752.676	108.120.202.713	184.316.819.409	0,97	0,91	0,92	0,93	-0,1	-0,15	0	0,01	0,67	0,7
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.542.880.000	1.199.950.000	1.218.480.000	1.806.240.000	1.542.880.000	1.196.770.000	1.095.500.000	1.332.660.000	1	1	0,9	0,74	-0,22	-0,22	0,02	0,08	0,48	0,22
Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	363.465.250	382.719.000	405.988.000	393.134.200	345.709.750	354.212.830	365.884.708	387.082.034	0,95	0,93	0,9	0,98	0,05	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,06
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	327.141.000	367.708.000	384.079.200	382.829.200	309.385.500	339.221.955	347.924.308	376.832.184	0,95	0,92	0,91	0,98	0,12	0,1	0,04	0,03	0	0,08

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.324.250	15.011.000	21.908.800	10.305.000	36.324.250	14.990.875	17.960.400	10.249.850	1	1	0,82	0,99	-0,59	-0,59	0,46	0,2	-0,53	-0,43
Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan	257.977.950	73.794.000	22.686.000	-	249.229.950	64.291.000	20.697.750	-	0,97	0,87	0,91	0	-0,71	-0,74	-0,69	-0,68	-1	-1
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	243.544.250	53.641.000	22.686.000	-	236.596.250	50.616.000	20.697.750	-	0,97	0,94	0,91	0	-0,78	-0,79	-0,58	-0,59	-1	-1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.433.700	20.153.000	-	-	12.633.700	13.675.000	-	-	0,88	0,68	0	0	0,4	0,08	-1	-1	0	0
Administrasi Umum Dinas Kesehatan	390.428.512	567.955.740	657.246.937	1.131.498.000	288.593.392	374.182.687	571.158.834	1.017.677.290	0,74	0,66	0,87	0,9	0,45	0,3	0,16	0,53	0,72	0,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.493.628	35.000.000	25.092.800	34.320.000	19.493.628	22.861.451	23.391.300	33.962.000	1	0,65	0,93	0,99	0,8	0,17	-0,28	0,02	0,37	0,45

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	156.809.500	542.262.000	-	-	149.745.000	520.120.000	0	0	0,95	0,96	0	0			2,46	2,47
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.761.884	113.619.740	125.403.117	115.840.000	55.421.000	99.148.600	96.699.100	107.650.500	0,82	0,87	0,77	0,93	0,68	0,79	0,1	-0,02	-0,08	0,11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.130.000	64.630.000	48.066.320	52.252.000	75.130.000	64.628.500	38.225.900	32.841.000	1	1	0,8	0,63	-0,14	-0,14	-0,26	-0,41	0,09	-0,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	17.100.000	19.000.000	5.615.200	7.410.000	17.100.000	14.175.000	3.980.000	3.780.000	1	0,75	0,71	0,51	0,11	-0,17	-0,7	-0,72	0,32	-0,05
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.630.000	29.995.000	29.975.000	40.040.000	10.628.200	26.117.850	20.716.650	30.539.450	1	0,87	0,69	0,76	1,82	1,46	0	-0,21	0,34	0,47
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.313.000	305.711.000	266.285.000	339.374.000	110.820.564	147.251.286	238.400.884	288.784.340	0,55	0,48	0,9	0,85	0,53	0,33	-0,13	0,62	0,27	0,21

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	2.610.638.900	-	-	-	2.492.175.000	0	0	0	0,95	0	0	0	0	0	
Pengadaan Mebel	-	-	-	510.639.000	-	-	-	462.623.000	0	0	0	0,91	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	2.099.999.900	-	-	-	2.029.552.000	0	0	0	0,97	0	0	0	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.575.458.136	1.609.101.050	1.688.191.080	1.697.613.880	1.482.332.406	1.578.822.947	1.649.914.417	1.611.824.999	0,94	0,98	0,98	0,95	0,02	0,07	0,05	0,05	0,01	- 0,02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.000.000	9.050.400	1.000.000	-	1.000.000	8.300.000	990			0,92	0,99			8,05	7,3	-0,89	- 0,88

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	698.168.136	779.997.450	849.986.280	868.949.280	617.656.368	753.790.062	813.634.121	847.550.622	0,88	0,97	0,96	0,98	0,12	0,22	0,09	0,08	0,02	0,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.290.000	828.103.600	829.154.400	827.664.600	864.676.038	824.032.885	827.980.296	763.284.377	0,99	1	1	0,92	-0,06	-0,05	0	0	0	- 0,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.760.014.000	3.469.065.850	3.278.041.300	5.487.493.013	4.376.627.986	3.200.951.224	3.041.344.673	4.841.521.908	0,92	0,92	0,93	0,88	-0,27	-0,27	- 0,06	- 0,05	0,67	0,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.164.000	25.000.000	40.390.000	24.000.000	19.372.300	17.919.650	40.156.000	23.632.500	0,92	0,72	0,99	0,98	0,18	-0,07	0,62	1,24	-0,41	- 0,41

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.441.120.000	1.449.195.850	1.399.612.000	1.537.870.000	1.431.720.999	1.400.896.200	1.377.728.700	1.509.431.100	0,99	0,97	0,98	0,98	0,01	-0,02	- 0,03	- 0,02	0,1	0,1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.320.000	264.870.000	209.108.900	398.178.000	87.204.300	234.727.820	170.431.170	326.655.260	0,95	0,89	0,82	0,82	1,9	1,69	- 0,21	- 0,27	0,9	0,92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.206.410.000	1.730.000.000	1.628.930.400	3.527.445.013	2.838.330.387	1.547.407.553,72	1.453.028.803	2.981.803.048	0,89	0,89	0,89	0,85	-0,46	-0,45	- 0,06		1,17	1,05
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bungus	1.621.839.900	1.586.566.377	1.400.000.000	1.986.373.816	1.352.442.855	1.351.226.118	1.268.255.774	1.977.131.642	0,83	0,85	0,91	1	-0,02	0	- 0,12	- 0,06	0,42	0,56

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bungus	1.621.839.900	1.586.566.377	1.400.000.000	1.986.373.816	1.352.442.855	1.351.226.118	1.268.255.774	1.977.131.642	0,83	0,85	0,91	1	-0,02	0	-0,12	-0,06	0,42	0,56
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lubuk Kilangan	1.871.877.943	1.500.000.000	1.500.000.000	1.890.066.360	1.455.641.539	1.363.580.244	1.499.042.542	1.735.415.897	0,78	0,91	1	0,92	-0,2	-0,06	0	0,1	0,26	0,16
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lubuk Kilangan	1.871.877.943	1.500.000.000	1.500.000.000	1.890.066.360	1.455.641.539	1.363.580.244	1.499.042.542	1.735.415.897	0,78	0,91	1	0,92	-0,2	-0,06	0	0,1	0,26	0,16
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lubuk Begalung	2.225.601.080	1.800.977.123	2.056.295.098	2.100.322.342	1.835.786.257	1.718.546.392	2.019.991.721	2.034.803.713	0,82	0,95	0,98	0,97	-0,19	-0,06	0,14	0,18	0,02	0,01
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lubuk Begalung	2.225.601.080	1.800.977.123	2.056.295.098	2.100.322.342	1.835.786.257	1.718.546.392	2.019.991.721	2.034.803.713	0,82	0,95	0,98	0,97	-0,19	-0,06	0,14	0,18	0,02	0,01

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pegambiran	1.568.918.565	1.390.012.090	1.550.000.000	1.559.597.830	1.300.303.229	1.221.909.199	1.443.686.695	1.480.028.289	0,83	0,88	0,93	0,95	-0,11	-0,06	0,12	0,18	0,01	0,03
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegambiran	1.568.918.565	1.390.012.090	1.550.000.000	1.559.597.830	1.300.303.229	1.221.909.199	1.443.686.695	1.480.028.289	0,83	0,88	0,93	0,95	-0,11	-0,06	0,12	0,18	0,01	0,03
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Seberang Padang	1.177.833.347	1.015.472.024	1.150.000.000	1.343.187.104	989.439.337	918.802.147	1.047.290.587	1.235.199.911	0,84	0,9	0,91	0,92	-0,14	-0,07	0,13	0,14	0,17	0,18
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Seberang Padang	1.177.833.347	1.015.472.024	1.150.000.000	1.343.187.104	989.439.337	918.802.147	1.047.290.587	1.235.199.911	0,84	0,9	0,91	0,92	-0,14	-0,07	0,13	0,14	0,17	0,18
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pemancungan	1.142.849.239	941.192.190	910.000.000	998.628.821	847.855.955	889.163.759	869.578.528	833.169.444	0,74	0,94	0,96	0,83	-0,18	0,05	0,03	0,02	0,1	0,04

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pemancungan	1.142.849.239	941.192.190	910.000.000	998.628.821	847.855.955	889.163.759	869.578.528	833.169.444	0,74	0,94	0,96	0,83	-0,18	0,05	-0,03	-0,02	0,1	-0,04
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawang	949.223.274	862.170.540	850.000.000	966.619.374	769.532.539	758.426.678	845.513.134	892.123.258	0,81	0,88	0,99	0,92	-0,09	-0,01	-0,01	0,11	0,14	0,06
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rawang	949.223.274	862.170.540	850.000.000	966.619.374	769.532.539	758.426.678	845.513.134	892.123.258	0,81	0,88	0,99	0,92	-0,09	-0,01	-0,01	0,11	0,14	0,06
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Andalas	2.926.254.091	2.501.905.530	2.500.000.000	2.660.419.766	2.458.931.046	2.434.009.768	2.459.126.541	2.612.745.625	0,84	0,97	0,98	0,98	-0,15	-0,01	0	0,01	0,06	0,06
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Andalas	2.926.254.091	2.501.905.530	2.500.000.000	2.660.419.766	2.458.931.046	2.434.009.768	2.459.126.541	2.612.745.625	0,84	0,97	0,98	0,98	-0,15	-0,01	0	0,01	0,06	0,06

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Padang Pasir	2.081.675.836	1.707.848.525	2.082.050.000	2.052.321.659	1.662.993.409	1.679.838.461	2.048.652.784	1.995.086.714	0,8	0,98	0,98	0,97	-0,18	0,01	0,22	0,22	-0,01	-0,03
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padang Pasir	2.081.675.836	1.707.848.525	2.082.050.000	2.052.321.659	1.662.993.409	1.679.838.460,64	2.048.652.784	1.995.086.714	0,8	0,98	0,98	0,97	-0,18	0,01	0,22	#VALUE!	-0,01	-0,03
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ulak Karang	989.619.383	902.279.034	880.000.000	1.007.556.968	725.144.756	802.095.913	813.725.677	911.284.875	0,73	0,89	0,92	0,9	-0,09	0,11	-0,02	0,01	0,14	0,12
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ulak Karang	989.619.383	902.279.034	880.000.000	1.007.556.968	725.144.756	802.095.913	813.725.677	911.284.875	0,73	0,89	0,92	0,9	-0,09	0,11	-0,02	0,01	0,14	0,12
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tawar	716.861.067	734.685.130	650.000.000	836.079.618	514.210.198	599.568.173	610.171.354	791.771.812	0,72	0,82	0,94	0,95	0,02	0,17	-0,12	0,02	0,29	0,3

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tawar	716.861.067	734.685.130	650.000.000	836.079.618	514.210.198	599.568.173	610.171.354	791.771.812	0,72	0,82	0,94	0,95	0,02	0,17	0,12	0,02	0,29	0,3
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Alai	1.028.461.167	909.303.558	950.000.000	1.171.223.741	824.125.280	854.920.986	890.392.127	1.121.657.213	0,8	0,94	0,94	0,96	-0,12	0,04	0,04	0,04	0,23	0,26
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Alai	1.028.461.167	909.303.558	950.000.000	1.171.223.741	824.125.280	854.920.986	890.392.127	1.121.657.213	0,8	0,94	0,94	0,96	-0,12	0,04	0,04	0,04	0,23	0,26
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nanggalo	1.403.181.843	1.200.000.000	1.400.000.000	1.765.145.787	1.101.075.596	1.176.191.871	1.363.938.738	1.550.887.313	0,78	0,98	0,97	0,88	-0,14	0,07	0,17	0,16	0,26	0,14
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Nanggalo	1.403.181.843	1.200.000.000	1.400.000.000	1.765.145.787	1.101.075.596	1.176.191.871	1.363.938.738	1.550.887.313	0,78	0,98	0,97	0,88	-0,14	0,07	0,17	0,16	0,26	0,14

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lapai	817.288.037	675.823.132	710.000.000	933.320.274	676.303.348	620.056.400	685.806.323	803.141.786	0,83	0,92	0,97	0,86	-0,17	-0,08	0,05	0,11	0,31	0,17
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lapai	817.288.037	675.823.132	710.000.000	933.320.274	676.303.348	620.056.400	685.806.323	803.141.786	0,83	0,92	0,97	0,86	-0,17	-0,08	0,05	0,11	0,31	0,17
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Belimbing	1.862.606.671	1.604.043.374	1.550.000.000	1.752.680.034	1.460.271.084	1.490.749.786	1.515.105.730	1.571.135.953	0,78	0,93	0,98	0,9	-0,14	0,02	-0,03	0,02	0,13	0,04
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Belimbing	1.862.606.671	1.604.043.374	1.550.000.000	1.752.680.034	1.460.271.084	1.490.749.786	1.515.105.730	1.571.135.953	0,78	0,93	0,98	0,9	-0,14	0,02	-0,03	0,02	0,13	0,04
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kuranji	1.611.045.397	1.309.024.986	1.550.000.000	1.475.933.346	1.220.692.971	1.290.120.941	1.330.102.108	1.338.162.237	0,76	0,99	0,86	0,91	-0,19	0,06	0,18	0,03	-0,05	0,01

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuha n 2021-2022		Rara-rata Pertumbuh an 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realisasi	Ang ga ran	Realisasi	Angg aran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kuranji	1.611.045.397	1.309.024.986	1.550.000.000	1.475.933.346	1.220.692.971	1,290,120,941,42	1.330.102.108	1.338.162.237	0,76	0,99	0,86	0,91	-0,19	0,06	0,18	!	-0,05	0,01
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ambacang	1.637.884.681	1.466.863.888	1.664.904.980	1.631.110.846	1.362.902.946	1.335.424.364	1.638.884.023	1.588.336.591	0,83	0,91	0,98	0,97	-0,1	-0,02	0,14	0,23	-0,02	- 0,03
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ambacang	1.637.884.681	1.466.863.888	1.664.904.980	1.631.110.846	1.362.902.946	1.335.424.364	1.638.884.023	1.588.336.591	0,83	0,91	0,98	0,97	-0,1	-0,02	0,14	0,23	-0,02	- 0,03
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pauh	2.236.746.712	2.098.182.545	1.970.845.200	2.481.999.145	1.868.914.825	1.925.472.434	1.825.862.726	2.225.317.938	0,84	0,92	0,93	0,9	-0,06	0,03	- 0,06	- 0,05	0,26	0,22
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pauh	2.236.746.712	2.098.182.545	1.970.845.200	2.481.999.145	1.868.914.825	1.925.472.434	1.825.862.726	2.225.317.938	0,84	0,92	0,93	0,9	-0,06	0,03	- 0,06	- 0,05	0,26	0,22

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Air Dingin	2.048.688.820	1.838.143.035	1.700.000.000	2.185.211.964	1.704.891.028	1.588.639.794	1.625.066.814	2.150.445.824	0,83	0,86	0,96	0,98	-0,1	-0,07	-0,08	0,02	0,29	0,32
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Air Dingin	2.048.688.820	1.838.143.035	1.700.000.000	2.185.211.964	1.704.891.028	1.588.639.794	1.625.066.814	2.150.445.824	0,83	0,86	0,96	0,98	-0,1	-0,07	-0,08	0,02	0,29	0,32
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lubuk Buaya	2.823.030.850	2.495.012.451	2.931.000.000	3.137.018.311	2.442.502.788	2.445.348.041	2.832.433.972	3.110.829.502	0,87	0,98	0,97	0,99	-0,12	0	0,17	0,16	0,07	0,1
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lubuk Buaya	2.823.030.850	2.495.012.451	2.931.000.000	3.137.018.311	2.442.502.788	2.445.348.041	2.832.433.972	3.110.829.502	0,87	0,98	0,97	0,99	-0,12	0	0,17	0,16	0,07	0,1
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas KPIK	870.579.105	776.039.790	850.000.000	1.132.988.555	708.607.290	710.650.489	814.085.937	1.004.513.111	0,81	0,92	0,96	0,89	-0,11	0	0,1	0,15	0,33	0,23

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas KPIK	870.579.105	776.039.790	850.000.000	1.132.988.555	708.607.290	710.650.489	814.085.937	1.004.513.111	0,81	0,92	0,96	0,89	-0,11	0	0,1	0,15	0,33	0,23
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Anak Air	1.107.697.164	990.327.492	971.292.001	1.451.252.648	865.602.691	914.545.600	899.634.228	1.333.827.800	0,78	0,92	0,93	0,92	-0,11	0,06	-0,02	-0,02	0,49	0,48
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Anak Air	1.107.697.164	990.327.492	971.292.001	1.451.252.648	865.602.691	914.545.600	899.634.228	1.333.827.800	0,78	0,92	0,93	0,92	-0,11	0,06	-0,02	-0,02	0,49	0,48
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Dadok Tunggul Hitam	780.235.828	624.089.115	680.000.000	1.036.747.891	599.068.323	599.970.073	671.793.006	913.513.391	0,77	0,96	0,99	0,88	-0,2	0	0,09	0,12	0,52	0,36
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Dadok Tunggul Hitam	780.235.828	624.089.115	680.000.000	1.036.747.891	599.068.323	599.970.073	671.793.006	913.513.391	0,77	0,96	0,99	0,88	-0,2	0	0,09	0,12	0,52	0,36

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Parak Karakah	-	-	300.000.000	699.414.290		-	238.621.633	648.951.069			0,8	0,93					1,33	1,72
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Parak Karakah	-	-	300.000.000	699.414.290		-	238.621.633	648.951.069			0,8	0,93					1,33	1,72
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	98.693.820.178	53.694.656.877	57.459.906.058	67.065.617.000	68.245.560.532	46.747.634.788	49.684.310.139	58.569.540.245	0,69	0,87	0,86	0,87	-0,46	-0,32	0,07	0,06	0,17	0,18
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.189.967.360	14.455.945.335	13.155.438.818	15.006.844.900	20.648.526.385	12.886.508.168	11.946.299.637	14.411.505.224	0,76	0,89	0,91	0,96	-0,47	-0,38	0,09	0,07	0,14	0,21
Pembangunan Puskesmas	6.119.235.450	-	-	248.220.000	5.008.546.150	-	-	246.357.250	0,82		0	0,99	-1	-1	0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Puskesmas	5.172.718.334	-	-	-	4.717.956.560	-	-	-	0,91		0	0	-1	-1	0	0	0	0
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	80.000.000	-	-	-	75.409.000			0	0,94			0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	6.612.107.457	2.362.759.821	4.089.964.500	-	6.323.323.500	2.299.509.630	4.074.799.950			0,97	1			- 0,64	- 0,64	0,73	0,77
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.132.477.400	662.062.906	867.410.800	-	3.863.736.450	658.390.120	858.176.000	-	0,93	0,99	0,99	0	-0,84	-0,83	0,31	0,3	-1	-1
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	484.331.000	2.494.031.200	3.610.008.220	2.488.091.700	446.012.300	1.957.264.875	3.570.907.300	2.074.049.650	0,92	0,78	0,99	0,83	4,15	3,39	0,45	0,82	-0,31	- 0,42

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	348.177.900	-	-	-	298.959.250			0	0,86			0	0	0	0
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	7.556.287.800	-	-	-	7.455.903.724			0	0,99			0	0	0	0
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-			0	0	-1		0	0	0	0
Pengadaan Obat Vaksin	3.053.370.777	2.612.988.811	2.903.910.050	-	2.212.281.919	2.471.168.391	2.860.493.151	-	0,72	0,95	0,99	0	-0,14	0,12	0,11	0,16	-1	-1

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.077.834.399	2.074.754.961	3.411.349.927		4.399.993.006	1.476.361.282	2.357.213.556	-	0,54	0,71	0,69	0	-0,74	-0,66	0,64	0,6	-1	-1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-	-	23.115.000	-	-	-	21.543.000			0	0,93			0	0	0	0
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	172.988.000	-	-	-	164.483.400			0	0,95			0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.147.067.768	38.464.545.242	44.003.447.240	51.455.198.700	47.041.109.747	33.103.936.070	37.607.736.034	43.667.929.039	0,67	0,86	0,85	0,85	-0,45	-0,3	0,14	0,14	0,17	0,16

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.298.819.600	2.205.396.950	1.959.399.100	1.589.421.000	951.857.450	1.830.062.940	1.756.619.150	1.398.816.350	0,73	0,83	0,9	0,88	0,7	0,92	- 0,11	- 0,04	-0,19	-0,2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.085.452.000	283.921.094	72.000.000	382.662.800	623.682.884	125.974.800	51.300.000	339.855.300	0,57	0,44	0,71	0,89	-0,74	-0,8	- 0,75	- 0,59	4,31	5,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	156.885.000	16.290.000	23.691.000	16.760.000	108.000.000	2.850.000	23.691.000	16.720.000	0,69	0,17	1	1	-0,9	-0,97	0,45	7,31	-0,29	- 0,29
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	694.657.000	278.959.700	935.950.000	164.600.000	481.032.250	246.655.800	794.560.000	140.025.000	0,69	0,88	0,85	0,85	-0,6	-0,49	2,36	2,22	-0,82	- 0,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	622.148.250	977.710.250	889.636.165	994.445.000	412.140.830	915.069.250	853.468.900	618.965.000	0,66	0,94	0,96	0,62	0,57	1,22	- 0,09	- 0,07	0,12	- 0,27
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	257.097.325	229.987.000	248.250.000	43.622.000	196.452.825	161.574.796	184.650.000	42.577.000	0,76	0,7	0,74	0,98	-0,11	-0,18	0,08	0,14	-0,82	- 0,77

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	382.548.750	61.040.850	364.538.000	60.000.000	222.198.750	59.741.500	325.466.000	59.099.000	0,58	0,98	0,89	0,98	-0,84	-0,73	4,97	4,45	-0,84	-0,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	282.956.180	3.900.000	4.680.000	41.671.000	258.654.450	3.900.000	4.092.000	38.719.500	0,91	1	0,87	0,93	-0,99	-0,98	0,2	0,05	7,9	8,46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.821.000	6.000.000	923.006.000	1.603.600.000	12.566.000	6.000.000	921.500.000	1.602.565.000	0,79	1	1	1	-0,62	-0,52	152,83	152,58	0,74	0,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.247.000	68.268.000	63.333.000	320.176.000	12.651.000	57.768.000	59.090.250	74.224.894	0,46	0,85	0,93	0,23	1,51	3,57	-0,07	0,02	4,06	0,26
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	290.147.500	158.794.000	2.777.255.000	2.666.146.100	173.212.000	131.772.750	186.922.000	2.609.128.250	0,6	0,83	0,07	0,98	-0,45	-0,24	16,49	0,42	-0,04	12,96

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	394.061.500	120.879.800	706.810.000	429.409.000	118.321.500	106.402.450	380.294.000	409.666.364	0,3	0,88	0,54	0,95	-0,69	-0,1	4,85	2,57	-0,39	0,08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DAK)	6.271.243.100	-	9.940.000	31.250.000	2.205.302.400	-	8.140.000	21.659.000	0,35	#DIV/0!	0,82	0,69	-1	-1			2,14	1,66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.911.661.000	3.613.637.000	1.142.988.500	4.483.457.000	2.255.608.357	3.279.673.399	949.203.850	2.803.275.642	0,77	0,91	0,83	0,63	0,24	0,45	0,68	0,71	2,92	1,95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	155.064.100	139.438.250	149.306.100	45.600.000	82.330.850	85.241.450	120.120.000	32.657.500	0,53	0,61	0,8	0,72	-0,1	0,04	0,07	0,41	-0,69	0,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.426.726.850	292.488.228	416.822.800	1.294.245.000	257.529.600	279.369.300	372.659.500	1.072.809.850	0,18	0,96	0,89	0,83	-0,79	0,08	0,43	0,33	2,11	1,88

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	387.710.100	-	346.641.000	189.359.000	268.003.700	-	210.072.000	146.923.500	0,69		0,61	0,78	-1	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	-0,45	-0,3
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	24.376.000	5.754.500	13.320.000	42.440.000	19.316.000	5.743.430	12.794.500	37.397.500	0,79	1	0,96	0,88	-0,76	-0,7	1,31	1,23	2,19	1,92
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	169.724.050	1.208.757.610	320.700.000	967.593.200	46.202.950	302.732.800	234.300.000	735.896.450	0,27	0,25	0,73	0,76	6,12	5,55	0,73	0,23	2,02	2,14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	52.952.000	-	-	-	49.433.500	-			0,93	0			0	0	-1	-1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	236.222.150	51.098.750	24.618.000	110.663.000	167.275.850	26.331.750	15.893.350	99.817.000	0,71	0,52	0,65	0,9	-0,78	-0,84	0,52	-0,4	3,5	5,28

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	67.345.500	445.080.528	15.210.500	-	53.707.750	394.448.300	14.906.800	-	0,8	0,89	0,98	####	5,61	6,34	0,97 ⁻	0,96 ⁻	-1	-1
Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	59.680.450	191.083.901	4.664.400	-	58.506.950	86.234.900	4.499.800	-	0,98	0,45	0,96	####	2,2	0,47	0,98 ⁻	0,95 ⁻	-1	-1
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.058.263.325	1.760.038.270	3.001.533.000	4.861.996.500,00	1.128.970.825	1.520.562.460	2.554.466.100	4.025.594.616	0,55	0,86	0,85	0,83	-0,14	0,35	0,71	0,68	0,62	0,58
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.994.253.538	25.466.816.861	25.518.221.000	26.472.854.000	23.983.081.700	22.722.286.600	24.575.891.000	23.790.808.200	0,96	0,89	0,96	0,9	0,02	-0,05	0	0,08	0,04	0,03 ⁻
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	-	-	-	5.950.000	-	-	-	5.775.000			0	0,97			0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	47.500.000	-	58.950.000	6.420.000	25.800.000	-	9.300.000	501.456	0,54		0,16	0,08	-1	-1	0	0	-0,89	-0,95
Operasional Pelayanan Puskesmas	14.788.827.500	561.842.000	2.821.907.475	2.050.009.500	10.167.054.400	469.544.345	2.017.888.553	1.645.394.122	0,69	0,84	0,72	0,8	-0,96	-0,95	4,02	3,3	-0,27	-0,18
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.071.120.000	205.806.000	333.593.800	210.324.000	639.037.079	174.902.100	323.929.850	154.293.500	0,08	0,85	0,97	0,73	-0,97	-0,73	0,62	0,85	-0,37	-0,52
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	450.320.000	24.998.250	606.367.200	172.626.000	30.875.000	24.998.250	429.810.431	141.140.015	0,07	1	0,71	0,82	-0,94	-0,19	23,26	16,19	-0,72	-0,67

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat)	42.900.000	-	21.600.000	25.950.000	4.500.000	-	6.900.000	7.450.000	0,1		0,32	0,29	-1	-1	0	0	0,2	0,08
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	-	-	32.880.000	-	-	-	29.291.000			0	0,89			0	0	0	0
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.476.289.000	86.557.450	121.863.200	90.729.000	2.077.236.397	84.094.700	111.923.500	86.824.650	0,84	0,97	0,92	0,96	-0,97	-0,96	0,41	0,33	-0,26	-0,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	-	-	53.700.000	76.540.000	-	-	43.950.000	59.455.000			0,82	0,78			0	0	0,43	0,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (Odhiv)	-	-	-	25.665.000	-	-	-	16.821.500			0	0,66			0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	-	-	-	43.998.800	-	-	-	43.648.730			0	0,99			0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	135.810.000	-	-	-	88.230.000			0	0,65			0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota	-	-	-	13.101.000	-	-	-	8.455.500			0	0,65			0	0	0	0
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	1.753.224.800	-	-	-	1.263.447.650			0	0,72			0	0	0	0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	175.529.800	139.007.000	167.885.000	134.328.400	138.409.800	126.217.250	11.100.000	115.905.300	0,79	0,91	0,07	0,86	-0,21	-0,09	0,21	-0,91	-0,2	9,44
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	25.699.000	104.623.500	163.835.000	-	21.515.300	93.613.500	7.050.000	-	0,84	0,89	0,04	0	3,07	3,35	0,57	-0,92	-1	-1

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	149.830.800	34.383.500	4.050.000	134.328.400	116.894.500	32.603.750	4.050.000	115.905.300	0,78	0,95	1	0,86	-0,77	-0,72	0,88 ⁻	0,88 ⁻	32,17	27,6 ₂
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.181.255.250	635.159.300	133.135.000	469.245.000	417.514.600	630.973.300	119.174.468	374.200.682	0,35	0,99	0,9	0,8	-0,46	0,51	0,79 ⁻	0,81 ⁻	2,52	2,14
Peningkatan tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	79.924.000	-	-	-	67.581.805			0	0,85			0	0	0	0
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.128.511.650	612.042.750	81.789.000	389.321.000	376.100.500	607.856.750	72.956.510	306.618.877	0,33	0,99	0,89	0,79	-0,46	0,62	0,87 ⁻	0,88 ⁻	3,76	3,2
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	52.743.600	23.116.550	51.346.000	-	41.414.100	23.116.550	46.217.958	-	0,79	1	0,9	0	-0,56	-0,44	1,22	1	-1	-1

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.213.800.940	77.109.100	958.644.200	1.629.704.200	5.585.899.382	77.045.350	903.305.030	1.344.621.700	0,77	1	0,94	0,83	-0,99	-0,99	11,4 ₃	10,7 ₂	0,7	0,49
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	12.935.450	11.435.100	1.863.500	7.000.000	12.035.450	11.435.100	1.755.000	6.335.000	0,93	1	0,94	0,91	-0,12	-0,05	0,84 ⁻	0,85 ⁻	2,76	2,61
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12.935.450	11.435.100	1.863.500	7.000.000	12.035.450	11.435.100	1.755.000	6.335.000	0,93	1	0,94	0,91	-0,12	-0,05	0,84 ⁻	0,85 ⁻	2,76	2,61
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	6.461.571.490	-	144.984.000	273.530.000	4.940.714.482	-	136.912.500	214.569.050	0,76		0,94	0,78	-1	-1	0	0	0,89	0,57

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.461.571.490	-	5.180.000	17.392.000	4.940.714.482	-	4.250.250	15.475.000	0,76		0,82	0,89	-1	-1	0	0	2,36	2,64
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	139.804.000	256.138.000	-	-	132.662.250	199.094.050			0,95	0,78	0	0	0	0	0,83	0,5
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.294.000	65.674.000	811.796.700	1.349.174.200	633.149.450	65.610.250	764.637.530	1.123.717.650	0,86	1	0,94	0,83	-0,91	-0,9	11,36	10,65	0,66	0,47
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.294.000	65.674.000	811.796.700	1.349.174.200	633.149.450	65.610.250	764.637.530	1.123.717.650	0,86	1	0,94	0,83	-0,91	-0,9	11,36	10,65	0,66	0,47

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	422.321.950	379.486.855	473.615.000	545.344.000	351.057.100	363.655.389	473.474.700	543.202.650	0,83	0,96	1	1	-0,1	0,04	0,25	0,3	0,15	0,15
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150.966.200	56.830.290	84.467.000	63.730.000	146.600.100	56.830.084	84.392.000	63.643.000	0,97	1	1	1	-0,62	-0,61	0,49	0,48	-0,25	-0,25
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	129.299.200	4.612.500	-	63.730.000	126.898.350	4.612.500	-	63.643.000	0,98	1		1	-0,96	-0,96	-1	-1	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21.667.000	52.217.790	84.467.000	-	19.701.750	52.217.584	84.392.000	-	0,91	1	1	####	1,41	1,65	0,62	0,62	-1	-1
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	154.845.750	215.504.565	230.265.000	288.100.000	140.123.000	207.054.397	230.260.000	288.100.000	0,9	0,96	1	1	0,39	0,48	0,07	0,11	0,25	0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	154.845.750	215.504.565	230.265.000	288.100.000	140.123.000	207.054.397	230.260.000	288.100.000	0,9	0,96	1	1	0,39	0,48	0,07	0,11	0,25	0,25
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri rumah Tangga	116.510.000	107.152.000	158.883.000	193.514.000	64.334.000	99.770.908	158.822.700	191.459.650	0,55	0,93	1	0,99	-0,08	0,55	0,48	0,59	0,22	0,21

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuha n 2021-2022		Rara-rata Pertumbuh an 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realisasi	Ang ga ran	Realisasi	Angg aran	Realisasi
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Inndustri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	116.510.000	107.152.000	158.883.000	193.514.000	64.334.000	99.770.908	158.822.700	191.459.650	0,55	0,93	1	0,99	-0,08	0,55	0,48	0,59	0,22	0,21
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.071.609.200	2.751.257.300	2.266.807.100	1.429.434.000	1.269.596.998	2.546.025.950	1.940.785.550	1.296.551.400	0,61	0,93	0,86	0,91	0,33	1,01	0,18 ⁻	0,24 ⁻	-0,37	0,33 ⁻
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.883.800	2.423.757.600	1.116.351.000	1.161.135.000	918.784.248	2.359.407.600	1.062.210.750	1.086.893.150	0,61	0,97	0,95	0,94	0,61	1,57	0,54 ⁻	0,55 ⁻	0,04	0,02

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.500.883.800	2.423.757.600	1.116.351.000	1.161.135.000	918.784.248	2.359.407.600	1.062.210.750	1.086.893.150	0,61	0,97	0,95	0,94	0,61	1,57	- 0,54	- 0,55	0,04	0,02
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.531.000	327.499.700	88.971.100	80.626.000	52.781.000	186.618.350	84.384.800	59.290.200	0,97	0,57	0,95	0,74	5,01	2,54	- 0,73	- 0,55	-0,09	-0,3
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	54.531.000	327.499.700	88.971.100	80.626.000	52.781.000	186.618.350	84.384.800	59.290.200	0,97	0,57	0,95	0,74	5,01	2,54	- 0,73	- 0,55	-0,09	-0,3
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	516.194.400	-	1.061.485.000	187.673.000	298.031.750	-	794.190.000	150.368.050	0,58		0,75	0,8	-1	-1	0	0	-0,82	- 0,81

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan 2021-2022		Rara-rata Pertumbuhan 2022-2023		Rara-rata Pertumbuhan 2023-2024	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaa Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	516.194.400	-	1.061.485.000	187.673.000	298.031.750	-	794.190.000	150.368.050	0,58		0,75	0,8	-1	-1	0	0	-0,82	-0,81
Jumlah	284.301.135.007	213.270.966.512	219.399.851.792	319.972.631.083	239.392.258.261,89	192.799.705.421,83	199.192.924.686	293.661.689.933	0,84	0,9	0,91	0,92	-0,25	-0,19	0,03	0	0,46	0,47

Sumber : Dinas Kesehatan

Terdapat penurunan anggaran dari Rp. 284.301.135.007 di tahun 2021 menjadi Rp. 213.270.966.512 di tahun 2022, namun penyerapannya meningkat di tahun 2022. Namun pada tahun 2022 sampai 2024 terjadi peningkatan anggaran dan penyerapan anggaran.

Tabel 2. 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr Rasidin Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaetn/Kota	104.582.553.822,00	117.300.997.333,00	104.658.292.329,00	88.990.898.736,00	87.887.981.186,00	115.183.242.538,00	100.897.808.197,00	86.658.604.446,00	7,10	7,71	7,75	7,75	-1,37	-0,87
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.659.528,00	32.606.000,00	14.032.250,00	-	75.669.000,00	28.866.600,00	14.028.000,00	-	0,87	0,89	1,00	1,00	-0,62	-0,62
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.890.000	8.458.500	2.360.000	-	11.914.000	8.050.400,00	2.360.000,00	-	0,92	0,95	1,00	1,00	-0,34	-0,32
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	40.705.200	9.663.850	4.384.250	-	32.751.000	7.788.800,00	4.380.000,00	-	0,80	0,81	1,00	1,00	-0,76	-0,76

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	-	5.567.400	2.792.000	-	-	4.876.400,00	2.792.000,00	-	-	0,88	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.590.115	5.396.150	4.496.000	-	20.974.000	5.005.000,00	4.496.000,00	-	0,97	0,93	1,00	1,00	-0,75	-0,76
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.474.213	3.520.100	-	-	10.030.000	3.146.000,00	-	-	0,87	0,89	-	-	-0,69	-0,69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.856.089.870	35.650.459.160	36.748.774.433	28.846.400.000	32.782.713.804	35.081.674.473	36.569.473.693	27.904.551.562	0,76	0,98	1,00	1,00	-0,17	0,07
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.418.359.870	35.433.779.160	36.320.074.433	28.545.240.000	32.494.933.804	34.864.994.473,00	36.145.533.693,00	27.612.945.062,00	0,77	0,98	1,00	1,00	-0,16	0,07

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	437.730.000	204.660.000	425.100.000	301.160.000	287.780.000	204.660.000,00	420.340.000,00	291.606.500,00	0,66	1,00	0,99	0,99	-0,53	-0,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	12.020.000	3.600.000	-	0	12.020.000,00	3.600.000,00	-	0	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	911.938.100	901.018.750	862.317.400	918.547.000	875.149.083	897.965.532	856.247.225	911.002.000	0,96	1,00	0,99	0,99	-0,01	0,03
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	882.503.100	896.518.750	862.317.400	918.547.000	853.156.683	893.465.532	856.247.225	911.002.000	0,97	1,00	0,99	0,99	0,02	0,05
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.435.000	4.500.000	-	-	21.992.400	4.500.000,00	-	-	0,75	1,00	-	-	-0,85	-0,80

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	51.160.810	1.350.000	7.601.300	-	41.650.900	1.350.000	7.037.200	-	0,81	1,00	0,93	0,93	-0,97	-0,97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.223.560	-	-	-	14.846.700	-	-	-	0,98	-	-	-	-1,00	-1,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31.161.500	1.350.000	4.832.500	-	24.530.000	1.350.000,00	4.500.000,00	-	0,79	1,00	0,93	0,93	-0,96	-0,94
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.775.750	-	2.768.800	-	2.274.200	-	2.537.200,00	-	0,48	-	-	-	-1,00	-1,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.595.806.781	1.162.717.294	559.135.300	614.250.000	1.514.753.348	1.150.203.091	515.207.398	596.727.049	0,95	0,99	0,92	0,92	-0,27	-0,24

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	168.902.505	109.410.825	101.661.000	-	158.395.600	109.381.412,00	88.581.500,00	-	0,94	1,00	0,87	0,87	-0,35	-0,31
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.794.156	-	-	464.250.000	264.600.840	-	-	448.789.000,00	0,83	-	-	-	-1,00	-1,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	537.022.120	482.027.069	230.513.300	-	533.449.708	470.662.371,00	203.355.080,00	-	0,99	0,98	0,88	0,88	-0,10	-0,12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	410.254.000	321.902.400	85.918.000	-	410.253.000	321.263.970,00	85.079.346,00	-	1,00	1,00	0,99	0,99	-0,22	-0,22

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.680.000	3.640.000	-	-	19.660.000	3.500.000,00	-	-	1,00	0,96	-	-	-0,82	-0,82
Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.375.000	17.682.000	18.761.000	-	19.982.500	17.605.700,00	18.470.000,00	-	0,70	1,00	0,98	0,98	-0,38	-0,12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.779.000	228.055.000	122.282.000	150.000.000	108.411.700	227.789.638,00	119.721.472,00	147.938.049,00	0,97	1,00	0,98	0,98	1,04	1,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.069.440.896	3.971.328.100	3.715.413.465	4.661.827.980	2.927.855.360	3.931.806.120	3.668.992.001	4.222.650.541	0,95	0,99	0,99	0,99	0,29	0,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.370.000	5.370.000	4.941.000	-	5.121.000	5.076.000	4.530.000	-						

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.253.454.496	2.855.383.800	2.600.700.965	3.760.599.882	2.169.434.360	2.825.485.390,00	2.574.872.101,00	3.345.637.165,00	0,96	0,99	0,99	0,99	0,27	0,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	810.616.400	1.110.574.300	1.109.771.500	901.228.098	753.300.000	1.101.244.730,00	1.089.589.900,00	877.013.376,00	0,93	0,99	0,98	0,98	0,37	0,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.886.478.100	2.935.345.400	2.657.090.900	2.634.706.000	2.582.981.656	2.579.224.255	2.618.719.403	2.580.139.293	0,89	0,88	0,99	0,99	0,02	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.100.000	17.200.000	17.200.000	-	12.210.949	14.079.562,00	14.547.002,00	-	0,71	0,82	0,85	0,85	0,01	0,15

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.185.000	377.429.350	274.943.000	402.306.000	297.611.850	289.317.845,00	274.719.309,00	391.564.390,00	0,72	0,77	1,00	1,00	-0,09	-0,03
Pemeliharaan Mebel	38.500.000	22.500.000	5.750.000	-	35.595.160	5.752.020,00	5.750.000,00	-	0,92	0,26	1,00	1,00	-0,42	-0,84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	409.501.800	353.386.050	148.527.400	-	365.163.700	297.678.150,00	130.125.040,00	-	0,89	0,84	0,88	0,88	-0,14	-0,18
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.005.191.300	2.164.830.000	2.210.670.500	2.232.400.000	1.872.399.997	1.972.396.678,00	2.193.578.052,00	2.188.574.903,00	0,93	0,91	0,99	0,99	0,08	0,05

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	53.124.979.737	72.646.172.629	60.093.927.281	51.315.167.756	47.087.208.035	71.512.152.467	56.648.103.277	50.443.534.001	0,89	0,98	0,94	0,94	0,37	0,52
Peningkatan Pelayanan BLUD														
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	53.124.979.737	72.646.172.629,00	60.093.927.281,00	51.315.167.756,00	47.087.208.035	71.512.152.467,00	56.648.103.277,00	50.443.534.001,00	0,89	0,98	0,94	0,94	0,37	0,52
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.313.189.802	4.978.029.650	15.799.690.683	5.137.412.500	10.330.494.058	4.571.379.299	15.366.689.329	-	2	3	3	3	-1	-0
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.937.800.860	3.750.004.400	8.286.217.175	5.137.412.500	9.167.216.159	3.557.274.779	8.022.258.254	-	0,84	0,95	0,97	0,97	-0,66	-0,61

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Rumah Sakit	-	-	1.531.374.625	5.137.412.500	6.841.094.269	207.117.800	1.529.651.709	5.129.020.440	#DIV/0!	0,00	1	1	#DIV/0!	-0,97
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.237.067.594	225.228.800	217.453.600	-	6.841.094.269	207.117.800	210.019.802	0	0,83	1	1	1	-0,97	-0,97
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.178.580.350	2.303.689.250	5.589.024.000	-	1.135.057.300	2.259.288.549	5.388.860.000	0	0,96	1	1	1	0,95	0,99
Pengadaan Bahan Habis Pakai	546.578.800	572.974.200,00	599.976.050,00	-	534.880.500	546.154.000,00	598.129.998,00	-	0,98					

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	407.402.840	347.931.950,00	249.999.900,00	-	244.116.000	336.634.853,00	238.325.740,00	-	0,60	0,97	0,95	0,95	-0,15	0,38
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	173.910.126	105.427.400,00	98.389.000,00	-	88.080.800	102.648.780,00	57.271.005,00	-	0,51	0,97	0,58	0,58	-0,39	0,17
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	394.261.150	194.752.800	-	-	323.987.290	105.430.797	0	0	0,82	1	0,00	0,00	-0,51	-0,67
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.107.672.872	1.075.955.050	7.458.923.758	-	1.055.148.959	868.970.570	7.299.853.375	-	0,95	0,81	0,98	0,98	-0,03	-0,18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.374.950	-	-	-	7.007.110	-	-	-	0,95	-	-	-	-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	7.733.750	-	-	-	6.554.130	-	-	-	0,85	-	-	-	-1,00	-1,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	548.880.000	593.060.000,00	416.683.300,00	-	515.011.540	389.741.717,00	395.511.222,00	-	0,94	0,66	0,95	0,95	0,08	-0,24
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	96.508.972	42.895.850,00	52.385.149,00	-	80.841.780	39.233.200,00	49.034.700,00	-	0,84	0,91	0,94	0,94	-0,56	-0,51
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	7.176.000	-	-	-	5.746.070	-	-	-	0,80	-	-	-	-1,00	-1,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	439.999.200	439.999.200,00	6.989.855.309,00	-	439.988.329	439.995.653,00	6.855.307.453,00	-	1,00	1,00	0,98	0,98	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	267.716.070	152.070.200	54.549.750	-	108.128.940	145.133.950	44.577.700	-	0,40	0,95	0,82	0,82	-0,43	0,34
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	267.716.070	152.070.200,00	54.549.750,00	-	108.128.940	145.133.950,00	44.577.700,00	-	0,40	0,95	0,82	0,82	-0,43	0,34
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.347.500.000	-	-	-	4.411.607.256	-	-	-	1	0	0	0	-2	-2
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.260.000.000	-	-	-	4.344.107.256	-	-	-	0,60	-	-	-	-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rara-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.260.000.000	-	-	-	4.344.107.256	-	-	-	0,60	-	-	-	-1,00	-1,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.500.000	-	-	-	67.500.000	-	-	-	0,77	-	-	-	-1,00	-1,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.500.000	-	-	-	67.500.000	-	-	-	0,77	-	-	-	-1,00	-1,00
Jumlah	124.243.243.624,00	122.279.026.983,00	120.457.983.012,00	94.128.311.236,00	102.630.082.500,00	119.754.621.837,00	116.264.497.526,00	86.658.604.446,00	10,66	10,42	10,51	10,51	-4,49	-3,32

Sumber : RSUD dr. Rasidin

RSUD dr Rasidin

1)Pelayanan Rawat Jalan

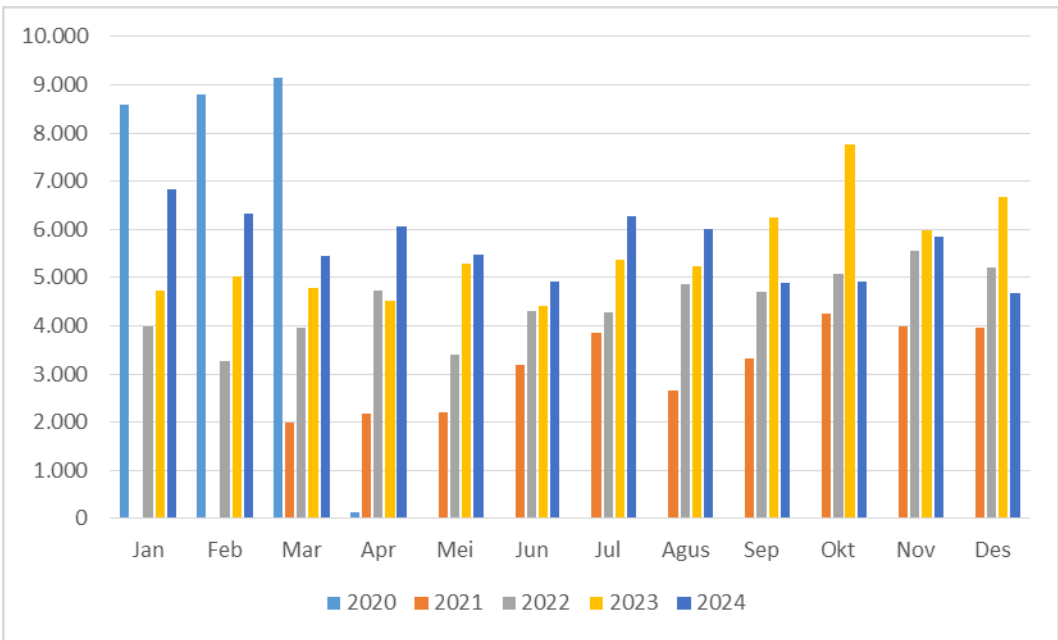
Jumlah kunjungan masyarakat untuk datang berobat ke poliklinik RSUD dr.Rasidin Padang dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring lengkapnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yaitu dokter spesialis yang semakin lengkap. Kinerja Pelayanan Rawat Jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Jumlah Kunjungan Poliklinik Dari Tahun 2020 s/d 2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Jan	8.595	0	3.996	4.720	6.838
Feb	8.789	0	3.272	5.030	6.320
Mar	9.146	1.989	3.953	4.790	5.450
Apr	139	2.185	4.735	4.525	6.052
Mei	0	2.204	3.406	5.296	5.463
Jun	0	3.185	4.300	4.400	4.904
Jul	0	3.853	4.289	5.382	6.273
Agus	0	2.663	4.874	5.238	6.001
Sep	0	3.315	4.698	6.252	4.897
Okt	0	4.257	5.071	7.775	4.928
Nov	0	3.980	5.554	5.979	5.852
Des	0	3.968	5.198	6.670	4.686
TOTAL	26.669	31.599	53.346	66.057	67.664

Sumber : RSUD dr. Rasidin

Grafik 2. 3 Jumlah Kunjungan Poliklinik Tahun 2020-2024



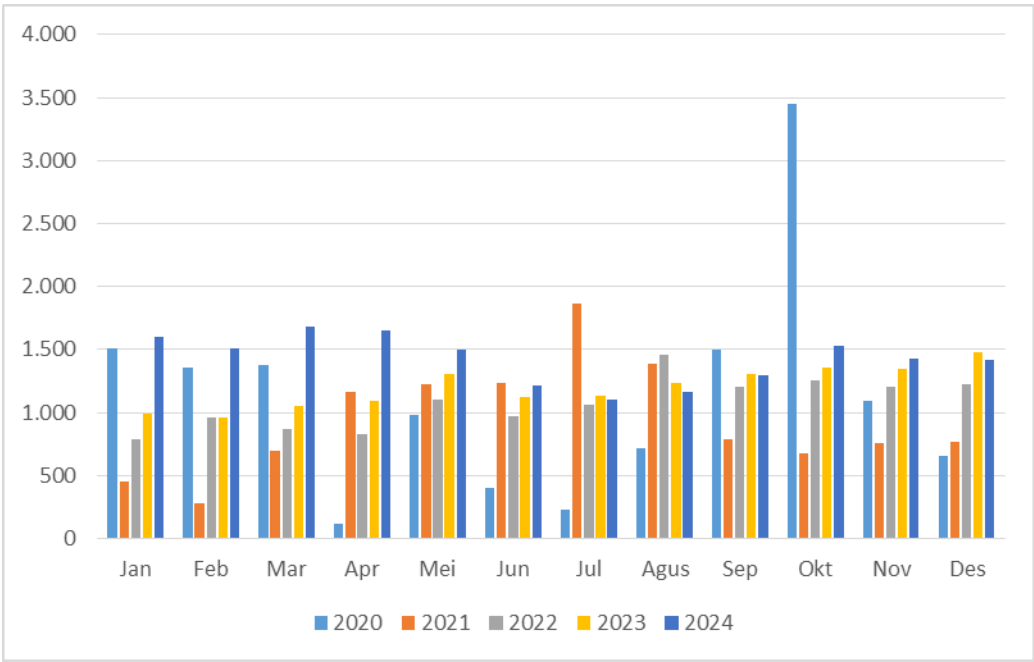
Sumber : RSUD dr. Rasidin

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan Poliklinik terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah mulai berkunjung kembali ke RSUD setelah pandemi berakhir. Selain itu masyarakat sudah bisa menjangkau layanan dari RSUD dengan adanya trayek angkutan umum yaitu Bus Trans Padang Koridor 3. Pada tahun 2024 kunjungan poliklinik mengalami peningkatan sebesar 2,43% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 66.057 orang pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 67.664 orang pada tahun 2024.

2)Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pada Tahun 2018 Pelayanan yang dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 3 shift. Kinerja Pelayanan IGD dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 4 Jumlah Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : RSUD dr. Rasidin

Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa kunjungan IGD sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Seiring dengan berakhirnya pandemi COVID 19, angka kunjungan ke RSUD sudah mulai meningkat kembali.

3) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap pada RSUD dr. Rasidin terdiri dari rawat inap penyakit dalam, rawat inap bedah, rawat inap anak, rawat inap kebidanan dan rawat inap Intensive Care Unit (ICU). Pelayanan kesehatan di ruang rawat inap dari segi bangunan sudah cukup memenuhi persyaratan tipe rumah sakit klas C, meskipun belum sempurna akan tetapi RSUD dr Rasidin masih terus berbenah guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang service excellent.

Tabel 2. 17 Indikator Ruangan Instalasi Rawat Inap Tahun 2020- 2024

Tahun	BOR	LOS	BTO	TOI	NDR	GDR
2020	56,92	6,85	2,54	5,16	9,03	18,84
2021	27,48	4,52	1,92	11,50	11,04	22,43
2022	35,94	3,51	37,42	6,25	11,33	28,44
2023	39,30	3,61	3,31	5,57	10,66	22,15
2024	45,08	3,43	4,12	4,07	6,75	20,24

Sumber : RSUD dr Rasidin

Jika dilihat dari tabel di atas, RSUD dr Rasidin masih belum maksimal dalam pemanfaatan pemakaian tempat tidur dimana BOR ideal RSUD dr. Rasidin masih dibawah 60 %, sedangkan idealnya yang ditetapkan Depkes adalah 60 – 80 %. Namun diharapkan setelah proses pembangunan gedung rumah sakit selesai maka RSUD dr Rasidin dapat lebih maksimal dalam pemakaian tempat tidur, sehingga memiliki BOR ideal.

4) Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pelayanan Medik dan Penunjang Medik yang dilaksanakan pada RSUD dr. Rasidin terdiri dari:

- ✚ Pemeriksaan Laboratorium rutin dan lengkap
- ✚ Pemeriksaan Jantung (EKG)
- ✚ Pelayanan Gizi
- ✚ USG
- ✚ Rongent
- ✚ Farmasi
- ✚ Fisiotherapy dan Therapy Wicara

5) Instalasi Kamar Operasi (OK)

Pelayanan kesehatan di kamar operasi telah dilakukan sejak Tahun 2004, dimana pelaksanaannya berupa operasi melahirkan (Sectio Cesaria) yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan operasi bedah umum yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Namun seiring waktu, kamar operasi tidak hanya untuk operasi melahirkan dan bedah umum saja, dimana sudah berkembang pada pelaksanaan operasi orthopedi, mata, dan THT.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan, karena sejak 1 April 2020 RSUD menjadi RS Khusus covid yang mana tidak ada lagi Operasi yang dilakukan dikamar bedah sampai dengan Maret 2021, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 18 Jumlah Kunjungan OK Tahun 2020-2024

No	Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	161	0	100	148	146
2	Februari	189	0	94	114	124
3	Maret	181	23	101	116	149
4	April	0	69	102	79	119
5	Mei	0	54	85	142	131
6	Juni	0	72	120	111	120
7	Juli	0	81	140	145	167
8	Agustus	0	61	131	129	132
9	September	0	81	113	133	119
10	Oktober	0	91	125	138	132
11	November	0	101	142	110	162
12	Desember	0	105	154	118	158
Jumlah		531	738	1.407	1.483	1.659

Sumber : RSUD dr. Rasidin

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam memberikan pelayanan, yang menjadi sasaran pelayanan tingkat pertama adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja masing-masing Puskesmas, baik dalam Upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra Dinas Kesehatan mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing

berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Mitra Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan antara lain rumah sakit, Puskesmas, apotek, laboratorium klinik, klinik swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), perusahaan farmasi, serta institusi pendidikan (seperti universitas dan akademi keperawatan). Mitra ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan layanan medis langsung, penyuluhan kesehatan, hingga penelitian dan pengembangan program kesehatan.

Beberapa mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan terdapat pada table berikut :

Tabel 2. 19 Mitra Dinas Kesehatan

No	Mitra Dinas Kesehatan	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Rumah Sakit dan Klinik	Masyarakat yang membutuhkan palayan kesehatan	Menyediakan layanan medis spesialis, rawat inap, dan gawat darurat.
2	Puskesmas	Masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas	Pusat pelayanan kesehatan dasar yang berfokus pada pencegahan, promosi kesehatan, dan kuratif di tingkat komunitas.
3	Apotek dan Toko Obat	Masyarakat yang membutuhkan obat-obatan	Menyediakan obat-obatan dan konseling farmasi untuk masyarakat.
4	Laboratorium Klinik	Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium	Melakukan tes dan analisis untuk mendukung diagnosis dan pemantauan kesehatan.
5	Institusi Pendidikan (Universitas dan Akademi	Mahasiswa	Berkontribusi dalam penyediaan tenaga kesehatan profesional, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.
6	Perusahaan Farmasi	Konsumen obat-obatan serta vaksin	Memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan serta vaksin, serta seringkali berperan dalam riset dan edukasi kesehatan.
7	Badan/Lembaga Pemerintah Lain	Tenaga kerja, anak usia sekolah, calon pengantin, Ibu dan Balita	Bekerja sama dalam program lintas sektor, seperti kesehatan kerja dengan dinas tenaga kerja, atau kesehatan ibu dan anak dengan dinas pendidikan, Imunisasi Calon Pengantin dengan kementrian agama, Pelaksanaan Posyandu dengan Kecamatan.

No	Mitra Dinas Kesehatan	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
8	Industri dan Sektor Swasta	Tenaga Kerja	Terlibat dalam program kesehatan kerja atau promosi gaya hidup sehat di lingkungan kerja
9	Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dan Komunitas	Masyarakat	Terlibat dalam program promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kesehatan.

Sumber : Dinas Kesehatan

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pemetaan Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2. 20 Pemetaan Permasalahan Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah (apa yang menyebabkan masalah itu terjadi)	Data Pendukung
1	Masih ditemukan kasus Stunting	Masih belum optimalnya Pemantauan sasaran balita oleh Puskesmas	1. Belum optimalnya penjarangan dan pemantauan sasaran balita. 2. Belum semua pengukuran BB TB balita menggunakan alat antropometri yang sesuai standar 3. Belum semua kader posyandu di assessment dengan 25 kompetensi dasar.	1. Data balita yang dikeluarkan oleh Pusdatin 83,262 2. Data balita riil yang ditemukan puskesmas yang berjumlah 56.718 orang.
2	Masih ditemukan kasus Kematian Ibu	Penguatan pemantauan wilayah setempat belum maksimal	1. Tingginya Mobilitas penduduk di Kota Padang 2. Ada sasaran yang yang langsung memeriksakan kehamilan ke RS/SpOG sehingga tidak tercatat di Puskesmas 3. Pencatatan/ kohort yg belum maksimal	Jumlah Kematian ibu sebesar 12 pada tahun 2024.
3	Masih ditemukan kasus Kematian Balita	Penguatan pemantauan wilayah setempat belum maksimal	1. Tingginya Mobilitas penduduk di Kota Padang 2. Ada sasaran yang yang langsung memeriksakan kehamilan ke RS/SpOG sehingga tidak tercatat di Puskesmas 3. Pencatatan/ kohort yg belum maksimal	Jumlah Kematian Balita sebesar 135 pada tahun 2024.
4	Masih rendahnya persentase penemuan kasus tuberkulosa yang diobati dan yang dilaporkan	Pelaksanaan investigasi kontak belum optimal	1. Penjarangan TB masih dilakukan secara pasif intensif di sebagian fasyankes. 2. Belum seluruh Indeks Kasus TBC di lakukan investigasi kontak.	Persentase penemuan kasus TB yang diobati dan dilaporkan sebesar 89,0% pada tahun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah (apa yang menyebabkan masalah itu terjadi)	Data Pendukung
			3. Kualitas sampel dari terduga TB belum maksimal. 4. Stigma TB masih ada di masy, sehingga enggan melakukan pemeriksaan. 5. Kasus Indeks dari RS terlambat dilakukan rujukan investigasi kontak ke puskesmas tempat tinggal pasien. 6. Penjarangan kasus TB belum menjangring seluruh kelompok bersiko (tempat kerja,asrama,panti) 7. Keterbatasan ketersediaan katrid TCM .	2024 dengan target nasional 90%
5	Masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	1. Penolakan orang tua 2. penguatan pemantauan wilayah setempat belum maksimal	1. Ketidakpercayaan masyarakat atau orang tua terkait imunisasi 2. Beredarnya Hoax di masyarakat terkait imunisasi 3. Belum optimalnya kerja sama dengan organisasi masyarakat di bidang kesehatan dalam melakukan imunisasi 4. Tenaga kesehatan belum maksimal dalam pemantauan pada wilayah setempat terkait imunisasi	Cakupan IDL tahun 2024 sebesar 86,7% dari target yang ditetapkan 95%
6	Belum tersedianya pelayanan Kanker Jantung Stroke Uronefrologi (KJSU)	SDM dan sarana prasarana baru terpenuhi dengan kriteria dasar	1. Belum tersedianya jenis ketenagaan yang lengkap untuk pelayanan KJSU 2. Belum adanya dana untuk penyediaan sarana pelayanan KJSU 3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan KJSU belum lengkap	data SISDMK RSUD belum memenuhi seluruh kriteria RS KJSU dengan Strata Madya
7	Masih rendahnya layanan kefarmasian sesuai standar	SDM dan sarana prasarana belum sesuai standar	1. Belum semua Puskesmas mempunyai apoteker dan juga jumlah TTK yang terbatas sehingga belum bisa mengcover seluruh kegiatan terutama pada pengelolaan sediaan farmasi 2. Bagi sarana pelayanan kefarmasian swasta seperti apotek dan toko obat masih ada pelayanan farmasi yang belum dilayani oleh tenaga non farmasi, penyimpanan yanf belum sesuai ketentuan, suhu yang belum terstandar, pencahayaan yang belum sesuai	Layanan kefarmasian sesuai standar 50% pada tahun 2022, dengan target nasional 70%

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah (apa yang menyebabkan masalah itu terjadi)	Data Pendukung
8	Masih Banyak Sarana /Fasilitas Pelayanan (Puskesmas) yang belum sesuai Standar PMK 43 Tahun 2019.	1. Banyak Bangunan Puskesmas/fasiltas pelayanan yang ada belum sesuai standar 2. Konstruksi Puskesmas di bangun sebelum PMK 43/2019 dijadikan sebagai pedoaman/ Standar Pelayanan. 3. Sulitnya mendapatkan Anggaran untuk Rehabilitasi Total/ Rekonstruksi Puskesmas.	1. Permintaan pasar/ tuntutan masyarakat tentang pelayanan prima pada Objek Fasilitas Umum 2. Penerapan PMK43/2019, dengan Konsep Akreditasi dan Pembiaya an BPJS Kesehatan. 3. Pembangunan Puskesmas harus mengacu pada Proto-tipe yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan.	1. ASPAK Per Puskesmas Tahun 2023 2. Standar Sarana dan Prasarana Puskesmas sesuai PMK 43 Tahun 2019
9	Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 Kota Padang	1. Masih rendahnya layanan cepat tanggap di masyarakat disebabkan karena akses jauh dari fasilitas kesehatan. 2. Kota Padang merupakan Ibukota Sumatera Barat yang bias dijadikan contoh oleh Kota Kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat 3. Belum adanya pelayanan kesehatan yang mengerjakan dan bertanggung jawab dalam penanganan kedaruratan medis pada lini lokasi kejadian dan antara tempat kejadian dengan fasyankes sebagai unit kerja tersendiri	1. Tidak semua rumah sakit menyediakan fasilitas jemput pasien ke rumah atau tempat kejadian gawat darurat 2. Belum adanya layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat apabila mengalami kondisi kegawatdaruratan medis. Meskipun Pemerintah sudah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan kesehatan menggunakan JKN sering kali mendapatkan penolakan / diskriminasi di rumah sakit.	1. Amanah dari instruksi Presiden No.4 Tahun 2013, dimana seluruh kabupaten / kota di Indonesia harus membentuk PSC. 2. Pembentuka n PSC telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang SPGDT yang menentukan bahwa PSC harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Sumber : Dinas Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan erat kaitannya dengan situasi derajat kesehatan, situasi upaya kesehatan dan situasi sumber daya kesehatan diantaranya :

a. Masih ditemukan kasus Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah gangguan tumbuh kembang pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. 1000 HPK merupakan *golden period* perkembangan otak anak dimana 80% otak anak berkembang pada masa ini. Kekurangan zat gizi kronis yang terjadi pada masa ini akan bersifat permanen atau tidak bisa diperbaiki kembali. Selain perkembangan otak, pertumbuhan fisik yang pesat pun terjadi pada usia ini. Kekurangan gizi pada masa ini dapat dilihat dari rendahnya pertumbuhan fisik anak yang dinilai dengan indikator tinggi badan berdasarkan usia. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi sehingga anak nampak lebih pendek daripada usianya. *Stunting*, terutama pada 1.000 HPK, tidak hanya merupakan indikator rendahnya tinggi badan seorang anak tetapi lebih sebagai penanda (*marker*) dari masalah yang jauh lebih besar, yaitu penurunan kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Grafik 2. 5 Persentase Balita Stunting di Kota Padang Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2,53% balita di Kota Padang yang mengalami stunting. Untuk menurunkan kejadian stunting di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan serangkaian intervensi gizi spesifik untuk penurunan kejadian stunting. Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Intervensi ini bersifat jangka pendek

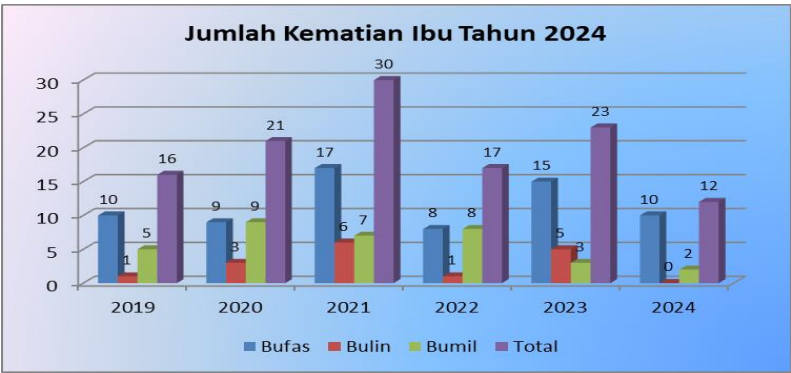
dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa remaja (calon ibu), masa kehamilan, masa menyusui, serta bayi dan balita:

- 1) Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil, meliputi:
 - a) Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis;
 - b) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk mengatasi anemia pada ibu hamil;
 - c) Suplementasi kalsium bagi ibu hamil;
 - d) Pemeriksaan kehamilan lengkap
- 2) Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan anak usia 0-59 bulan
 - a) Tata laksana balita gizi buruk;
 - b) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
 - c) Suplementasi kapsul vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan;
 - d) Suplementasi taburia bagi anak 6-23 bulan dengan berat badan kurang ;
 - e) Imunisasi dasar lengkap dan lanjutan bagi balita;
 - f) Suplementasi zinc untuk pengobatan diare ;
 - g) Manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
 - h) Pencegahan kecacingan
 - i) Promosi dan konseling menyusui;
 - j) Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA);
- 3) Intervensi bagi Remaja putri
 - a) Suplementasi tablet tambah darah;
 - b) Gerakan Aksi Bergizi

b. Masih ditemukan kasus Kematian Ibu

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau yang diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

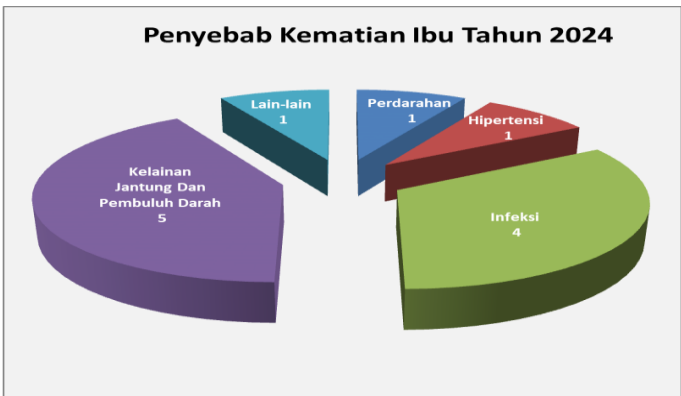
Grafik 2. 6 Kasus Kematian Ibu di Kota Padang Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Kesehatan

Data grafik diatas masih terlihat tingginya kasus kematian ibu dengan kematian terbanyak terjadi pada ibu nifas.

Grafik 2. 7 Penyebab kematian ibu pada tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan

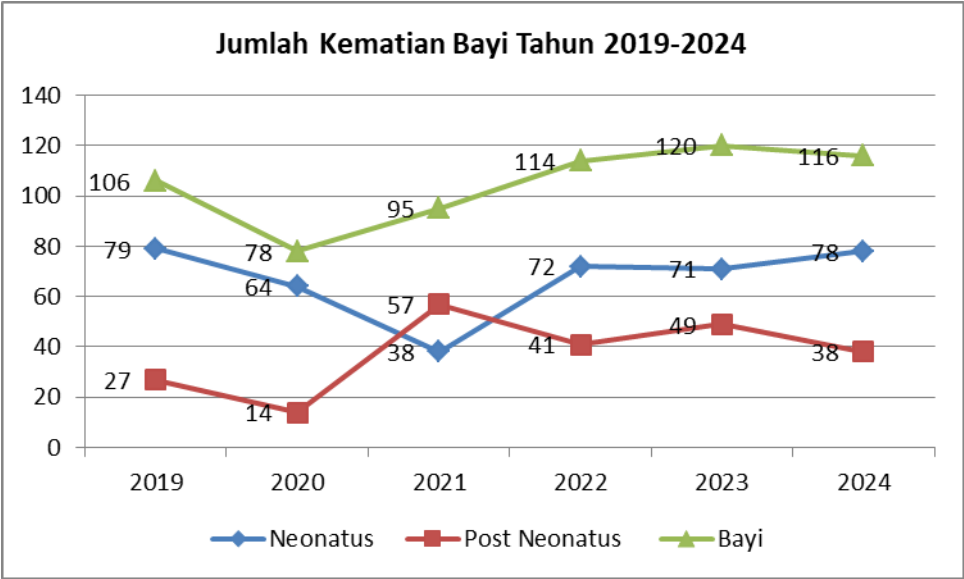
Adapun penyebab kematian ibu pada meliputi perdarahan sebanyak 1 orang, hipertensi dalam kehamilan 1 org, infeksi 4 orang, kelainan jantung dan pembuluh darah 5 orang dan penyebab lainnya sebanyak 1 orang.

Kematian ibu dipengaruhi dan didorong oleh berbagai faktor yang mendasari timbulnya resiko maternal dan neonatal yaitu faktor-faktor penyakit seperti kanker, jantung atau penyakit lain yang diderita ibu, masalah gizi dari WUS, serta faktor 4T (terlalu muda dan terlalu tua untuk hamil dan melahirkan, terlalu dekat jarak kehamilan/persalinan dan terlalu banyak hamil dan melahirkan). Kondisi tersebut diperberat lagi oleh adanya keterlambatan penanganan kasus emergensi/komplikasi maternal dan neonatal akibat kondisi 3T (Terlambat mengambil keputusan, terlambat mengakses fasyankes yang tepat dan terlambat memperoleh pelayanan dari tenaga yang kompeten).

c. Masih ditemukan kasus Kematian Balita

Kasus kematian Bayi adalah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Kematian bayi ini dapat dikelompokkan menjadi kematian neonatal (0-28 hari), kematian post neonatal (29 hari-11 bulan), kematian bayi (0-11 bulan)

Grafik 2. 8 Angka Kematian Bayi di Kota Padang Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Kesehatan

Terjadi penurunan kasus kematian bayi dari 120 kasus di tahun 2023 menjadi 116 kasus di tahun 2024 dengan angka kematian bayi 8,3 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 21 Penyebab kematian bayi pada tahun 2024

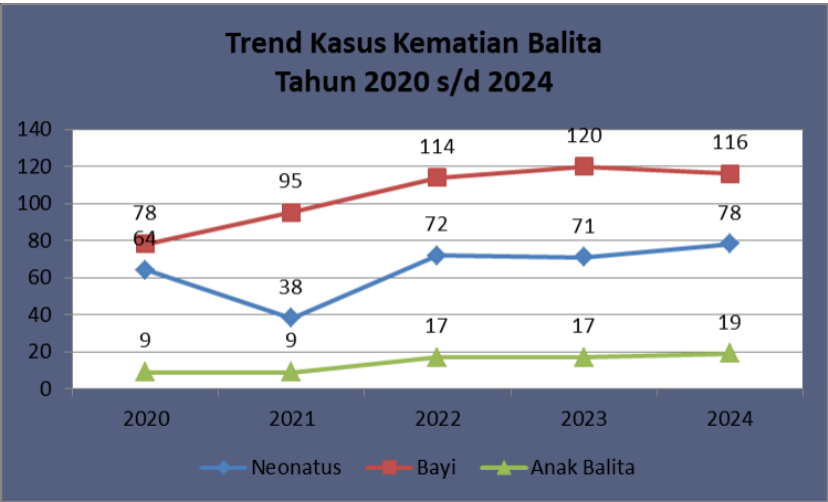
NO	KECAMATAN	PUSKE SMA S	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)								PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)									
			BLUR DAN PREMATURITAS	ASFIKSA	TETANUS NEONATORUM	INFEKSI	KELAINAN KONGENITAL	COVID-19	KELAINAN CARDIOVASKULAR DAN RESPIRATORI	LAIN-LAIN	KONDISI PERINATAL	PNEUMONIA	DIARE	KELAINAN KONGENITAL JANTUNG	KELAINAN KONGENITAL LAINNYA	MENINGITIS	PENYAKIT SARAF	DEMAM BERDARAH	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Bungus	Bungus	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	3	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
4	Pagambaran	Pagambaran	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	Padang Selatan	Seberang Padang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Pemancungan	Pemancungan	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Rawang	Rawang	3	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
8	Padang Timur	Andalas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
9	Parak Karakah	Parak Karakah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
10	Padang Barat	Padang Pasir	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
11	Padang Utara	Utak Karang	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	Air Tawar	Air Tawar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
13	Alai	Alai	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Nanggalo	Nanggalo	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
15	Lapal	Lapal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
16	Kuraji	Belimbing	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
17	Kuraji	Kuraji	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
18	Ambacang	Ambacang	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
19	Pauh	Pauh	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	Koto Tangah	Air Dingin	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Lubuk Buaya	Lubuk Buaya	5	2	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	1	
22	Koto Panjang Iku Koto	Koto Panjang Iku Koto	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
23	Anak Air	Anak Air	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
24	Dadok Tunggal Hitam	Dadok Tunggal Hitam	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
JUMLAH (KABIKOTA)			43	13	0	0	4	0	0	18	38	0	3	0	0	0	0	0	35	

Sumber : Dinas Kesehatan

Penyebab kematian bayi diantaranya dapat terjadi karena BBLR dan prematuritas, Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Infeksi, Kelainan Kongenital, Covid-19, Kelainan Cardiovaskuler dan Respiratori, dan lain-lain.

Kasus kematian balita adalah Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Kematian ini dapat dikelompokkan menjadi kematian neonatal (0-28 hari), kematian post neonatal (29 hari-11 bulan), kematian bayi (0-11 bulan), kematian anak balita (12-59 bulan) dan kematian balita (0-59 bulan).

Grafik 2. 9 Angka Kematian Balita Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan

Secara umum kasus kematian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan kasus kematian pada tahun-tahun berikutnya. adalah meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan Bayi Baru Lahir berkualitas cost effective (pelayanan dan pembiayaan efektif) serta membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor, dan mitra lainnya untuk advokasi, menerapkan Making Pregnancy Safe (MPS), meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan serta mendorong keterlibatan masyarakat menjamin penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

d. Masih rendahnya persentase penemuan kasus tuberkulosa yang diobati dan yang dilaporkan

Strategi nasional dalam eliminasi TBC tertuang dalam Perpres No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis, dimana didalamnya diatur mulai dari penguatan komitmen, peningkatan akses layanan TBC, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan TBC, pengobatan TBC dan pengendalian infeksi hingga pemanfaatan hasil riset dan teknologi.

Penemuan pasien TBC tidak hanya secara pasif dengan aktif promotif, tetapi juga melalui penemuan aktif secara intensif dan masif berbasis keluarga dan masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan layanan yang bermutu dan sesuai standar. salah satu kegiatan untuk mendukung kegiatan penemuan aktif adalah melalui pelacakan dan investigasi kontak. kegiatan ini bertujuan untuk menemukan kasus TBC pada orang yang kontak dengan pasien TBC. untuk meningkatkan penemuan kasus harus dilakukan investasi kontak dari setiap kasus indeks 10-15 orang kontak. diharapkan 30 % dari kontak yang diperiksa ditemukan menjadi terduga TBC sehingga meningkatkan penemuan kasus. Penemuan kasus TBC tahun 2024 sebanyak 4.220 kasus (87 %) dari target 4.838.

Tabel 2. 22 Kasus TBC Kota Padang Tahun 2024

Fasyankes	Target	Terdiagnosa TBC	%
Seberang Padang	28	36	129
Andalas	94	101	107
Pemancungan	36	37	103
Air Tawar	32	31	97
Padang Pasir	83	75	90
Bungus	52	45	87
Nanggalo	71	56	79
Rawang	54	42	78
KPIK	31	24	77
Kuranji	59	45	76
Pauh	118	90	76
Lubuk Buaya	126	92	73
Pegambiran	107	78	73
Ambacang	87	62	71
Lapai	42	28	67
Air Dingin	78	52	67
Lubuk Begalung	125	80	64
Ulak Karang	32	19	59

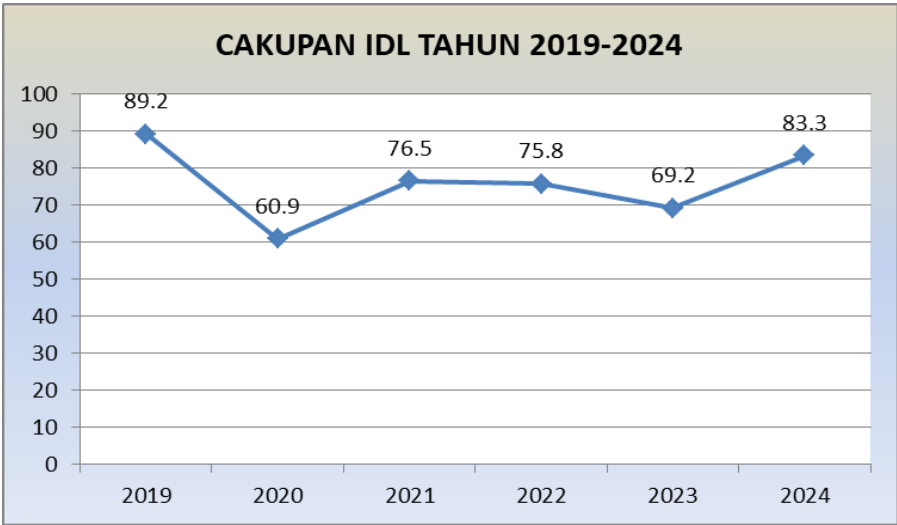
Fasyankes	Target	Terdiagnosa	%
Parak Karakah	58	33	57
Alai	46	26	57
Dadok Tunggul Hitam	67	37	55
Lubuk Kilangan	109	59	54
Anak Air	73	38	52
Belimbing	132	41	31
Total Puskesmas	1740	1227	71
Total Rumah Sakit	2918	2768	95
Total Klinik, Lapas, Rutan, DPM	180	225	125
Kota Padang	4838	4220	87

Sumber : Dinas Kesehatan

e. Masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)

Imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular khususnya pada Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Pemberiannya tidak hanya pada bayi dan balita saja, namun juga dapat diberikan untuk remaja dan dewasa. Imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang tergolong murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat PD3I. Yang termasuk imunisasi dasar adalah Imunisasi HB, BCG, OPV 1-4, DPT-HB-Hib 1-3, Campak Rubella, dan IPV. Trend Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 10 Cakupan IDL di Kota Padang Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Kesehatan

IDL merupakan indikator pelaksanaan Imunisasi dengan arti bahwa dengan target 95%, diharapkan akan terbentuk Herd Imunity pada kelompok sasaran. Target Program Imunisasi adalah 100% dari

anak yang seharusnya mendapatkan imunisasi Herd immunity hal ini penting untuk dicapai guna mencegah penyebaran penyakit berbahaya pada orang yang tidak bisa mendapatkan imunisasi karena kondisi kesehatan tertentu. Tahun 2024 Capaian Imunisasi Dasar Lengkap(IDL) pada anak usia 0-11 bln di Kota Padang sebesar 83,3%. Pada tahun 2023 capaian IDL sebesar 65.7% Bila dibandingkan capaian IDL dengan IDL tahun 2023 (65,7%). Dari grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2022 terjadi penurunan capaian IDL dikarenakan terjadi Pandemi COVID-19. Pada masa pandemi Pemerintah menganjurkan untuk mengurangi berkumpul, dan mengunjungi pelayanan kesehatan bila tidak diperlukan. Hal tersebut menyebabkan orang tua atau masyarakat yang mempunyai anak bayi atau balita tidak membawa anaknya ke Posyandu atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan pelayanan imunisasi. Dengan menurunnya capaian IDL dua tahun terakhir dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian luar biasa penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi.

f. Belum tersedianya pelayanan Kanker Jantung Stroke Uronefrologi (KJSU)

Pelayanan Kanker Jantung Stroke Uronefrologi (KJSU) masih belum tersedia secara lengkap di puskesmas. Ke empat penyakit ini masih sebatas deteksi dini / penjarangan yang dilakukan oleh Puskesmas. Jika ditemukan penderita yang diduga memiliki penyakit tersebut, maka puskesmas melakukan rujukan ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawatan lanjutan.

g. Masih rendahnya layanan kefarmasian sesuai standar

Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,

dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Salah satu upaya penguatan fasilitas kesehatan primer ini, menuntut tenaga kesehatan termasuk apoteker dan penanggungjawab farmasi di puskesmas untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar.

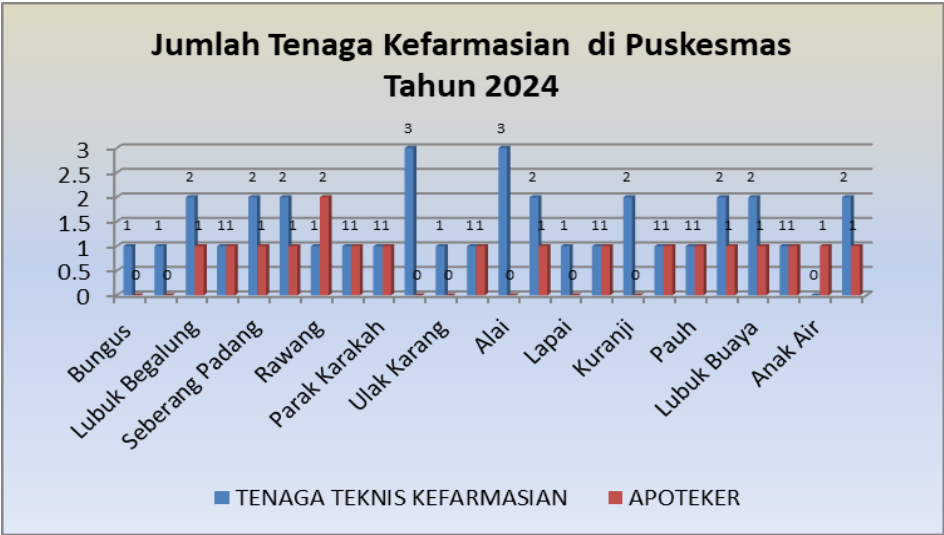
Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas memuat aktifitas pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas.

Pelayanan kefarmasian terbagi dalam dua kegiatan yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta pelayanan farmasi klinik di puskesmas merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sesuai standar. Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di puskesmas diharapkan dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggungjawab yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Jumlah kebutuhan apoteker di Puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap serta dengan memperhatikan pengembangan Puskesmas, Rasio untuk menentukan jumlah apoteker di Puskesmas bila memungkinkan diupayakan 1(satu) apoteker untuk 50 (limapuluh) pasien per hari.

Jumlah tenaga kefarmasian masih belum merata dan masih ada Puskesmas yang mempunyai apoteker, dan walaupun ada hanya satu orang apoteker dan satu orang TTK dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik 2. 11 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Kota Padang Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan

h. Masih Banyak Sarana /Fasilitas Pelayanan (Puskesmas) yang belum sesuai Standar PMK 19 Tahun 2024

Dalam Pembangunan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat (PPK I), Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota harus mengacu pada PMK 19/2024, sebagai pedoman penyelenggaraan Puskesmas. Untuk Bentuk dan tata letak ruangan dan fasilitas yang ada di dalam membangun sebuah Puskesmas harus mengikuti Proto-Tipe yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini tentunya berdampak kepada kondisi Puskesmas yang ada pada Kabupaten /Kota, tidak terkecuali Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Padang.

Sebagian besar Puskesmas yang ada di Kota Padang di bangun sebelum tahun 2019, artinya Bangunan atau konstruksi termasuk fasilitas ruangan pelayanan yang ada saat ini belum sesuai dengan Standar / Proto-Tipe jika mengacu pada PMK 19 /2024 tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Padang telah melakukan langkah-langkah pemutakhiran konstruksi dengan mengusulkan Pembangunan Puskesmas Rekonstruksi, Relokasi dan peningkatan Status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas, diantaranya:

- 1. Puskesmas Pegambiran dengan Relokasi Puskesmas
- 2. Puskesmas Pauh dengan Rekonstruksi Puskesmas

3. Puskesmas Rawang dengan Rekonstruksi Puskesmas
4. Puskesmas Andalas dengan Rekonstruksi Puskesmas
5. Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto (KPIK) dengan Rekonstruksi Puskesmas
6. Puskesmas Parak Karakah dengan Peningkatan Status Pustu menjadi Puskesmas
7. Puskesmas Ulak Karang dengan Relokasi Puskesmas

Namun semua pekerjaan diatas belumlah sempurna karena Anggaran yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan, dan maksimal anggaran yang diterima melalui APBN/DAK , 30 - 40 persen dari kebutuhan, untuk melanjutkan pembangunan tersebut di sarankan melalui APBD Kota, seperti yang telah dilakukan untuk Puskesmas:

1. Puskemas Pauh
2. Puskesmas Pegambiran

Sedangkan untuk Puskesmas lain masih perlu penambahan anggaran untuk penyempurnaan ruangan pelayanan, seperti:

1. Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto (KPIK)
2. Puskesmas Andalas
3. Puskesmas Rawang
4. Puskesmas Parak Karakah
5. Puskesmas Ulak Karang.

Tahun 2023 Kota Padang sudah memiliki 24 Puskesmas, dan 7 (tujuh) di antaranya sudah mengacu pada Proto-tipe dan 17 (tujuh belas) unit Puskesmas lagi masih dalam kondisi tata ruang bangunan lama dan perlu pembiayaan yang cukup tinggi.

Sedangkan untuk kelangsungan pelayanan tetap dilakukan pemeliharaan dengan menggunakan APBD Kota Padang setiap tahunnya sesuai Anggaran yang disediakan, dan karena keterbatasan Anggaran tersebut belum dapat dilakukan perbaikan total atau rekonstruksi.

i. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 Kota Padang

Public Safety Center (PSC) merupakan suatu pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan korban atau pasien gawat darurat, pemandu pertolongan pertama, mengevakuasi korban atau pasien gawat darurat serta mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan yang dituju. Jadi PSC merupakan pertolongan pra rujukan, dimana ketenagaan di PSC terdiri dari koordinator, tenaga kesehatan, operator call center dan tenaga lain.

Tingginya kasus kegawatdaruratan penyakit, mendorong Kementerian kesehatan melakukan terobosan baru untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan, yaitu melalui layanan 119. Layanan ini menyediakan layanan emergensi khususnya emergensi medik dengan menggunakan kode akses 119 dan bebas biaya. Layanan kegawatdaruratan medis melalui nomor 119 dapat diakses secara luas dan gratis oleh masyarakat melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Layanan 119 sejalan dengan agenda ke lima Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka dalam perjalanannya Kementerian Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. salah satu caranya adalah melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Mengenai Pembentukan PSC telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang SPGDT yang menentukan bahwa PSC harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Kota Padang merupakan 1 diantara 7 PSC yang ada di Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanah dari instruksi Presiden No.4 Tahun 2013, dimana seluruh kabupaten / kota di Indonesia harus membentuk PSC. Berdasarkan Perwako Nomor 21 Tahun 2020 terdapat 3 zona PSC di Kota Padang. Dalam pelaksanaannya, operasional PSC 119 Kota Padang masih melibatkan tenaga Puskesmas yang ditugaskan untuk melaksanakan piket di PSC

yaitu tenaga dokter dan paramedis. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kompetensi petugas. Dengan kejadian lakalantas maupun emergency sehari-hari dan demi kelancaran pelayanan diperlukan PSC 119 dalam bentuk Unit Pelaksanaan teknis maka dibentuk “Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 Kota Padang.

Oleh sebab itu sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelumnya Noor YR.03.01/III/2132/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center (PSC 119) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta Nomor YR.03.01/III/1624/2019 tanggal 11 April 2019 tentang monitoring dan Evaluasi Pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota, berfokus pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa PSC 119 sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kegawatdaruratan medik sehari-hari yang dilaksanakan selama 7 x seminggu dan 24 jam secara terus menerus dengan pembagian waktu kerja. Dalam hal memudahkan operasional PSC 119, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis di Daerah sesuai aturan yang berlaku.

Tenaga merupakan salah satu faktor penentu dalam melaksanakan kegiatan, jumlah tenaga yang tersedia yang akan mendukung operasional Kegiatan UPTD PSC 119. Pada saat ini sebanyak 11 orang operator dan 4 orang pengemudi ditetapkan di PSC 119 sementara tenaga dokter dan paramedis masih diperbantukan dari Puskesmas. Pengelolaan PSC 119 masih dibawah koordinasi bidang pelayanan kesehatan seksi pelayanan kesehatan rujukan. PSC 119 yang telah ada di Kota Padang merupakan bagian dari dinas kesehatan, namun memiliki keterbatasan dari berbagai hal terutama secara ketenagaan yang masih diperbantukan dari Puskesmas dan dinas kesehatan Kota Padang.

Dengan belum adanya pelayanan kesehatan yang mengerjakan dan bertanggung jawab dalam penanganan kedaruratan medis pada lini lokasi kejadian dan antara tempat kejadian dengan fasyankes sebagai unit kerja tersendiri maka solusi paling tepat adalah

terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)PSC 119 Kota Padang.

RSUD dr Rasidin

Berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, maka permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin adalah:

1. Mutu pelayanan rumah sakit belum optimal
2. RSUD dr. Rasidin masih tergantung kepada subsidi dari Pemerintah kota
3. Belum maksimalnya pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit
4. Persentase Bed Occupancy (BOR) di RSUD dr. Rasidin Padang, masih rendah dari Standar Departemen Kesehatan yaitu sebesar 60 – 85 %., BOR merupakan indikator untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.
5. Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan Pelayanan yang kompherensif, dan bermutu.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, berupa gedung bangunan, lahan parkir, alat-alat kesehatan dan lainnya.
7. Monitoring, Evaluasi dan Analisis terhadap kebijakan, program-program, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD yang diterbitkan berdasarkan Permenkes no 129 tahun 2008 belum optimal
8. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) belum terintegrasi dengan baik..
9. Fungsi pemasaran/Promosi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang belum optimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.

Permasalahan tersebut pada dipetakan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2. 23 Pemetaan Permasalahan RSUD dr. Rasidin Padang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Pendukung
Mutu pelayanan Rumah Sakit belum optimal	Belum terpenuhinya semua standar pelayanan Rumah	Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan Pelayanan yang	Laporan SPM dan INM RSUD dr. Rasidin Tahun

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Pendukung
	sakit dan INM	kompherensif, dan bermutu	2024
		Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, berupa gedung bangunan, lahan parkir, alat-alat kesehatan dan lainnya	Analisa Data Individual RSUD dr. Rasidin dari ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) kementrian Kesehatan
		Monitoring, Evaluasi dan Analisis terhadap kebijakan, program-program, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD yang diterbitkan berdasarkan Permenkes no 129 tahun 2008 belum optimal	Laporan Tim Mutu RSUD dr. Rasidin Padang
		Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS -RME) belum terintegrasi dengan baik	Laporan unit IT RSUD (ruang rawatan belum RME)
		pemasaran/Promosi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang belum optimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.	Komentar masyarakat melalui Media sosial Akun RSUD dr. Rasidin, bahwa sanya masih ada Masyarakat kota Padang sendiri yang belum tahu keberadaan dan Pelayanan RSUD dr. Rasidin

Sumber : RSUD dr. Rasidin

A. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, Dinas Kesehatan

dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kementerian Kesehatan. Telaah terhadap Renstra Kementerian Kesehatan sebagai berikut: (Belum ada)

B. Telaah Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, Dinas Kesehatan dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Kesehatan berkaitan dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Telaah terhadap Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: (Belum ada)

C. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 telah ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 55,98% (117 dari total 209 indikator).

Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai berikut:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
- b. Prevalensi anemia pada ibu hamil.
- c. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
- d. Angka Kematian Ibu (AKI).
- e. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- f. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
- g. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
- h. Prevalensi tekanan darah tinggi.
- i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
- j. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- k. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

2.2.2 Isu Strategis

Presiden dan Wakil Presiden mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Bidang Kesehatan terdapat pada Misi keempat yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam rangka mencapai visi, Presiden Prabowo memiliki 8 Program Hasil terbaik Cepat (PHTC)/ Quick Win, dimana tiga (3) diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam melakukan pembangunan kesehatan pemerintah pusat dan daerah mengacu kepada rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah, serta Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK sebuah dokumen rencana pembangunan kesehatan jangka panjang yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fungsi utama

RIBK adalah untuk menyelaraskan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah, meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan, memperkuat ketahanan sistem kesehatan, serta mengoptimalkan tata kelola dan pendanaan kesehatan secara berkelanjutan. RIBK 2025-2029 mencakup 42 indikator kinerja yang diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra SKPD untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Fokus utama termasuk peningkatan usia harapan hidup, penurunan prevalensi depresi dan obesitas, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. RIBK bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang adil dan terjangkau melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan.

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi dan peran cukup penting sebagai pusat pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan serta pusat pelayanan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan perbankan. Sebagai Kota yang sedang berkembang, Kota Padang dengan dinamika pembangunan yang cukup dinamis terus berpacu untuk meningkatkan fungsi dan peran tersebut. Pembangunan di semua sektor terus diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “masyarakat adil dan makmur”

Visi Kota Padang pada RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2030 adalah “Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan kota Padang sebagai kota pintar (Smart City) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera”. Visi tersebut akan diwujudkan kedalam 5 Misi. Dinas Kesehatan terdapat pada misi kedua yaitu Memperkuat pencapaian indikator kota pintar dan kota sehat

Penentuan isu strategi berdasarkan isu bidang kesehatan skala nasional, provinsi dan kota, antara lain :

a. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Delapan Misi Asta Cita Kepemimpinan Presiden terpilih tahun 2024- 2029, yang mencakup berbagai aspek pembangunan nasional memuat misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di

seluruh kabupaten di Indonesia, penurunan kasus tuberkulosis sebanyak 50% dalam 5 tahun, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) .

Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan salah satu program prioritas yang menjadi perhatian Kepala Negara. Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagaimana dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani faktor risiko, kondisi pra-penyakit dan penyakit secara dini. Program ini bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Indonesia dengan berbagai jenis skrining untuk memeriksa kesehatan masyarakat.

b. Penurunan Persentase Stunting

Salah satu Program Kerja Asta Cita adalah mencegah terjadinya *stunting* pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu). Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral.

Pencegahan stunting memerlukan upaya penanganan secara terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Dalam Upaya upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting (PPPS) ada penyelarasan 31 indikator PPPS Dimana Dinas Kesehatan termasuk dalam Perangkat Daerah yang berkaitan dengan PPPS.

Penurunan prevalensi Stunting menjadi indikator sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, dimana di dalam PPPS terdapat indikator yang merupakan tugas dari Dinas Kesehatan

dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, khususnya percepatan penurunan Stunting.

c. Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Balita

Jumlah kematian ibu merupakan indikator tingkat kota/kabupaten untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Oleh karena itu, perhatian pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 40 disebutkan jika upaya kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah Kematian Ibu tahun telah mengalami penurunan pada tahun 2024. Meskipun demikian, penurunan AKI masih terus diupayakan, Target penurunan AKI di Indonesia masih terus menjadi prioritas.

Kematian balita menjadi indikator kesehatan masyarakat karena angka kematian balita mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Tingginya angka kematian balita mengindikasikan adanya masalah pada kesehatan ibu, akses ke fasilitas kesehatan, nutrisi, gizi buruk, penyakit menular, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat.

d. Penurunan Kasus TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus Tuberkulosis terbesar di dunia. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki program penanggulangan Tuberkulosis mencakup tiga hal yaitu meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiki (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/AIDS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat; memperkuat sistem informasi TB terpadu (SITT); meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan.

Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

e. BPJS Gratis

Penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis melalui BPJS Bagi Warga Kota Padang merupakan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan. Program ini merupakan program unggulan dan 40 aktivasi Kepala Daerah, yang menjadi) Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025 – 2029. Memberikan jaminan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan kepada warga Kota Padang, dengan syarat terdaftar dengan KTP Padang. Hal ini dilakukan agar warga kota Padang memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.

f. Dokter Warga

Program Dokter Warga adalah program unggulan Wali Kota Padang yang memberikan layanan kesehatan langsung ke rumah pasien, khususnya bagi warga yang kesulitan mengakses fasilitas medis. Untuk mengakses layanan ini, warga dapat menghubungi contact person Puskesmas setempat atau menghubungi Public Safety Center (PSC) 119. Tim Dokter Warga yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan siap memberikan kunjungan dan pelayanan medis langsung ke rumah pasien

Tujuan Dokter warga ini adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah; memberikan pelayanan medis langsung ke rumah pasien, khususnya bagi mereka yang membutuhkan atau kesulitan menjangkau fasilitas medis; memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kota Padang.

g. Peduli Warga Emas

Salah satu arah kebijakan dan program pembangunan daerah kota Padang untuk mencapai peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas “Warga Emas” pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik dengan program pembangunan penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan khusus bagi “warga emas” (lansia dan disabilitas) Kota Padang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Hidup Lansia; meningkatkan Akses Layanan Kesehatan; dan menjadikan Padang Kota Sehat.

Warga emas mengacu pada penduduk lanjut usia (lansia), di mana pemerintah kota berupaya mewujudkan Padang sebagai Kota Sehat dan Swasti Saba Wistara, yang juga mencakup kesejahteraan lansia sebagai bagian integral dari masyarakat yang sehat, nyaman, dan aman.

h. Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi bermanfaat terutama bagi anak-anak sebagai metode pencegahan dini dari berbagai risiko kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024 Indonesia telah menetapkan target untuk kabupaten/kota bahwa 90% anak berusia 12-23 bulan 80% bayi berusia 0-11 bulan akan memperoleh imunisasi dasar lengkap di tahun 2024. Bagi anak-anak, imunisasi memberi dampak yang lebih signifikan dan merupakan strategi terbaik untuk menurunkan angka kematian anak.

Penyebarluasan informasi tentang imunisasi rutin secara tepat waktu, akurat, dan transparan sangat diperlukan guna meredakan kekhawatiran terhadap berbagai isu terkait imunisasi, serta menggenjot tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan imunisasi rutin oleh masyarakat.

i. Transformasi layanan rujukan

Transformasi layanan rujukan difokuskan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan spesialisik dan sub spesialisik bagi empat penyakit Penyakit Tidak Menular (PTM) yang menjadi penyebab kematian tertinggi. Sebagaimana data hasil Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) PTM menjadi penyakit dengan pembiayaan terbanyak seperti kanker, jantung, stroke dan ginjal.

Dalam upaya penanggulangan keempat penyakit tersebut, Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan jejaring rumah sakit rujukan dan meningkatkan kemampuan rumah sakit, termasuk perbaikan mutu dari fasilitas kesehatan sehingga pelayanan yang akan diterima masyarakat memiliki mutu yang tinggi.

j. Peningkatan layanan kefarmasian

Peningkatan layanan kefarmasian dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman komprehensif tentang Program Indonesia sehat dan Program Kefarmasian, menjadi contributor dalam upaya pencapaian pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pemenuhan akreditasi, peningkatan kompetensi dan kecukupan kuantitas tenaga kefarmasian yang merata serta mengupayakan agar apoteker secara profesional dalam pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasyankes, baik dalam farmasi klinik maupun pengelolaan obat.

k. Penambahan Puskesmas

Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas harus didirikan minimal di setiap kecamatan. Lokasi pendirian Puskesmas harus mempertimbangkan rasio penduduk dan/atau aksesibilitas. Rasio penduduk untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 (satu berbanding tiga puluh ribu) penduduk.

Pada Tahun 2024 Puskesmas berjumlah 24 unit. Puskesmas ini tersebar di semua kecamatan. jumlahnya bervariasi tiap kecamatan, ada yang jumlahnya 1, 2, 3 dan 5 Puskesmas, namun sebarannya tertumpu pada pusat kota.

l. Penyelarasan indikator kinerja kesehatan RIBK 2025-2029 dalam Renstra

Dasar RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

yang mewajibkan adanya perencanaan kesehatan jangka menengah yang berbasis kinerja dan sesuai dengan prioritas program kesehatan, bukan lagi sekadar mengikuti anggaran yang tersedia. RIBK bertujuan menyelaraskan perencanaan dan anggaran kesehatan antara pusat dan daerah untuk mencapai visi masyarakat sehat melalui enam sasaran strategis, seperti peningkatan akses layanan, penguatan sistem kesehatan, dan tata kelola pembiayaan yang efektif.

Enam Sasaran Strategis RIBK (2025-2029)

1. Masyarakat Sehat: Peningkatan usia harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Komunitas Gaya Hidup Sehat: Membangun komunitas dengan gaya hidup sehat.
3. Layanan Kesehatan Baik, Adil, dan Terjangkau: Memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan.
4. Sistem Kesehatan yang Kuat: Memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.
5. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang Efektif: Pengelolaan sumber daya kesehatan yang lebih efisien dan efektif.
6. Teknologi Kesehatan yang Maju: Memanfaatkan teknologi untuk mendukung layanan kesehatan.

RIBK menjadi acuan dalam menyelaraskan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah. Indikator pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029 mencakup berbagai aspek pembangunan kesehatan, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, penurunan kematian ibu dan bayi, serta penurunan penyakit menular dan tidak menular. RIBK juga menyertakan indikator terkait sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan pemanfaatan teknologi, yang tujuannya untuk mencapai masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera di Indonesia. Indikator-indikator ini diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra SKPD di tingkat daerah untuk memastikan kinerja yang terukur dan efektif.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Tantangan

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri 100 tahun 2018, dimana pencapaian target SPM 100 % menjadi kinerja kepala daerah. Begitu juga halnya dengan kesehatan yang mempunyai SPM bidang kesehatan yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjelaskan cara mencapai target 100 persen serta Sumber daya yang dibutuhkan sampai menghitung kebutuhan dana untuk pencapaian target.

Promosi kesehatan pada berbagai media promosi dan edukasi harus terus ditingkatkan agar setiap orang mempunyai kesadaran yang kuat dan berperan aktif dalam peningkatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi Pemerintah, swasta, masyarakat, lintas program, lintas sektor dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan SPM dengan 12 indikatornya tercapai 100% setiap tahun.

Target SPM 100% ini menuntut tenaga kesehatan agar lebih pro aktif melakukan penjangkaran masyarakat yang menjadi sasaran indikator SPM. Oleh karena itu setiap Puskesmas dituntut mempunyai inovasi pelayanan kesehatan. Diharapkan bukan hanya untuk pencapaian SPM, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Mutu Pelayanan

Pelayanan yang bermutu menjadi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, sehingga perlu pembenahan di Puskesmas sarana prasarana maupun SDM yang berkompetensi. Ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang professional serta peningkatan kompetensi SDM sangat

berpengaruh terhadap mutu pelayanan yang diberikan sehingga tidak ada lagi komplain dari masyarakat.

Trend peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal. Untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Ditempat terjadinya kegawatdaruratan medis di masyarakat, belum semua Puskesmas membuka pelayanan selama 24 jam. Harus ada yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab. Di fasyankes puskesmas: saat ini hanya ada 4 Puskesmas yang buka layanan gawat darurat 24 jam, dan tidak ada FKTP lain yang buka pelayanan 24 jam. Untuk itu perlu dibentuk UPTD PSC 911 sebagai sarana pelayanan kegawatdaruratan medis. PSC dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat yang diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus. Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center 119.

c. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas telah memenuhi standar akreditasi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan puskesmas sebagai institusi; meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di Puskesmas; dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Pada tahun 2018, sebanyak 23 Puskesmas (semua Puskesmas) sudah terakreditasi yang terdiri dari akreditasi utama 2 Puskesmas, madya 16 Puskesmas dan dasar 5 Puskesmas. Setiap Puskesmas yang telah terakhreditasi wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setia 5 (lima) tahun.

Secara berturut, re akreditasi seharusnya dilakukan untuk 5 Puskesmas di tahun 2019, 10 Puskesmas di tahun 2020 dan 8 Puskesmas di tahun 2020. Namun ditunda karena adanya Pandemi Covid-19 sesuai surat edaran Nomor HK.02.02/Menkes/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau penetapan Rumah Sakit pendidikan pada masa pandemi Covid-19 hingga 1 tahun sejak status bencana nasional Covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Akreditasi Puskesmas dilakukan tahun 2023 semua Puskesmas sudah di survey oleh lembaga akreditasi dalam rangka reakreditasi. Dari 24 Puskesmas yang sudah di survey sebanyak 21 Puskesmas memperoleh akreditasi Paripurna, 2 Puskesmas Utama, 1 Puskesmas Madya.

Sebagian besar Puskesmas di Kota Padang mendapatkan akreditasi Paripurna, ini merupakan suatu tantangan yang besar bagi Puskesmas. Pelayanan harus lebih berkualitas yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dengan adanya akreditasi, pelayanan yang dilakukan harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga diharapkan angka kesakitan dan kematian dapat ditekan.

1. Peluang

a. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Sejak tahun 2018, Status BLUD Puskesmas menjadi BLUD mandiri dengan tujuan agar Puskesmas dapat lebih otonom, dan mandiri dalam pengelolaan keuangan bahkan Puskesmas dapat melakukan perekrutan tenaga/ sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Puskesmas dapat menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik berupa dana kapitasi BPJS maupun dari layanan pasien secara langsung tanpa harus disetor dahulu ke kas negara, sehingga Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatan tersebut untuk pembiayaan belanja/ kebutuhan Puskesmas. Dengan kata lain alokasi APBD untuk Puskesmas menjadi berkurang/ efisiensi APBD.

- b. Penerimaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Penerimaan ASN dari formasi menjadi prioritas kebutuhan seleksi CASN, diharapkan kebijakan ini dapat memenuhi kekurangan SDM kesehatan.

c. Pendataan Keluarga Sehat

Kementerian kesehatan telah membuat kegiatan secara nasional yaitu pendataan keluarga sehat. Program ini dinamakan dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK). Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran kunci dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

Tujuan PISPK sebagaimana tertuang pada Permenkes No.39 tahun 2016 adalah meningkatkan akses keluarga dan anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif (Promotif-Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif); mendukung pencapaian SPM di Kabupaten Kota melalui peningkatan akses skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan JKN; mendukung tercapainya program indonesia sehat

Pada program ini, pendekatan keluarga menjadi salah satu strategi Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan sasaran dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya yaitu dengan mendatangi keluarga) dengan target 100% keluarga yang dikunjungi.

Pendataan ini nantinya akan melihat status kesehatan keluarga dan dapat menskrining semua masyarakat kota Padang mengenai masalah kesehatan individu. Peluang ini diharapkan nantinya dapat menjaring 100% sasaran pencapaian target SPM.

d. Public Safety Center (PSC 119)

PSC 119 yang telah ada di Kota Padang merupakan bagian dari dinas kesehatan, namun memiliki keterbatasan dari berbagai hal terutama secara ketenagaan yang masih diperbantukan dari Puskesmas dan dinas kesehatan Kota Padang.

Sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelumnya Noor YR.03.01/III/2132/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center (PSC 119) di Kabupaten/Kota

seluruh Indonesia serta Nomor YR.03.01/III/1624/2019 tanggal 11 April 2019 tentang monitoring dan Evaluasi Pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota, berfokus pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa PSC 119 sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kegawatdaruratan medik sehari-hari yang dilaksanakan selama 7 x seminggu dan 24 jam secara terus menerus dengan pembagian waktu kerja. Dalam hal memudahkan operasional PSC 119, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis di Daerah sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 2. 24 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kesehatan dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Masih ditemukan kasus Stunting		SDGs, atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030	Salah satu Program Kerja Asta Cita adalah mencegah terjadinya <i>stunting</i> pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang	Penurunan prevalensi Stunting menjadi indikator sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, dimana di dalam PPPS terdapat indikator yang merupakan tugas dari Dinas. Penurunan prevalensi Stunting menjadi indikator sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, dimana di dalam PPPS terdapat indikator yang merupakan tugas dari Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, khususnya percepatan penurunan Stunting.	Penurunan Persentase Stunting
	Masih ditemukan kasus Kematian Ibu		SDGs menargetkan penurunan angka kematian ibu menjadi <70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030	Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 40 disebutkan jika upaya kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).	Meski ada penurunan tred, AKI masih diatas target yang diahrapkan Nasional, sehingga tetap menjadi indikator kesehatan yg perlu diperhatikan.	Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Balita

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Masih ditemukan kasus Kematian Balita	Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Lebih dari 80% kematian Balita terjadi di negara berkembang	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan adanya perencanaan kesehatan jangka menengah yang berbasis kinerja dan sesuai dengan prioritas program kesehatan, bukan lagi sekadar mengikuti anggaran yang tersedia. RIBK bertujuan menyelaraskan perencanaan dan anggaran kesehatan antara pusat dan daerah untuk mencapai visi masyarakat sehat melalui enam sasaran strategis, seperti peningkatan akses layanan, penguatan sistem kesehatan, dan tata kelola pembiayaan yang efektif.	Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kematian Balita	Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Balita

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Masih rendahnya persentase penemuan kasus tuberkulosa yang diobati dan yang dilaporkan		WHO mencatat 10 juta kasus baru TBC setiap tahun, menjadikan TBC sebagai penyakit menular paling mematikan sebelum Covid-19	Strategi nasional dalam eliminasi TBC tertuang dalam Perpres No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis, dimana didalamnya diatur mulai dari penguatan komitmen, peningkatan akses layanan TBC, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan TBC, pengobatan TBC dan pengendalian infeksi hingga pemanfaatan hasil riset dan teknologi.	Masih banyak kasus yang belum terdeteksi	Penurunan Kasus TB
	Masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	Belum tercapainya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Target Global Imunisasi WHO dan UNICEF terhadap cakupan imunisasi dasar minimal 90 % di setiap negara. Dan ancaman kembali munculnya Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3, dimana cakupan imunisasi merupakan indikator penting menurunkan angka kematian bayi dan balita	Masih rendah dan belum eratanya cakupan IDL di Sumatera Barat	Imunisasi Dasar Lengkap

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Masih rendahnya layanan kefarmasian sesuai standar		WHO menempatkan Antimicrobial Resistance (AMR) sebagai salah satu 10 ancaman Kesehatan Global. Peran apoteker sangat penting dalam memastikan penggunaan antibiotik sesuai standar.	Distribusi apoteker tidak merata. Konsentrasi tinggi di kota-kota besar, sementara di daerah terpencil banyak fasilitas kesehatan belum memiliki apoteker	Apoteker masih terkonsentrasi di kota-kota besar, dan masih ada fasilitas kefarmasian yang belum sepenuhnya memenuhi standar.	
	Masih Banyak Sarana /Fasilitas Pelayanan (Puskesmas) yang belum sesuai Standar PMK 43 Tahun 2019.			Banyak Puskesmas, terutama di daerah terpencil belum memiliki bangunan dan fasilitas sesuai standar.	Belum semua Puskesmas memenuhi standar bangunan dan fasilitas sebagaimana diatur dalam PMK 43/2019	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Mengembangkan Kapasitas layanan rujukan untuk penyakit kronis seperti Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronologi (KJSU) agar dapat melayani masyarakat secara adil dan merata	Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 Kota Padang Belum Optimalnya Layanan dari segi sarana dan Prasarana serta SDM	Pengembangan Infrastruktur dengan memanfaatkan lahan untuk pembangunan berkelanjutan, Teknologi Informasi /IT dengan penerapan SIMRS-RME, agar menjadikan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata	Perdagangan bebas ASEAN dan Global (AFTA)	sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelumnya Noor YR.03.01/III/2132/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center (PSC 119) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Perluasan dan penentuan klasifikasi rumah sakit (Madya, Utama dan Patipurna	Petugas PSC 119 belu merata kualitas dan jumlahnya Penguatan sistem Rujukan dan jejaring	Memastikan RSUD dr. Rasidin memiliki layanan rujukan penyakit spesifik kanker, Jantung, stroke, dan Uronologi (KJSU) dimasa mendatang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		kelola Klinis yang bermutu.				

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya permasalahan Dinas Kesehatan tidak berbeda jauh dari permasalahan Global, Nasional maupun Regional. Masalah Kesehatan tersebut yang selanjutnya menjadi isu strategis di Dinas Kesehatan juga akan menjadi permasalahan serta isu strategis secara global, nasional maupun regional.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kota Padang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Padang yang termaktub dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029, yaitu:

“Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama dan Budaya, Menuju Kota Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kota Padang

Sedangkan Misi Kota Padang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif

Pembangunan diprioritaskan dalam untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan tata kelola keuangan dan optimalisasi aset daerah, pemerintahan

berintegritas dan bebas korupsi, optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang produktif dan berintegritas serta penguatan pembangunan masyarakat tingkat RW

Misi 2. Memperkuat Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat

Dalam wujudkan visi pembangunan Kota Padang sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat, pembangunan diprioritaskan pada penerapan *smart governance* melalui kota cerdas pada layanan dasar, khususnya dalam layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perumahan dan rakyat dan kawasan pemukiman, layanan transportasi publik, layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kota sehat, pembangunan diprioritaskan pada meningkatkan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta peningkatan kawasan pemukiman dan fasilitas umum berkategori baik dan sehat

Misi 3. Memperkuat Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan

Pembangunan diprioritaskan dalam upaya menghasilkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bertakwa melalui pendidikan berkualitas untuk semua dan program smart surau dengan mensinergikan peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pemberdayaan serta ormas keagamaan, cendekiawan dan adat

Misi 4. Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan pekerjaan

Pembangunan diprioritaskan dalam membangun ekosistem berinvestasi dan kemudahan berusaha di Kota Padang serta mengembangkan hilirisasi industri berbasis produk potensial sehingga akan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesempatan kerja

Misi 5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas

Pembangunan diarahkan pada mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Layak Huni, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum, pengolahan persampahan, taman kota tematik, serta peningkatan kualitas transportasi publik

Misi 6. Memperkuat Jaringan Ketahanan Bencana

Pembangunan diprioritaskan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, peningkatan infrastruktur untuk mitigasi bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan aparat yang sigap bencana dan penguatan perencanaan tata ruang berbasis risiko sehingga terbentuk masyarakat yang tangguh bencana

Misi 7. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan indeks daya saing daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing produk daerah dengan memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai basis perekonomian

Misi 8. Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya tarik Kota Padang sebagai destinasi utama pariwisata, peningkatan produktivitas industri kreatif dan penguatan koperasi dan usaha mikro guna menumbuhkan wirausaha muda di Kota Padang

Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 2 dan Sasaran ke 8 dari RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan adalah **Memperkuat sistem kesehatan daerah dan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan** dengan indikator Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peningkatan Visite Rate. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta

agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai, maka tiap tujuan tersebut ditetapkan sasaraannya.

Sasaran ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan dan isu strategis yang ada. Harapannya sasaran ini dapat menunjang dan mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian tujuan yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Terdapat 5 (lima) sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan diantaranya :

1. Universal Health Coverage (UHC), dengan indikator sasaran Persentase Keaktifan Kepesertaan JKN
2. Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer, dengan indikator sasaran :
 - a. Jumlah Kematian Ibu
 - b. Jumlah Kematian Balita
 - c. Prevalensi Stunting
 - d. Peningkatan INM FKTP
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan indikator sasaran :
 - a. Success Rate TB
 - b. Peningkatan Skrining Penyakit
4. Peningkatan Ketersediaan sarana prasarana, alkes, SDMk, dan Kefarmasian, dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP
 - b. Persentase Ketersediaan Alkes
 - c. Peningkatan kompetensi SDMk
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, dengan indikator sasaran Peningkatan INM Rumah Sakit
Diantara indikator sasaran ada yang memiliki polarisasi maximize, minimize dan stabilize, diantaranya :
Polarisasi Maximize (semakin tinggi semakin baik) :
 - a. Peningkatan INM FKTP
 - b. Success Rate TB
 - c. Peningkatan Skrining Penyakit
 - d. Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP
 - e. Persentase Ketersediaan Alkes
 - f. Peningkatan kompetensi SDMk
Polarisasi Minimize (semakin rendah semakin baik) :
 - a. Persentase stunting

- b. Jumlah kematian ibu
- c. Jumlah Kematian Balita

Tujuan, sasaran, indikator dan target indikatornya dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi akhir	K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Memperkuat sistem kesehatan daerah dan Meningkatkan akses pelayanan kesehatan		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99,00	99,10	99,20	99,30	100	100	100	
Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat			Peningkatan Visite Rate	3,00	3,00	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20	
		Universal Health Coverage (UHC)	Persentase Keaktifan Kepesertaan JKN	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	100	
		Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Jumlah Kematian Ibu	12	12	11	11	10	10	10	
			Jumlah Kematian Balita	133	131	129	127	125	123	123	
			Prevalensi Stunting (EEPGBM)	2,55	2,53	2,51	2,50	2,50	2,47	2,47	
			Prevalensi Stunting (SSGI)	17,9	16,65	15,40	14,15	12,9	12,9	122,9	
			Peningkatan INM	100	100	100	100	100	100	100	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Success Rate TB	93	93,2	93,5	94,0	94,5	95,0	95,0	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi akhir	K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Peningkatan Skrining Penyakit	36	46,0	55,0	61,0	70,0	76,0	76,0	
		Peningkatan Ketersediaan sarana prasarana, alkes, SDMK, dan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Ketersediaan Alkes	60	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
			Peningkatan kompetensi SDMK	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peningkatan INM Rumah Sakit	80	82,0	84,0	86,0	88,0	89,0	89,0	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	85,0	85,0	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89,35	89,40	89,50	89,70	89,80	90,00	90,00	

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas dapat dilihat tujuan Dinas Kesehatan Memperkuat sistem kesehatan daerah dan Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan telah diturunkan menjadi 5 sasran dengan masing masing indicator kinerja. Target masing masing indikator pada akhir Renstra diharapkan bisa tercapai.

3.2 Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Dinas Kesehatan untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tujuan dan sasaran akan terlaksana jika didukung oleh strategi dan kebijakan yang tepat. Dinas Kesehatan sebagai unit kerja Pemerintah Kota

Padang memiliki strategi pembangunan kesehatan dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, mengatasi berbagai kelemahan dan meminimalkan faktor-faktor yang mengancam.

Tabel 3. 2 Penentuan Strategi berdasarkan Sasaran Renstra

No	Sasaran	Strategi
1	Universal Health Coverage (UHC)	Peningkatan kepesertaan JKN
2	Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Penguatan layanan berbasis siklus hidup di Puskesmas, Pustu dan Posyandu
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penguatan sistem surveilans, peningkatan cakupan imunisasi dan skrining dini, promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
4	Peningkatan Ketersediaan sarana prasarana, alkes, SDMk, dan Kefarmasian	Perencanaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, alkes, obat dan BMHP berbasis kebutuhan; dan peningkatan kapasita SDM
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan sistem rujukan berjenjang, peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan dasar (FKTP) dan fasilitas rujukan (FKRTL), dan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel diatas menjelaskan masing masing sasaran Dinas Kesehatan membuat strategi sehingga dapat mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan. Strategi yang dirumuskan merupakan strategi yang mengacu kepada kebijakan Kementerian Kesehatan dalam mencapai masing masing sasaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasran Dinas Kesehatan maka diperlukan prioritas Pembangunan tahunan yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Universal Health Coverage (UHC)	Universal Health Coverage (UHC)	Universal Health Coverage (UHC)	Universal Health Coverage (UHC)	
Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Ketersediaan sarana	Peningkatan Ketersediaan sarana	Peningkatan Ketersediaan sarana	Peningkatan Ketersediaan sarana	Peningkatan Ketersediaan sarana

prasarana, alkes, SDM, dan Kefarmasian	prasarana, alkes, SDM, dan Kefarmasian	prasarana, alkes, SDM, dan Kefarmasian	prasarana, alkes, SDM, dan Kefarmasian	prasarana, alkes, SDM, dan Kefarmasian
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Sumber Dinas Kesehatan

Tabel diatas menjelaskan bahwasanya prioritas Renstra sama setiap tahunnya kecuali pada Universal Health Coverage (UHC), karena target UHC diharapkan tahun 2029 telah tercapai sehingga lebih fokus kepada keaktifan peserta. Kesehatan semua indicator merupakan yang harus tetap dilaksanakan karena Kesehatan berkerja kepada siklus hidup manusia yang tidak ada berhentinya, akan tetap menjadikan target kinerja Dinas Kesehatan.

3.3 Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Strategi arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra adalah strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan pembangunan yang meliputi :

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

NO	OPERASIOBALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5
1	Mengurangi beban biaya kesehatan dengan BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Peningkatan kepesertaan JKN	Optimalisasi peningkatan cakupan peserta JKN melalui BPJS Gratis	
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan Dokter Warga	Penguatan layanan berbasis siklus hidup di Puskesmas, Pustu dan Posyandu	Pemenuhan standar SDM, sarana dan pelayanan Puskesmas	
		Penguatan sistem surveilans, peningkatan cakupan imunisasi dan skrining dini, promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),	Penguatan layanan primer sebagai garda terdepan dalam pencegahan, dan respon cepat terhadap kejadian luar biasa dan darurat kesehatan.	
		Perencanaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, alkes, obat dan BMHP berbasis kebutuhan; dan peningkatan kapasitas SDM	Penyediaan Dukungan Lahan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan kebutuhan alkes, obat dan BMHP; pemenuhan kebutuhan dan pengembangan SDM	
		Penguatan sistem rujukan berjenjang, peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan dasar (FKTP) dan fasilitas rujukan (FKRTL), dan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan	Menjamin akses pelayanan kesehatan dasar yang merata, terjangkau dan berkualitas; mengembangkan sistem rujukan berjenjang yang efisien dan berbasis teknologi informasi.	
		Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Perencanaan Kinerja yang terintegrasi, pengukuran kinerja yang objektif dan terukur, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan	

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas dapat digambarkan arah kebijakn RPJMD sudah selaras dengan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan, artinya untuk mencapai tujuan dari RPJMD sudah dituangkan dalam bentuk arah kebijakan di Dinas Kesehatan. Secara operasional Dinas Kesehatan sudah menurunkan kebijakan RPJMD sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program Dinas Kesehatan merupakan kumpulan seluruh program yang akan menjadi acuan dan dimuat dalam Bab IV Renstra Dinas Kesehatan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029. Kegiatan Dinas Kesehatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Perencanaan yang baik harus mempunyai program prioritas yang jelas sehingga kegiatan pembangunan daerah khususnya kesehatan dapat difokuskan pada sasaran yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar dampaknya terhadap pembangunan Kota Padang akan menjadi lebih optimal, meskipun ketersediaan dana sangat terbatas. Perencanaan program mencakup program unggulan yang terkait langsung dengan visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di bidang.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Dinas Kesehatan						
Mengura ngi beban biaya kesehata n dengan BPJS Kesehata n Gratis bagi warga kota Padang	Memper kuat Sistem Kesehat an Daerah dan Meningk atnya Akses Pelayan an Kesehat an				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Peningkatan Visite Rate		
		Universal Health Coverage (UHC)	Meningkat nya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase Keaktifan Kepesertaan JKN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota	
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan Dokter Warga .		Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Jumlah Kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Persentase UKBM yang di bina		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Jumlah Kematian Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	
					Prevalensi Stunting (SSGI)		
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Balita	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Meningkat nya kualitas perberdaya an masyarakat di bidang kesehatan			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Persentas e PHBS		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkat nya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Peningkatan INM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksa nanya Penyedia an Fasilitas Pelayana n Kesehata n untuk UKM dan UKP Kewenan gan Daerah Kabupate n/Kota		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
						Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Pengembangan Puskesmas	
						Pembangunan Puskesmas	
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaks nanya Penyedia an Layanan Kesehata n untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Operasional Pelayanan Puskesmas	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Persentase Posyandu Aktif		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Success Rate TB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Peningkatan Skrining Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
						Pengelolaan Layanan Kelanjutusiaan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
						Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
			Meningkat nyakualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				Persentas e Tempat Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dibina		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
		Peningkat an Ketersedia an sarana prasarana , alkes, SDMK, dan	Meningkat nya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Kefarmasian		Terlaksananya Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnyakualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman			Program Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	
				Persentase PIRT yang sudah pelatihan pangan		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Persentase Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diawasi		Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan minuman industri rumah tangga	
						Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
				Persentase apotik dan toko obat yang dibina		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Meningkat nya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase Ketersediaan Alkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksa nanya Penyedia an Fasilitas Pelayana n Kesehata n untuk UKM dan UKP Kewenan gan Daerah Kabupate n/Kota		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Meningkat nya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Peningkatan kompetensi SDMK	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Perencan aan kebutuha n Sumber Daya Kesehata n		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
						Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	
				Jumlah sumber daya manusia kesehata n		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Peningkatan INM Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorang dan Upaya Kesehatan masyarakat	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
						Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah			Nilai SAKIP		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Meningkat nya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	
				Terlaksa nanya Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehata n		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	
				Terlaksa nanya Administ rasi Keuanga n Dinas Kesehata n		Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kesehatan		Administrasi Umum Dinas Kesehatan	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedian ya BLUD yang Menyedia kan Pelayana n dan Penunjan g Pelayana n		Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (24 Puskesmas)	
	Memper kuat Sistem Kesehat an Daerah dan Meningk atnya Akses Pelayan an Kesehat an				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Peningkatan Visite Rate		
		Peningkat an Kesehatan Pelayanan Dasar dan Rujukan			Peningkatan INM Rumah Sakit		
			Meningkat nya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase Terlaksanany a Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/K ota	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	
				Dokume n Administ rasi Keuanga n Dinas Kesehata		1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				n			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.00 08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.00 02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.00 02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkat nya kualitas kesehatan		Persentase Puskesmas dan RSUD yang	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			perorangan dan masyarakat		melaksana n pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
						1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Al at Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.00 14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Al at Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.00 20 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau	1.02.02.2.01.00 22 - Pengembangan Rumah Sakit	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
					dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.00 17 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.00 26 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.00 02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.00 03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
						1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
						1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensin ya (Orang)	1.02.03.2.03.00 01 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel diatas menjelaskan program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Tujuan Dinas Kesehatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Adalah Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah dan Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan. Tujuan tersebut telah diturunkan menjadi lima sasaran yang selanjutnya dijelaskan masing masing sasaran tersebut dalam bentuk outcome, output dan indikator. Program,

kegiatan dan subkegiatan merupakan cara untuk menjawab indikator yang harus dicapai.

4.1. Uraian Program Dinas Kesehatan

Rincian program dan pendanaan Dinas Kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

KODE PROGRAM	PROGRAM	OUTCOME	PAGU VALIDASI					CATATAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	317.030.952.712,98	353.744.590.257	358.513.069.769	363.367.964.653	372.002.961.119	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	56.669.271.615	2.260.494.000.000	2.070.821.500.000	1.944.005.495.000	1.829.951.444.500	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	25.497.450.749	4.800.000.000	5.040.000.000	5.392.800.000	5.932.080.000	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	102.980.143.252	102.580.143.252	107.709.150.415	115.248.790.944	126.773.670.038	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.047.581.000	627.312.000	658.677.600	704.785.032	775.263.535	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	0	30.000.000	31.500.000	33.705.000	37.075.500	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	331.153.000	217.028.000	227.879.400	243.830.958	268.214.054	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	1.674.383.215	1.025.926.491	1.077.222.816	1.152.628.413	1.267.891.254	

Sumber : Dinas Kesehatan

4.2. Uraian Kegiatan Dinas Kesehatan

Rincian kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Padang

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				423,064,213,179.98		458,195,000,000		468,186,000,000		480,718,000,000		501,088,000,000		501,088,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				317,030,952,712.98		353,744,590,257		358,513,069,769		363,367,964,653		372,002,961,119		372,002,961,119	
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	317,030,952,712.98	100	353,744,590,257	100	358,513,069,769	100	363,367,964,653	100	372,002,961,119	100	372,002,961,119	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan				131,000,000.00		131,000,000		131,000,000		131,000,000		131,000,000		131,000,000	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100	131,000,000.00	100	131,000,000	100	131,000,000	100	131,000,000	100	131,000,000	100	131,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan	2	1	10,000,000.00	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1	1	20,000,000.00	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	20,000,000.00	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	1	1	51,000,000.00	1	51,000,000	1	51,000,000	1	51,000,000	1	51,000,000	1	51,000,000	
Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan				271,921,546,613.02		313,767,250,157		314,943,797,669		315,877,438,553		324,315,265,019		324,315,265,019	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Kesehatan yang tepat waktu	26	26	271,921,546,613.02	26	313,767,250,157	26	314,943,797,669	26	315,877,438,553	26	324,315,265,019	26	324,315,265,019	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,499	2120	270,421,546,613.02	2232	312,117,250,157	2455	313,293,797,669.00	2578	314,227,438,553	2,707	322,665,265,019.00	2707	322,665,265,019	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	1,500,000,000.00	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan				2,226,514,100.00		2,228,514,100		2,230,714,100		2,233,134,100		2,233,134,100		2,233,134,100	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan	Barang milik daerah pada Dinas Kesehatan yang dikelola dengan baik	100	100	2,226,514,100.00	100	2,228,514,100	100	2,230,714,100	100	2,233,134,100	100	2,233,134,100	100	2,233,134,100	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan	12	12	2,206,514,100.00	12	2,206,514,100	12	2,206,514,100	12	2,206,514,100	12	2,206,514,100	12	2,206,514,100	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	barang milik daerah SKPD														
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	20,000,000.00	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	26,620,000	2	26,620,000	
Administrasi Umum Dinas Kesehatan				907,000,000.00		922,500,000		924,100,000		932,100,000		934,100,000		934,100,000	
Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kesehatan	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12	12	907,000,000.00	12	922,500,000	12	924,100,000	12	932,100,000	12	934,100,000	12	934,100,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	25,000,000.00	1	27,500,000	1	28,000,000	1	29,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	1	350,000,000.00	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1	10,000,000.00	1	11,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	180,000,000.00	1	190,000,000	1	190,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2	2	20,000,000.00	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Disediakan														
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24	24	2,000,000.00	24	2,000,000	24	2,100,000	24	2,100,000	24	2,100,000	24	2,100,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	20,000,000.00	12	22,000,000	12	23,000,000	12	24,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	300,000,000.00	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40,000,000.00		154,500,000		48,000,000		49,000,000		51,620,000		51,620,000	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1	1	40,000,000.00	1	154,500,000	1	48,000,000	1	49,000,000	1	51,620,000	1	51,620,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	285	6	20,000,000.00	50	132,500,000	5	24,000,000	5	24,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	9	20,000,000.00	9	22,000,000	9	24,000,000	9	25,000,000	9	26,620,000	9	26,620,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,329,996,000.00		1,405,000,000		1,516,000,000		1,681,500,000		1,706,050,000		1,706,050,000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	1,329,996,000.00	100	1,405,000,000	100	1,516,000,000	100	1,681,500,000	100	1,706,050,000	100	1,706,050,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	4,996,000.00	1	5,000,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	6,600,000	1	6,600,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	950,000,000.00	12	1,000,000,000	12	1,100,000,000	12	1,250,000,000	12	1,264,450,000	12	1,264,450,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	375,000,000.00	12	400,000,000	12	410,000,000	12	425,000,000	12	435,000,000	12	435,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,974,896,000.00		4,220,485,000		4,712,583,000		5,056,241,000		5,224,241,000		5,224,241,000	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100	100	3,974,896,000.00	100	4,220,485,000	100	4,712,583,000	100	5,056,241,000	100	5,224,241,000	100	5,224,241,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	pemerintah daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	24,000,000.00	1	25,000,000	1	26,000,000	1	27,000,000	1	29,000,000	1	29,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69	93	1,400,000,000.00	93	1,500,000,000	93	1,600,000,000	93	1,634,000,000	93	1,700,000,000	93	1,700,000,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	140	320,000,000.00	140	241,500,000	140	387,200,000	140	425,920,000	140	425,920,000	140	425,920,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	333	307	220,000,000.00	330	242,000,000	360	266,200,000	370	292,820,000	370	292,820,000	370	292,820,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	2	2,010,896,000.00	2	2,211,985,000	2	2,433,183,000	2	2,676,501,000	2	2,776,501,000	2	2,776,501,000	
Peningkatan Pelayanan BLUD				36,499,999,999.96		30,915,341,000		34,006,875,000		37,407,551,000		37,407,551,000		37,407,551,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	12	12	36,499,999,999.96	12	30,915,341,000	12	34,006,875,000	12	37,407,551,000	12	37,407,551,000	12	37,407,551,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bungus)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,791,500,000.00	1	1,475,650,000	1	1,623,215,000	1	1,785,536,000	1	792,649	1	792,649	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lubuk Kilangan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,715,500,000.00	1	1,502,050,000	1	1,652,255,000	1	1,817,480,000	1	1,817,480,000	1	1,817,480,000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lubuk Begalung)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	2,165,500,000.00	1	1,777,050,000	1	1,954,755,000	1	2,150,230,000	1	2,150,230,000	1	2,150,230,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pagambiran)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,510,500,000.00	1	1,276,550,000	1	1,404,205,000	1	1,544,625,000	1	1,544,625,000	1	1,544,625,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Seberang Padang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,240,500,000.00	1	1,034,550,000	1	1,138,005,000	1	1,251,805,000	1	1,251,805,000	1	1,251,805,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pemancungan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	943,500,000.00	1	817,850,000	1	899,635,000	1	989,598,000	1	989,598,000	1	989,598,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rawang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1	1	905,500,000.00	1	776,050,000	1	853,655,000	1	939,020,000	1	939,020,000	1	939,020,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelayanan														
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Andalas)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	2,670,500,000.00	1	2,387,550,000	1	2,626,305,000	1	2,888,935,000	1	2,888,935,000	1	2,888,935,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padang Pasir)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	2,024,500,000.00	1	1,676,950,000	1	1,844,645,000	1	2,029,109,000	1	2,029,109,000	1	2,029,109,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ulak Karang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,005,000,000.00	1	831,050,000	1	914,155,000	1	1,005,570,000	1	1,005,570,000	1	1,005,570,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Air Tawar)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	746,500,000.00	1	601,150,000	1	661,265,000	1	727,391,000	1	727,391,000	1	727,391,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Alai)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,054,500,000.00	1	829,950,000	1	912,945,000	1	1,004,239,000	1	1,004,239,000	1	1,004,239,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nanggalo)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,586,500,000.00	1	1,415,150,000	1	1,556,665,000	1	1,712,331,000	1	1,712,331,000	1	1,712,331,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lapai)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	870,500,000.00	1	737,550,000	1	811,305,000	1	892,435,000	1	892,435,000	1	892,435,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Belimbing)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,682,500,000.00	1	1,465,750,000	1	1,612,325,000	1	1,773,557,000	1	1,773,557,000	1	1,773,557,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kuranji)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,502,500,000.00	1	1,267,750,000	1	1,394,525,000	1	1,533,977,000	1	1,533,977,000	1	1,533,977,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambacang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,731,500,000.00	1	1,519,650,000	1	1,671,615,000	1	1,838,776,000	1	1,838,776,000	1	1,838,776,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pauh)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	2,280,500,000.00	1	1,848,550,000	1	2,033,405,000	1	2,236,745,000	1	2,236,745,000	1	2,236,745,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Air Dingin)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	2,150,500,000.00	1	1,815,550,000	1	1,997,105,000	1	2,196,815,000	1	2,196,815,000	1	2,196,815,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lubuk Buaya)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	3,107,500,000.00	1	2,648,250,000	1	2,913,075,000	1	3,204,382,000	1	3,204,382,000	1	3,204,382,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Koto Panjang Ikua Koto)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,047,500,000.00	1	822,250,000	1	904,475,000	1	994,922,000	1	994,922,000	1	994,922,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Anak Air)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1	1	1,252,500,000.00	1	1,047,750,000	1	1,152,525,000	1	1,267,777,000	1	1,267,777,000	1	1,267,777,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelayanan														
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dadok Tunggul Hitam)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	923,500,000.00	1	795,850,000	1	875,435,000	1	962,978,000	1	962,978,000	1	962,978,000	
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Parak Karakah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	590,999,999.96	1	544,891,000	1	599,380,000	1	659,318,000	1	659,318,000	1	659,318,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				102,980,143,252.00		102,580,143,252		107,709,150,415		115,248,790,944		126,773,670,038		126,773,670,038	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-	46.00		55.00		61.00		70.00		80.00		80.00		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	88.70	85.00		90.00		93.00		95.00		95.00		95.00		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	pelayanan kesehatan sesuai standar														
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	63	66.10		67.90		69.70		72.00		74.30		74.30		
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	-	1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	-	1.92		2.88		3.84		4.80		5.70		5.70		
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23.40	23.40		23.40		23.40		23.40		23.40		23.40		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	81	81.05		81.10		81.15		81.20		81.25		81.25		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	75	30.00		35.00		40.00		45.00		50.00		50.00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Persentase lanjut usia yang mandiri	94	77.00		79.00		81.00		83.00		85.00		85.00		

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12.40	11.40		10.40		9.40		8.40		7.40		7.40		
	Cakupan penemuan kasus TB	89	96.00		96.00		96.00		96.00		96.00		96.00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				9,241,298,599.00		8,299,836,600		8,767,188,638		15,608,765,342		26,363,645,153		26,363,645,153	
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang sarana prasarannya sesuai standar	100	100	9,241,298,599.00	100	8,299,836,600	100	8,767,188,638	100	15,608,765,342	100	26,363,645,153	100	26,363,645,153	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	-	-	7		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	-	-	-	1		-		-	-	-	-	-	-	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1	1	400,000,000.00	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	10	5	2,828,000,000.00	4	2,000,000,000	5	2,467,352,038	5	8,218,765,342	5	18,973,645,153	5	18,973,645,153	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	-	6	160,690,000.00	5	300,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	39	51	852,803,500.00	51	500,000,000	51	500,000,000	51	1,500,000,000	51	1,500,000,000	51.0	1,500,000,000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	1	4,964,805,099.00	1	4,964,836,600	1	4,964,836,600	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya	61,125	100,000	25,000,000.00	100,000	25,000,000	100,000	25,000,000	100,000	30,000,000	100,000	30,000,000	100,000	30,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas														
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota				93,540,003,653.00		94,076,466,652		98,743,961,777		99,420,025,602		100,180,024,885		100,180,024,885	
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100	100.00	93,540,003,653.00	100.00	94,076,466,652	100.00	98,743,961,777	100.00	99,420,025,602	100	100,180,024,885	100.00	100,180,024,885	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,510	15,314	1,805,272,260.00	15,658	2,000,000,000	16,002	2,000,000,000	16,347	2,000,000,000	16,692	2,000,000,000	16,692	2,000,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13,939	15,314	115,629,800.00	15,658	127,192,780	16,002	139,912,058	16,347	153,903,263	16,692	169,293,589	16,692	169,293,589	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13,499	14,87 8	76,000,000.00	15,03 9	86,000,000	15,20 1	96,000,000	15,36 3	106,000,000	15,52 5	116,000,000	15,52 5	116,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,223	36,07 8	72,820,000.00	39,35 7	80,102,000	42,63 7	88,112,200	45,91 7	96,923,420	49,19 7	98,000,000	49,19 7	98,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	132,62 0	57,17 7	946,498,550.00	73,51 3	1,040,148,405	98,01 8	1,050,148,405	114,3 54	1,060,148,405	57,17 7	1,070,148,405	57,17 7	1,070,148,40 5	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	605,65 5	617,9 75	25,000,000.00	630,3 35	30,000,000	642,9 41	35,000,000	655,8 00	40,000,000	668,9 16	45,000,000	668,9 16	45,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,639	68,73 6	86,200,000.00	74,46 4	97,820,000	80,19 2	97,820,000	85,92 0	117,820,000	85,92 0	117,820,000	85,92 0	117,820,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,574	61,74 4	22,000,000.00	62,36 1	24,200,000	62,98 4	26,620,000	63,61 3	29,282,000	65,72 7	32,210,200	65,72 7	32,210,200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan	17,727	17,74 7	2,760,000,000.00	17,92 5	2,800,000,000	18,10 4	2,850,000,000	18,28 5	2,875,000,000	18,83 3	2,900,000,000	18,83 3	2,900,000,00 0	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	kesehatan sesuai standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	2,353	2,052	425,018,000.00	2,077	430,000,000	2,102	4,350,000,000	2,127	4,500,000,000	2,169	4,550,000,000	2,169	4,550,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	26,790	21,185	4,432,894,703.00	18,279	4,260,225,203	16,211	3,806,102,443	14,634	3,493,664,683	13,414	3,237,538,153	13,414	3,237,538,153	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	23,640	22,000	121,600,000.00	22,000	121,600,000	23,000	125,000,000	23,000	125,000,000	23,000	125,000,000	23,000	125,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	17	8	32,000,000.00	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	-	3	27,500,000.00	4	27,500,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	1	3,670,007,690.00	1	3,700,000,000	1	3,700,000,000	1	4,300,000,000	1	4,300,000,000	1	4,300,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6	2	161,214,710.00	2	165,000,000	2	165,000,000	2	165,000,000	2	165,000,000	2	165,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	14	12	1,680,004,000.00	12	1,680,004,000	12	1,680,004,000	12	1,703,565,000	12	1,803,500,000	12	1,803,500,000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jmlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1	1	100,000,000.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25	20	30,000,000.00	20	30,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	86	34	330,033,936.00	36	345,000,000	36	345,000,000	36	367,687,000	36	372,380,000	36	372,380,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	12	155,800,000.00	12	155,800,000	12	155,800,000	12	181,380,000	12	188,518,000	12	188,518,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalaghunaa n NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91	40	15,342,800.00	40	15,500,000	40	15,500,000	40	16,877,080	40	18,564,768	40	18,564,768	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	-	2	22,500,000.00	3	25,000,000	3	25,000,000	3	27,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2	2	5,770,262,248.00	2	5,780,000,000	2	5,780,000,000	2	6,137,288,000	2	6,762,000,000	2	6,762,000,000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	12	26	64,490,503,200.00	26	64,719,041,593	26	65,000,000,000	26	65,000,000,000	26	65,000,000,000	26	65,000,000,000	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaa n NAPZA di	2,901	4,200	11,000,000.00	4,600	11,500,000	4,800	12,000,000	5,000	13,310,000	5,200	14,641,000	5,200	14,641,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah														
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	182	55	20,000,000.00	58	22,000,000	58	22,000,000	58	25,000,000	58	25,000,000	58	25,000,000	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraa n kota sehat	-	1	300,000,000.00	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	1	2,894,846,111.00	1	2,900,000,000	1	2,900,000,000	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	12	200,275,804.00	12	200,500,000	12	200,500,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	24	-	-	-	-	24	750,000,000	-	-	-	-	-	-	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12	13,200,000.00	12	13,200,000	12	13,200,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3	52	82,500,000.00	52	83,000,000	52	110,000,000	52	120,000,000	52	132,000,000	52	132,000,000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	423,727,100.00	1	425,000,000	1	425,000,000	1	512,709,791	1	563,980,770	1	563,980,770	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,979	3,923	26,380,000.00	3,385	26,000,000	3,002	25,000,000	2,710	24,500,000	2,484	24,000,000	2,484	24,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	311	290	22,500,000.00	280	22,000,000	270	22,000,000	250	21,500,000	250	2,100,000	250	2,100,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	15	10	11,000,000.00	10	11,000,000	10	11,500,000	10	12,000,000	10	13,000,000	10	13,000,000	
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-	6	50,000,000.00	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	12	152,732,771.00	12	152,732,771	12	152,732,771	12	168,006,000	12	184,806,000	12	184,806,000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	12	109,440,000.00	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	
Pengelolaan Layanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12	300,999,970.00	12	331,099,900	12	364,209,900	12	400,630,960	12	440,694,000	12	440,694,000	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan imunisasi	12	26	1,536,300,000.00	26	1,536,300,000	26	1,536,300,000	26	1,690,830,000	26	1,692,330,000	26	1,692,330,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	2	11,000,000.00	2	12,000,000	2	13,500,000	2	15,000,000	2	16,500,000	2	16,500,000	
Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				45,000,000.00		45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000		45,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan system informasi yang terintegrasi dan tepat waktu	100	100.0 0	45,000,000.00	100.0 0	45,000,000	100.0 0	45,000,000	100.0 0	45,000,000	100	45,000,000	100.0 0	45,000,000	
Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraa n kota sehat	2	1	45,000,000.00	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				153,841,000.00		158,840,000		153,000,000		175,000,000		185,000,000		185,000,000	
Terlaksananya Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasyankes	100	100	153,841,000.00	100	158,840,000	100	153,000,000	100	175,000,000	100	185,000,000	100	185,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-	6	11,112,000.00	6	11,112,000	2	5,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola	27	27	17,728,000.00	27	17,728,000	27	18,000,000	27	20,000,000	27	20,000,000	27	20,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sesuai Standar														
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	24	101	125,001,000.00	101	130,000,000	101	130,000,000	101	140,000,000	101	150,000,000	101	150,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1,047,581,000.00		627,312,000		658,677,600		704,785,032		775,263,535	-	775,263,535	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase puskesmas dan RSUD dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100	775,263,535	
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1.30	1.36		1.40		1.50		1.57		1.60		1.60		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				452,677,000.00		220,000,000		220,000,000		220,000,000		220,868,535		220,868,535	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan	1	1	452,677,000.00	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,868,535	1	220,868,535	
Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	305	1,100	20,000,000.00	1,100	20,000,000	1,100	20,000,000	1,100	20,000,000	1,100	20,000,000	1,100	20,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	24	432,677,000.00	24	200,000,000	24	200,000,000	24	200,000,000	24	200,868,535	24	200,868,535	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				594,904,000.00		407,312,000		438,677,600		484,785,032		554,395,000		554,395,000	
Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis	282	120	594,904,000.00	150	407,312,000	180	438,677,600	210	484,785,032	210	554,395,000	210	554,395,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	282	120	594,904,000.00	150	407,312,000	180	438,677,600	210	484,785,032	210	554,395,000	210	554,395,000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				331,153,000.00		217,028,000		227,879,400		243,830,958		268,214,054		268,214,054	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar	40	80		80		80		80		80		80		
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	78	80		80		80		80		80		80		
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	40	80		80		80		80		80		80		
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan	70	80		80		80		80		80		80		

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	perizinan														
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100	100		100		100		100		100		100		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				63,210,000.00		63,210,000		64,936,400		73,210,000		63,210,000		63,210,000	
Persentase apotik dan toko obat yang dibina	Persentase apotik dan toko obat yang dibina	100	100	63,210,000.00	100	63,210,000	100	64,936,400	100	73,210,000	100	63,210,000	100	63,210,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	60	63,210,000.00	60	63,210,000	60	64,936,400	60	73,210,000	60	63,210,000	60	63,210,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100,000,000.00		-		-		-		42,061,054		42,061,054	
Persentase PIRT yang sudah pelatihan pangan	Persentase PIRT yang sudah pelatihan pangan	100	100	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100	42,061,054	100	42,061,054	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12	12	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12	42,061,054	12	42,061,054	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				30,000,000.00		15,875,000		25,000,000		32,677,958		25,000,000		25,000,000	
Persentase Tempat Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dibina	Persentase Tempat Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dibina	-	25	30,000,000.00	45	15,875,000	70	25,000,000	100	32,677,958	100	25,000,000	100	25,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	3	30,000,000.00	4	15,875,000	5	25,000,000	6	32,677,958	6	25,000,000	6	25,000,000	
Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan minuman industri rumah tangga				137,943,000.00		137,943,000		137,943,000		137,943,000		137,943,000		137,943,000	
Persentase Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diawasi	Persentase Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diawasi	100	100	137,943,000.00	100	137,943,000	100	137,943,000	100	137,943,000	100	137,943,000	100	137,943,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Out put	Baseli ne 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	101	40	137,943,000.00	40	137,943,000	40	137,943,000	40	137,943,000	40	137,943,000	40	137,943,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang aktif	100	100	1,674,383,215.00	100	1,025,926,491	100	1,077,222,816	100	1,152,628,413	100	1,267,891,254	100	1,267,891,254	
Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persentase Kecamatan Yang Menetapkan Kebijakan Kebijakan Germas	85	100		100		100		100		100		100		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,210,000,000.00		700,000,000		700,000,000		750,000,000		800,000,000		800,000,000	
Persentase UKBM yang di bina	Persentase UKBM yang di bina	85	82	1,210,000,000.00	83	700,000,000	84	700,000,000	85	750,000,000	85	800,000,000	85	800,000,000	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1	1	1,210,000,000.00	1	700,000,000	1	700,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	

			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
Bidang Urusan /Program/Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300,466,124.00		212,009,400		250,000,000		250,000,000		300,000,000		300,000,000	
Persentase PHBS	Persentase PHBS	64	82	300,466,124.00	83	212,009,400	84	250,000,000	85	250,000,000	85	300,000,000	85	300,000,000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan bersih hidup sehat	1	1	300,466,124.00	1	212,009,400	1	250,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				163,917,091.00		113,917,091		127,222,816		152,628,413		167,891,254		167,891,254	
Persentase Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	64	85	163,917,091.00	90	113,917,091	95	127,222,816	100	152,628,413	100	167,891,254	100	167,891,254	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	12	163,917,091.00	12	113,917,091	12	127,222,816	12	152,628,413	12	167,891,254	12	167,891,254	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rincian Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 4 Uraian Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2026-2030

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan	dokumen	2	1	6.392.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
X	XX	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
X	XX	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	12.766.800	1	20.000.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
X	XX	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	7.956.900	1	10.000.000,00	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
X	XX	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	laporan	1	1	31.725.000	1	51.000.000,00	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000
X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1.499	1966	235.416.036.975	2120	270.421.546.613,02	2232	312.117.250.157	2455	313.293.797.669,00	2578	314.227.438.553	2.707	322.665.265.019,00

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	1.323.000.000	12	1.500.000.000,00	12	1.650.000.000	12	1.650.000.000	12	1.650.000.000		
X	XX	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dokumen	12	12	1.577.817.800	12	2.206.514.100,00	12	2.206.514.100	12	2.206.514.100	12	2.206.514.100		
X	XX	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2	14.685.900	2	20.000.000,00	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000		
X	XX	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	20.827.000	1	25.000.000,00	1	27.500.000	1	28.000.000	1	29.000.000		

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	1	159.510.000	1	350.000.000,00	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
X	XX	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	1	42.780.000	1	10.000.000,00	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000		
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	173.475.000	1	180.000.000,00	1	190.000.000	1	190.000.000	1	195.000.000		
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	3.282.000	2	20.000.000,00	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
X	XX	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	24	2.000.000	24	2.000.000,00	24	2.000.000	24	2.100.000	24	2.100.000		

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	20.000.000	12	20.000.000,00	12	22.000.000	12	23.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	185.098.000	12	300.000.000,00	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
X	XX	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	285	15	20.000.000	6	20.000.000,00	50	132.500.000	5	24.000.000	5	24.000.000	5	25.000.000
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	4	5.895.000	9	20.000.000,00	9	22.000.000	9	24.000.000	9	25.000.000	9	26.620.000
X	XX	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	4.996.000	1	4.996.000,00	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	6.600.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	875.333.200	12	950.000.000,00	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.250.000.000	12	1.264.450.000
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	575.622.400	12	375.000.000,00	12	400.000.000	12	410.000.000	12	425.000.000	12	435.000.000
X	XX	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	24.000.000	1	24.000.000,00	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	29.000.000
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	69	93	1.354.370.000	93	1.400.000.000,00	93	1.500.000.000	93	1.600.000.000	93	1.634.000.000	93	1.700.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	-	4	5.000.000	140	320.000.000,00	140	241.500.000	140	387.200.000	140	425.920.000	140	425.920.000
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	333	320	117.684.500	307	220.000.000,00	330	242.000.000	360	266.200.000	370	292.820.000	370	292.820.000
X	XX	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	3	2	2.000.000.000	2	2.010.896.000,00	2	2.211.985.000	2	2.433.183.000	2	2.676.501.000	2	2.776.501.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bungus)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.844.019.511	1	1.791.500.000,00	1	1.475.650.000	1	1.623.215.000	1	1.785.536.000	1	792.649

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lubuk Kilangan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.888.064.478	1	1.715.500.000,00	1	1.502.050.000	1	1.652.255.000	1	1.817.480.000	1	1.817.480.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lubuk Begalung)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	2.258.601.661	1	2.165.500.000,00	1	1.777.050.000	1	1.954.755.000	1	2.150.230.000	1	2.150.230.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pagambiran)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.632.531.123	1	1.510.500.000,00	1	1.276.550.000	1	1.404.205.000	1	1.544.625.000	1	1.544.625.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Seberang Padang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.380.658.953	1	1.240.500.000,00	1	1.034.550.000	1	1.138.005.000	1	1.251.805.000	1	1.251.805.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pemandungan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.134.677.360	1	943.500.000,00	1	817.850.000	1	899.635.000	1	989.598.000	1	989.598.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rawang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	997.467.482	1	905.500.000,00	1	776.050.000	1	853.655.000	1	939.020.000	1	939.020.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Andalas)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	2.881.335.872	1	2.670.500.000,00	1	2.387.550.000	1	2.626.305.000	1	2.888.935.000	1	2.888.935.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padang Pasir)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	2.148.298.669	1	2.024.500.000,00	1	1.676.950.000	1	1.844.645.000	1	2.029.109.000	1	2.029.109.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ulak Karang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.103.988.232	1	1.005.000.000,00	831.050.000	1	914.155.000	1.005.570.000	1	1.005.570.000		
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Air Tawar)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	837.651.613	1	746.500.000,00	601.150.000	1	661.265.000	727.391.000	1	727.391.000		
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Alai)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.140.494.912	1	1.054.500.000,00	829.950.000	1	912.945.000	1.004.239.000	1	1.004.239.000		
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nanggalo)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.889.616.713	1	1.586.500.000,00	1.415.150.000	1	1.556.665.000	1.712.331.000	1	1.712.331.000		

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lapai)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.053.108.095	1	870.500.000,00	1	737.550.000	1	811.305.000	1	892.435.000	1	892.435.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Belimbing)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.949.039,037	1	1.682.500.000,00	1	1.465.750.000	1	1.612.325.000	1	1.773.557.000	1	1.773.557.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kuranji)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.754.445.013	1	1.502.500.000,00	1	1.267.750.000	1	1.394.525.000	1	1.533.977.000	1	1.533.977.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambacang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.908.054.262	1	1.731.500.000,00	1	1.519.650.000	1	1.671.615.000	1	1.838.776.000	1	1.838.776.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pauh)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	2.488.195.322	1	2.280.500.000,00	1	1.848.550.000	1	2.033.405.000	1	2.236.745.000	1	2.236.745.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Air Dingin)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	2.305.985.245	1	2.150.500.000,00	1	1.815.550.000	1	1.997.105.000	1	2.196.815.000	1	2.196.815.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lubuk Buaya)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	3.162.740.024	1	3.107.500.000,00	1	2.648.250.000	1	2.913.075.000	1	3.204.382.000	1	3.204.382.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Koto Panjang Ikua Koto)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1.205.742.036	1	1.047.500.000,00	1	822.250.000	1	904.475.000	1	994.922.000	1	994.922.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
										2025		2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Anak Air)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1		1.425.749.420	1		1.252.500.000,00	1		1.047.750.000	1		1.152.525.000	1		1.267.777.000	1.267.777.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dadok Tunggul Hitam)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1		1.102.496.341	1		923.500.000,00	1		795.850.000	1		875.435.000	1		962.978.000	962.978.000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Parak Karakah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1		642.058.131	1		590.999.999,96	1		544.891.000	1		599.380.000	1		659.318.000	659.318.000
1	02	02	2	01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	02	2	01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Unit	-	-	490.000.000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	02	2	01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	1	1	1.339.500.000	1	400.000.000,00	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000		
1	02	02	2	01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Unit	10	5	7.647.212.000	5	2.828.000.000,00	4	2.000.000.000	5	2.467.352.038	5	8.218.765.342	5	18.973.645.153
1	02	02	2	01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Unit	-	15	200.000.000	6	160.690.000,00	5	300.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	39	20	3.156.372.000	51	852.803.500,00	51	500.000.000	51	500.000.000	51	1.500.000.000	51	1.500.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	1	3.557.727.871	1	4.964.805.099,00	1	4.964.836.600	1	4.964.836.600	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000
1	02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	61.125	100.000	-	100.000	25.000.000,00	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	100.000	30.000.000	100.000	30.000.000
1	02	02	2	01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	1	1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	14.510	15.142	1.887.381.460	15.314	1.805.272.260,00	15.658	2.000.000.000	16.002	2.000.000.000	16.347	2.000.000.000	16.692	2.000.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13.939	15.142	98.386.000	15.314	115.629.800,00	15.658	127.192.780	16.002	139.912.058	16.347	153.903.263	16.692	169.293.589
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13.499	14.716	27.280.633	14.878	76.000.000,00	15.039	86.000.000	15.201	96.000.000	15.363	106.000.000	15.525	116.000.000
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	68.223	32.798	66.200.000	36.078	72.820.000,00	39.357	80.102.000	42.637	88.112.200	45.917	96.923.420	49.197	98.000.000
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jiwa	132.620	32.672	1.096.931.550	57.177	946.498.550,00	73.513	120.000.000	98.018	130.000.000	114.354	140.000.000	57.177	150.000.000
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	605.655	605.858	14.574.000	617.975	25.000.000,00	630.335	30.000.000	642.941	35.000.000	655.800	40.000.000	668.916	45.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	27.639	63.008	199.400.000	68.736	86.200.000,00	74.464	80.000.000	80.192	80.000.000	85.920	100.000.000	85.920	100.000.000
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	71.574	61.133	20.000.000	61.744	22.000.000,00	62.361	24.200.000	62.984	26.620.000	63.613	29.282.000	65.727	32.210.200
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	17.727	17.571	2.756.769.200	17.747	2.760.000.000,00	17.925	2.800.000.000	18.104	2.850.000.000	18.285	2.875.000.000	18.833	2.900.000.000
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Orang	2.353	2.027	279.733.200	2.052	425.018.000,00	2.077	430.000.000	2.102	4.350.000.000	2.127	4.500.000.000	2.169	4.550.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	26.790	23.468	4.421.442.226	21.185	4.432.894.703,00	18.279	4.092.041.030	16.211	3.637.918.270	14.634	3.325.480.510	13.414	3.069.353.980
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	23.640	21.000	72.331.000	22.000	121.600.000,00	22.000	121.600.000	23.000	125.000.000	23.000	125.000.000	23.000	125.000.000
1	02	02	2	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	17	-	-	8	32.000.000,00	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000
1	02	02	2	02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	-	-	-	3	27.500.000,00	4	27.500.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1	3.721.807.690	1	3.670.007.690,00	1	3.700.000.000	1	3.700.000.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6	2	155.495.710	2	161.214.710,00	2	165.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	14	12	1.698.364.000	12	1.680.004.000,00	12	1.680.004.000	12	1.680.004.000	12	1.703.565.000	12	1.803.500.000
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jmlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	1		1	100.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	25	25	5.364.000	20	30.000.000,00	20	30.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	86	34	325.521.313	34	330.033.936,00	36	345.000.000	36	345.000.000	36	367.687.000	36	372.380.000
1	02	02	2	02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dokumen	-	12	162.000.000	12	155.800.000,00	12	155.800.000	12	155.800.000	12	181.380.000	12	188.518.000
1	02	02	2	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalaghunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	91	40	13.716.000	40	15.342.800,00	40	15.500.000	40	15.500.000	40	16.877.080	40	18.564.768

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Dokumen	-	2	-	2	22.500.000,00	3	25.000.000	3	25.000.000	3	27.000.000	3	30.000.000
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	2	5.313.170.104	2	5.770.262.248,00	2	5.780.000.000	2	5.780.000.000	2	6.137.288.000	2	6.762.000.000
1	02	02	2	01	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	12	26	33.185.676.000	26	64.490.503.200,00	26	64.719.041.593	26	65.000.000.000	26	65.000.000.000	26	65.000.000.000
1	02	02	2	02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	2.901	4.000	39.638.000	4.200	11.000.000,00	4.600	11.500.000	4.800	12.000.000	5.000	13.310.000	5.200	14.641.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	182	-	-	55	20.000.000,00	58	22.000.000	58	22.000.000	58	25.000.000	58	25.000.000
1	02	02	2	01	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kota sehat	Dokumen	-	1	300.000.000	1	300.000.000,00	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12	1	2.827.971.711	1	2.894.846.111,00	1	2.900.000.000	1	2.900.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	12	12	188.157.804	12	200.275.804,00	12	200.500.000	12	200.500.000	12	250.000.000	12	300.000.000
1	02	02	2	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	24	-	-	-	-	-	24	750.000.000	-	-	-	-	

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	12	10.800.000	12	13.200.000,00	12	13.200.000	12	13.200.000	12	15.000.000	12	15.000.000
1	02	02	2	02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	3	52	-	52	82.500.000,00	52	83.000.000	52	110.000.000	52	120.000.000	52	132.000.000
1	02	02	2	02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	68.547.000	1	423.727.100,00	1	425.000.000	1	425.000.000	1	512.709.791	1	563.980.770
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3.979	4.346	14.112.000	3.923	26.380.000,00	3.385	26.000.000	3.002	25.000.000	2.710	24.500.000	2.484	24.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	311	300	9.904.000	290	22.500.000,00	280	22.000.000	270	22.000.000	250	21.500.000	250	2.100.000
1	02	02	2	02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	kasus	15	10	5.400.000	10	11.000.000,00	10	11.000.000	10	11.500.000	10	12.000.000	10	13.000.000
1	02	02	2	02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	-	6	-	6	50.000.000,00	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	12	12	152.732.771	12	152.732.771,00	12	152.732.771	12	152.732.771	12	168.006.000	12	184.806.000
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	2	12	67.400.000	12	109.440.000,00	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	02	0047	Pengelolaan Layanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	-	12	312.699.970	12	300.999.970,00	12	331.099.900	12	364.209.900	12	400.630.960	12	440.694.000
1	02	02	2	02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaaan pelayanan imunisasi	Dokumen	12	26	1.643.240.000	26	1.536.300.000,00	26	1.536.300.000	26	1.536.300.000	26	1.690.830.000	26	1.692.330.000
1	02	02	2	02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	-	2	4.150.000	2	11.000.000,00	2	12.000.000	2	13.500.000	2	15.000.000	2	16.500.000
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kota sehat	Dokumen	2	1	26.576.000	1	45.000.000,00	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	02	2	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	-	5	31.604.000	6	11.112.000,00	6	11.112.000	2	5.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000
1	02	02	2	04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	27	28	17.728.000	27	17.728.000,00	27	17.728.000	27	18.000.000	27	20.000.000	27	20.000.000
1	02	02	2	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	24	101	58.208.000	101	125.001.000,00	101	130.000.000	101	130.000.000	101	140.000.000	101	150.000.000
1	02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Orang	305	1.100	20.000.000	1.100	20.000.000,00	1.100	20.000.000	1.100	20.000.000	1.100	20.000.000	1.100	20.000.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	24	300.625.000	24	432.677.000,00	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.868.535
1	02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang	282	90	514.882.000	120	594.904.000,00	150	407.312.000	180	438.677.600	210	484.785.032	210	554.395.000
1	02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	100	60	63.210.000	60	63.210.000,00	60	63.210.000	60	64.936.400	60	73.210.000	60	63.210.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	04	2	03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	12	12	-	12	100.000.000,00	-	-	-	-	12	42.061.054		
1	02	04	2	05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	-	2	15.875.000	3	30.000.000,00	4	15.875.000	5	25.000.000	6	32.677.958	6	25.000.000
1	02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Unit	101	40	137.943.000	40	137.943.000,00	40	137.943.000	40	137.943.000	40	137.943.000	40	137.943.000

Kode						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	05	2	01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemintraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	1	658.635.000	1	1.210.000.000,00	1	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000
1	02	05	2	02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan bersih hidup sehat	Dokumen	1	1	252.708.000	1	300.466.124,00	1	212.009.400	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembagan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	12	114.583.491	12	163.917.091,00	12	113.917.091	12	127.222.816	12	152.628.413	12	167.891.254

Sumber : Dinas Kesehatan

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Rincian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan pendanaan Dinas Kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 5 Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Pengembangan Puskesmas	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
				Operasional Pelayanan Puskesmas	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Pengelolaan Layanan Kelanjutusiaan	
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,00	99,10	99,20	99,30	100	100	
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	12	12	11	11	10	10	
3	Jumlah Kematian Balita	Orang	133	131	129	127	125	123	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (SSGI) Mulai tahun 2025 survei SSGI tidak ada.	%	17,9	16,65	15,40	14,15	12,9	11,65	
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (EPPGBM)	%	2,55	2,53	2,51	2,50	2,50	2,47	
6	Success rate TB	%	93,0	93,2	93,5	94,0	94,5	95,0	
7	Peningkatan INM Rumah Sakit	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	89,0	
8	Nilai SAKIP	Angka	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	8,5	

4.6. Target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rumah Sakit	22	23	25	25	25	25
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Rumah Sakit	0	4	18	0	0	0
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	59.472	126.958	131.603	136.248	139.344	139.344
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	75	75	75	75	75	75
5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	19.824	45.932	46.964	47.996	49.028	49.028

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	72	72	72	72	72	72
7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	69.256	163.650	165.429	167.208	168.987	168.987
8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	72	72	72	72	72	72
9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	131.478	145.438	151.428	157.418	163.408	163.408
10	kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita Sesuai Standar	Orang	16.333	16.333	16.333	16.333	16.333	16.333

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	68.423	155.553	171.889	196.394	212.730	212.730
12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	605.858	617.975	630.335	642.941	655.800	668.916
14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	924	924	924	924	924	924
15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	87.063	189.024	206.208	223.392	240.576	257.760

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	120	120	120	120	120	120
17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	61.133	61.744	62.361	62.984	63.613	64.249
18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	924	924	924	924	924	924
19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	17.571	17.747	17.925	18.104	18.285	18.468

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	924	924	924	924	924	924
21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	2.027	2.052	2.077	2.102	2.127	2.152
22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	48	48	48	48	48	48
23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	23.468	21.185	18.279	16.211	14.634	13.414
24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Unit	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	245	245	245	245	245	245

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Kesehatan yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang.

WALI KOTA PADANG



FADLY AMRAN

METADATA

I. METADATA INDIKATOR SASARAN KEPALA DAERAH

1. Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.

Nama Indikator	Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat
Definisi	Penilaian hasil evaluasi kota sehat Adalah penilaian yang diberikan untuk mengukur pencapaian pemerintah daerah dan Masyarakat dalam menciptakan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui penerapan 9 tatanan
Rumus Perhitungan	$Skor\ Kota\ Sehat = \frac{Jumlah\ skor}{Skor\ Maksimal} \times 100\%$ Keterangan Skor Kota Sehat : Jumlah skor atau nilai yang diperoleh Jumlah skor : Jumlah skor yang didapat dari 9 tatanan Skor maksimal : jumlah skor maksimal (13.600)
Interpretasi	Penilaian kota sehat dengan beberapa kategori penghargaan sebagai berikut : 1. Padapa , apabila skor 71 % dari skor maksimal 2. Wiwerda, apabila skor 81 % dari skor maksimal 3. Wistara, Tingkat tertinggi apabila skor 91% dari skor maksimal
Sumber Data	Kementerian Kesehatan dan Kementerian dalam negeri
Frekuensi	Satu kali dua tahun

2. Derajat Kesehatan Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Kesehatan
Definisi	Merupakan indikator komposit yang dirancang untuk menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan data kesehatan berbasis komunitas
Rumus Perhitungan	Dihitung sebagai indeks komposit berdasarkan skor setiap indikator kesehatan. Setiap indikator diungkapkan dalam skor, lalu dirata-rata untuk menghasilkan nilai indeks dalam rentang 0–1, dimana nilai lebih tinggi menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Contohnya: • Nilai terendah: 0,247 (Pegunungan Bintang, Papua) • Nilai tertinggi: 0,709 (Kota Magelang, Jawa Tengah)
Interpretasi	Terdiri dari 24 indikator kesehatan dengan korelasi tertinggi terhadap umur harapan hidup (UHH), antara lain: • Prevalensi gizi buruk, pendek, kurus, gemuk (balita). • Prevalensi diare, pneumonia, hipertensi, gangguan mental, asma, penyakit gigi dan mulut. • Disabilitas, cedera, penyakit sendi, ISPA.

Nama Indikator	Indeks Kesehatan
	• Perilaku cuci tangan, merokok. • Akses air bersih & sanitasi. • Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan neonatal-1, imunisasi lengkap, penimbangan balita. • Rasio dokter per puskesmas, rasio bidan per desa.
Sumber Data	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Potensi Desa (Podes)
Frekuensi	Tahunan

II. METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Universal Health Coverage (UHC)

Nama indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Definisi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program wajib yang mencakup seluruh penduduk Indonesia untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dasar, di mana kepesertaan bersifat universal (Universal Health Coverage/UHC) dengan mengintegrasikan program jaminan kesehatan sebelumnya dan dikelola oleh BPJS Kesehatan, mencakup peserta mandiri (PBPU/BP), peserta penerima upah (PPU), hingga Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayar pemerintah, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan finansial dan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi semua warga negara
Rumus Perhitungan	<i>Cakupan kepesertaan JKN</i> $= \frac{\sum \text{Penduduk terdaftar sebagai peserta JKN} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } n}$
Interpretasi	Peningkatan kepesertaan JKN akan meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) dimana syarat dikatakan UHC apabila cakupan kepesertaan 98 % dan keaktifan peserta 80%
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan BPJS
Frekuensi	Tahunan

2. Peningkatan Pelayanan Integrasi Layanan Primer

Nama Indikator	a. Jumlah Kematian Ibu
Definisi	Jumlah Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal akibat kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelahnya. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai derajat kesehatan perempuan di suatu wilayah, di mana penyebab kematiannya berkaitan dengan komplikasi kehamilan dan bukan karena kecelakaan

Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah Kematian IBu} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang meninggal pada tahun } n}{\text{Jumlah Populasi Ibu hamil, bersalin, dan ibu nifas pada tahun } n}$
Interpretasi	Semakin kecil jumlah kematian berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan serta kualitas layanan primer.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	b. Jumlah Kematian Balita
Definisi	Jumlah Kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (atau 0-59 bulan) dalam satu tahun tertentu. Ini merupakan indikator penting kesehatan anak yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan efektivitas program kesehatan suatu bangsa, dan sering kali dihitung berdasarkan kasus kematian yang bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah Kematian Balita} = \frac{\text{Jumlah balita yang meninggal pada tahun } n}{\text{Jumlah Populasi Balita pada tahun } n}$
Interpretasi	Semakin kecil jumlah kematian berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan serta kualitas layanan primer.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	c. Persentase Stunting
Definisi	stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Persentase stunting adalah persentase balita yang menderita stunting dibandingkan dengan jumlah balita yang ada pada satu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Stunting} = \frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil persentasenya semakin bagus artinya tidak banyaknya kasus stunting disuatu wilayah dengan kata lain derajat kesehatan masyarakat meningkat dan kualitas layanan juga semakin baik.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	d. Indikator Nasional Mutu (INM) Puskesmas
Definisi	INM Puskesmas adalah singkatan dari <u>Indikator</u>

	Nasional Mutu untuk Puskesmas, yaitu seperangkat tolok ukur standar dari Kementerian Kesehatan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas secara nasional, mencakup aspek seperti kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan APD, identifikasi pasien, cakupan ANC, keberhasilan pengobatan TB, dan kepuasan pasien. Tujuannya adalah memastikan pelayanan Puskesmas bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, dan menjadi alat kendali mutu berbasis data untuk perbaikan berkelanjutan
Rumus Perhitungan	Persentase Stunting $\frac{\text{Jumlah kasus memenuhi standar}}{\text{Jumlah Total Kasus/Pasien}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil persentasenya semakin bagus artinya tidak banyaknya kasus stunting disuatu wilayah dengan kata lain derajat kesehatan masyarakat meningkat dan kualitas layanan juga semakin baik.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Nama Indikator	a. Succes Rate
Definisi	Success rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan TB) adalah indikator penting yang mengukur efektivitas program pengobatan TBC, yaitu jumlah total pasien TB yang sembuh (cured) ditambah pasien yang menyelesaikan pengobatan (completed treatment) dibagi dengan total semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Ini memberikan gambaran seberapa baik program pengendalian TB di suatu wilayah berhasil menyembuhkan atau menyelesaikan pengobatan pasien, yang diukur dalam persentase.
Rumus Perhitungan	SuccesRate $\frac{\text{Seluruh kasus TB yang dinyatakan sembuh}+\text{pengobatan lengkap}}{\text{Seluruh kasus TB yang diobati}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi angka Succes rate maka menggambarkan keberhasilan kinerja dalam rangka pengobati TB di masyarakat
Sumber Data	Puskesmas dan RS
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	b. Peningkatan Skrining Penyakit
Definisi	Skrining penyakit adalah serangkaian tes atau pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit atau faktor risiko kesehatan pada orang yang belum menunjukkan gejala apapun. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga bisa segera dilakukan penanganan yang efektif atau langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko penyakit serius.
Rumus Perhitungan	Persentase Skring Kesehatan

	$\frac{\text{Jumlah orang yang dilakukan skrining}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase masyarakat yang dilakukan skrining maka akan dapat mendeteksi kualitas kesehatan masyarakat secara individu dan dapat dilakukan pengobatan serta pencegahan secara cepat dan tepat.
Sumber Data	Puskesmas dan RS
Frekuensi	Tahunan

4. Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana, Alkes, SDMk dan Kefarmasian

Nama Indikator	a. Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP (%)
Definisi	Persentase ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah indikator penting di fasyankes (Puskesmas/RS) untuk memastikan ketersediaan obat esensial (biasanya 80% dari 40 item indikator) untuk pelayanan, diukur berdasarkan jumlah stok yang tersedia versus kebutuhan, dengan target nasional tertentu namun sering bervariasi tergantung daerah, serta dipengaruhi perencanaan, distribusi, dan manajemen SDM farmasi, dengan tujuan utama menjamin pelayanan kesehatan dasar yang optimal bagi masyarakat.
Rumus Perhitungan	Persentase Ketersedian Obat dan BMHP $\frac{\text{Jumlah stok tersedia}}{\text{Stok ideal}} \times 100\%$
Interpretasi	Interpretasi persentase ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) menunjukkan seberapa baik fasilitas kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) mampu menyediakan obat dan alat kesehatan penting untuk melayani pasien, diukur dari jumlah stok yang tersedia dibandingkan kebutuhan, dengan standar ideal 100% ketersediaan. Nilai di bawah 100% (misalnya 80-90%) berarti ada kekurangan atau kekosongan (stok opname), yang bisa berdampak pada rujukan pasien ke fasilitas lebih tinggi dan menurunkan kepercayaan publik, sementara nilai 100% menandakan ketersediaan aman dan layanan optimal.
Sumber Data	Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK)
Frekurnsi	Pertahun
Nama Indikator	b. Persentase Ketersedian Alkes (%)
Definisi	Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan, reagen in vitro, perangkat lunak, dan bahan atau material serupa lainnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, seperti mendiagnosis, mencegah, memantau, merawat, menyembuhkan, meringankan penyakit, memulihkan kesehatan, serta membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan juga memiliki definisi lebih rinci yang menyatakan bahwa alat ini tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Ketersedian Alkes untuk Puskesmas harus sesuai dengan Permenkes.
Rumus	Persentase Ketersedian Alkes

Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah alkes standar puskesmas yang tersedia}}{\text{Jumlah alkes yang standar harus tersedia di Puskesmas}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ketersediaan alkes yang berfungsi maka kualitas layanan semakin meningkat karena didukung oleh alat yang tersedia dan berfungsi baik dalam mendiagnosa penyakit.
Sumber Data	Puskesmas
Frekuensi	Pertahun
Nama Indikator	c. Peningkatan KOMPETENSI SDM Kesehatan (%)
Definisi	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan artinya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan (teknis dan non-teknis), serta sikap profesional tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dsb.) melalui pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, efektif, efisien, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan SDM Kesehatan $\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang ada}} \times 100\%$
Interpretasi	Diharapkan persentase semakin meningkat setiap tahunnya yang artinya SDM Kesehatan terus ditingkatkan kompetensi dan keahlian dalam melayani Masyarakat lebih berkualitas dan profesional
Sumber Data	Puskesmas
Frekuensi	Pertahun

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Nama Indikator	Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit
Definisi	INM RS adalah singkatan dari Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit, yang merupakan sekumpulan tolok ukur atau alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia. Pengukuran ini mencakup berbagai aspek seperti efektivitas pelayanan, kepuasan pasien, kepatuhan standar, dan keselamatan pasien, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Hasil pengukuran dilaporkan secara nasional melalui aplikasi khusus untuk dipantau oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
Rumus Perhitungan	Persentase INM Rumah Sakit $\frac{\text{Jumlah RS yang Mencapai Target INM}}{\text{Jumlah RS}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase RS yang tercapai target INM maka kualitas layanan RS di wilayah kota Padang sudah tinggi . INM menjadi alat ukur objektif untuk melihat seberapa baik rumah sakit memenuhi standar pelayanan nasional

Sumber Data	Rumah Sakit
Frekuensi	Pertahun

6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Nama Indikator	a. Nilai SAKIP																				
Definisi	SAKIP adalah sistem integratif yang mencakup: • Perencanaan kinerja, • Pengukuran kinerja, • Pelaporan kinerja, • Evaluasi kinerja, dan • Penggunaan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan. Nilai SAKIP diberikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerjanya oleh KemenPANRB																				
Rumus Perhitungan	<table><tr><td>No</td><td>Komponen</td><td>Bobot (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Internal Kinerja</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja dan Penggunaan Informasi Kinerja</td><td>35</td></tr></table>			No	Komponen	Bobot (%)	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	10	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Internal Kinerja	10	5	Capaian Kinerja dan Penggunaan Informasi Kinerja	35
No	Komponen	Bobot (%)																			
1	Perencanaan Kinerja	30																			
2	Pengukuran Kinerja	10																			
3	Pelaporan Kinerja	15																			
4	Evaluasi Internal Kinerja	10																			
5	Capaian Kinerja dan Penggunaan Informasi Kinerja	35																			
Interpretasi		<table><tr><td>Predikat</td><td>Rentang Nilai</td></tr><tr><td>AA</td><td>> 90 – 100</td></tr><tr><td>A</td><td>> 80 – 89,99</td></tr><tr><td>BB</td><td>> 70 – 79,99</td></tr><tr><td>B</td><td>> 60 – 69,99</td></tr><tr><td>CC</td><td>> 50 – 59,99</td></tr><tr><td>C</td><td>> 30 – 49,99</td></tr><tr><td>D</td><td>< 30</td></tr></table>	Predikat	Rentang Nilai	AA	> 90 – 100	A	> 80 – 89,99	BB	> 70 – 79,99	B	> 60 – 69,99	CC	> 50 – 59,99	C	> 30 – 49,99	D	< 30			
Predikat	Rentang Nilai																				
AA	> 90 – 100																				
A	> 80 – 89,99																				
BB	> 70 – 79,99																				
B	> 60 – 69,99																				
CC	> 50 – 59,99																				
C	> 30 – 49,99																				
D	< 30																				
Sumber Data	Dokumen SAKIP, Kementerian PANRB, Output/Outcome program/kegiatan																				
Frekuensi	Tahunan																				
Nama Indikator	b. Indeks Kepuasan Masyarakat																				
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang diperoleh dari survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM dibuat untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah dan digunakan sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang mereka terima, seringkali menggunakan skala seperti skala Likert.																				
Rumus Perhitungan	$IK = (Nilai\ IKM / (Jumlah\ Unsur \times Nilai\ Penimbang\ Tertinggi)) \times 100\%.$																				
Interpretasi	80,00 = Sangat Baik 60,01 - 80,00 = Baik 40,01 - 60,00 = Cukup ≤ 40,00 = Kurang																				

Sumber Data	Puskesmas
Frekuensi	Pertahun

III.METADATA INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Definisi	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil
Rumus Perhitungan	<i>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</i> = <i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun</i> <i>Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kotatersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</i> X 100 %
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar semakin tinggi akan menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian Ibu.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Definisi	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar
Rumus Perhitungan	<i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> = <i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</i> <i>Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</i> X 100%
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar semakin tinggi akan menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian Ibu.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Definisi	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar		
Rumus Perhitungan	<i>Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i>	$= \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar semakin tinggi akan menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian Bayi.		
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		
Frekuensi	Tahunan		

4. Pelayanan Kesehatan Balita.

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Balita		
Definisi	Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar.		
Rumus Perhitungan	<i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i>	$= \frac{\text{Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar semakin tinggi akan menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian Balita.		
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		
Frekuensi	Tahunan		

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
Definisi	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar.		
Rumus Perhitungan	<i>Persentase pelayanan kesehatan pada</i>	$= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah sasaran}} \times 100\%$	

	usia pendidikan dasar $\frac{\text{kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah total anak usia pendidikan dasar}}$
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar menunjukkan sejauh mana anak-anak usia pendidikan dasar di suatu wilayah telah menerima layanan kesehatan sesuai standar. Persentase yang tinggi menunjukkan cakupan yang baik menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Definisi	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar.
Rumus Perhitungan	Persentase pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Semua Penduduk Usia Produktif}}$ X 100%
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif menunjukkan sejauh mana penduduk usia produktif di suatu wilayah telah menerima layanan kesehatan sesuai standar. Persentase yang tinggi menunjukkan cakupan yang baik menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Definisi	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar.
Rumus Perhitungan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan = $\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$ X 100%
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

	seberapa banyak lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Persentase yang tinggi menunjukkan cakupan yang baik menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Definisi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah ukuran keberhasilan program kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar kepada penderita hipertensi. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh penderita Hipertensi.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Definisi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah penderita yang mendapat pelayanan standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes}}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus menunjukkan sejauh mana penderita diabetes mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan di suatu wilayah. Persentase yang tinggi mengindikasikan tingkat

	pelayanan yang baik, di mana sebagian besar penderita diabetes mendapat pemantauan rutin dan penanganan yang tepat
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Definisi	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar
Rumus Perhitungan	<i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> = <i>Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</i> <i>Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</i> X 100%
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat merupakan ukuran keberhasilan suatu wilayah dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa standar kepada penderita gangguan jiwa berat. Semakin tinggi akan menggambarkan kualitas layanan semakin meningkat, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Definisi	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar.
Rumus Perhitungan	<i>Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> = <i>Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</i> <i>Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</i> X 100%
Interpretasi	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah ukuran seberapa efektif suatu program kesehatan dalam memberikan pelayanan standar kepada orang yang diduga menderita TBC. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang terduga TBC

	mendapatkan pemeriksaan penunjang yang sesuai standar
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV

Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	
Definisi	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	
Rumus Perhitungan	<i>Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i> = <i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</i> <i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</i> X 100%	
Interpretasi	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah ukuran seberapa banyak populasi yang berisiko tinggi terkena HIV telah menerima layanan kesehatan yang sesuai standar. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak orang berisiko yang terdeteksi sejak dini.	
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	
Frekuensi	Tahunan	